



TESIS

**EVALUASI BANTUAN SOSIAL MELALUI PROGRAM BERAS
SEJAHTERA DAERAH BAGI KELUARGA MISKIN
KOTA CIMAHI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Terapan Pekerjaan Sosial (M.Tr.Sos)**

ALFIRA NUR KUSUMANINGRUM

NRP. 23.01.013

PEMBIMBING:

DWI YULIANI, M.Si., Ph.D

Drs. DEDE KUSWANDA, Ph.D

PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG 2025

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saat dunia berlari dalam ritme yang berbeda.

Sebagian bergegas membangun rumah.

Sebagian menjejaki karier dengan pasti.

Namun, aku memilih jalan yang sunyi.

Menapaki lorong ilmu yang panjang dan sepi.

Bukan karena enggan pada gemerlap dunia.

Bukan karena takut pada jalan yang biasa.

Tetapi karena di sanubari aku percaya.

Bahwa belajar adalah cahaya

Dan setiap orang punya waktunya.

Tak apa lambat, tak apa berbeda.

Karena mimpi, punya jalannya sendiri.

*Tesis ini menjadi sebuah persembahan kecil
untuk saya sendiri, kedua orang tua, dan
kakak saya. Ketika dunia meninggalkan saya,
mereka yang selalu ada untuk saya. Terima
kasih kepada Ayah Sri Hartana, Ibu Jini,
Kakak Almas Yusuf Kusuma & Sinta Lusi,
yang selalu memberikan dukungan berupa
moril maupun materil kepada saya, hingga
saya bisa mencapai titik ini. Semoga Allah
selalu memberkahi dan melindungi.*

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Evaluasi Bantuan Sosial Melalui Program Beras Sejahtera Daerah Bagi Keluarga Miskin Kota Cimahi** adalah karya saya sendiri. Karya ini belum dipublikasikan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi atau lembaga lain manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip secara langsung maupun tidak langsung dari peneliti lain dalam karya yang dipublikasikan maupun tidak, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir karya ini.

Bandung, 16 Juni 2025



Alfira Nur Kusumaningrum

NRP. 23.01.013

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama **ALFIRA NUR KUSUMANINGRUM**, anak kedua dari dua bersaudara pasangan Sri Hartana dan Jini. Lahir di Klaten pada tanggal 30 April 2001, berdomisili di Dukuh Jayan, Desa Srebegan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Srebegan (2007-2013). Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pedan (2013-2016). Selanjutnya masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Klaten (2016-2019). Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa Program Studi Pekerjaan Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (2019-2023).

Semasa kuliah tingkat sarjana, peneliti aktif di dalam maupun luar kampus. Di antaranya UKM Komunitas Mahasiswa Terapi, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jawa, Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial Bandung, Jabar Bergerak Zillennial. Pada tahun 2022 peneliti mendirikan komunitas yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan literasi untuk anak pra sejahtera di Kota Bandung dengan nama Rumah Pelita Asa.

Pada tahun 2023, peneliti melanjutkan pendidikan Magister di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung melalui program beasiswa prestasi. Semasa kuliah, peneliti sembari bekerja di sebuah perusahaan *start-up* sebagai supervisor operasional, kemudian pernah menjadi enumerator pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) diselenggarakan oleh KemenPPPA yang berlokasi di Provinsi Riau, selain itu juga magang di PT. Global Humanity Innovation yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesehatan mental sebagai *Chief Operational Officer* sekaligus konselor pada penanganan kekerasan. Demikian riwayat hidup peneliti secara singkat, semoga dengan hal ini para pembaca akan lebih mengenal peneliti.

LEMBAR PENGESAHAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL MELALUI PROGRAM BERAS
SEJAHTERA DAERAH BAGI KELUARGA MISKIN
KOTA CIMAHI

Disusun Oleh :
Alfira Nur Kusumaningrum
NRP 23.01.013

Tesis ini diuji dan dinyatakan lulus
pada tanggal 16 Juni 2025.

Pembimbing,



Dwi Yuliani, M.Si., Ph.D
NIP. 19630710 198810 2 001




Drs. Dede Kuswanda, Ph.D
NIP. 19630506 198803 1 004

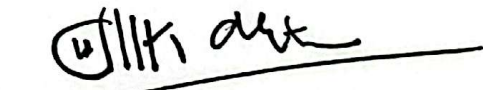
Mengetahui,

Direktur
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial
Program Magister Terapan




Suharna, S.Sos., MP., Ph.D
NIP. 19680315 199803 1 001


Tuti Kartika, Ph.D
NIP. 19640401 199002 2 001

ABSTRAK

ALFIRA NUR KUSUMANINGRUM, 23.01.013. Evaluasi Bantuan Sosial Melalui Program Beras Sejahtera Daerah Bagi Keluarga Miskin Kota Cimahi. Dosen Pembimbing: Dwi Yuliani dan Dede Kuswanda.

Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) merupakan implementasi dari kebijakan lokal Pemerintah Kota Cimahi sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial yang belum terakomodasi bantuan dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Rastrada melalui enam aspek kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn, yaitu: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) kesetaraan, 5) responsivitas, dan 6) ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 100 responden dari populasi 2.250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastrada di Kota Cimahi yang dipilih menggunakan *area random sampling* dari tiga kecamatan. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil evaluasi melalui studi dokumen, dilengkapi wawancara kepada pelaksana utama kebijakan dari Dinas Sosial, petugas distribusi, dan pemangku kepentingan lokal. Uji validitas penelitian ini berupa uji validitas isi, konstruk, dan statistik menggunakan perangkat lunak SPSS. Serta uji reliabilitas dengan hasil 0,903. Analisis data melalui proses: 1) penyuntingan data, 2) pengkodean data, 3) memasukkan data, 4) pembersihan data, dan 5) tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek efektivitas berada di tingkat efektif, aspek efisiensi berada di tingkat sangat efisien, aspek kecukupan berada di tingkat cukup, aspek kesetaraan berada di tingkat sangat setara, aspek responsivitas berada di tingkat responsif, dan aspek ketepatan berada di tingkat tepat. Setiap aspek menunjukkan hasil evaluasi yang positif, namun masih terdapat tantangan maupun hambatan yang terjadi dalam implementasi di lapangan. Sehingga melalui temuan ini peneliti melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan melalui dengar pendapat dan penyusunan naskah kebijakan. Naskah kebijakan tersebut memberikan rekomendasi berupa revisi terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) program Rastrada. Dengan hasil evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi kebijakan Rastrada agar lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan kemiskinan di Kota Cimahi.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Beras Sejahtera Daerah, Keluarga Miskin

ABSTRACT

ALFIRA NUR KUSUMANINGRUM, 23.01.013. *Evaluation of Local Social Assistance Through the Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) for Poor Families in Cimahi City.* Supervisors: Dwi Yuliani dan Dede Kuswanda.

Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) is a local policy implemented by the Cimahi City Government as a form of social protection for poor and socially vulnerable families who are not covered by national government assistance. This study aims to evaluate the implementation of the Rastrada policy using six policy evaluation criteria developed by William Dunn: 1) effectiveness, 2) efficiency, 3) adequacy, 4) equity, 5) responsiveness, and 6) appropriateness. This research applies a quantitative approach with a descriptive survey method. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected from the population of 2.250 beneficiary families (Keluarga Penerima Manfaat, or KPM) using area probability sampling from three districts in Cimahi City. To strengthen the quantitative findings, qualitative data were also collected through document studies and interviews with key stakeholders such as officers from the Social Services Department, distribution officers, and local stakeholders. The validity of the research was ensured through content, construct, and statistical, with a reliability score of 0.903. Data analysis involved several steps: 1) data editing, 2) data coding, 3) data entry, 4) data cleaning, and 5) tabulation. The findings show that Rastrada's implementation is evaluated as effective in terms of effectiveness, very efficient in terms of efficiency, adequate in adequacy, highly equitable in equity, responsive in responsiveness, and appropriate in accuracy. Each aspect demonstrated positive evaluation outcomes, although there are still challenges and obstacles in the field. Based on these findings, the researcher conducted policy advocacy through public hearings and developed a policy paper recommendation revisions to Cimahi Mayor Regulation Number 25 of 2022 and the formulation of Standard Operating Procedures (SOP) for the Rastrada program. It is hoped that the evaluation results can contribute to improve the implementation of Rastrada to be more adaptive, responsive, and well-targeted in addressing poverty issues in Cimahi City.

Keywords : *Policy Evaluation, Program Beras Sejahtera Daerah, Poor Families*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyusun tesis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Peneliti menyadari bahwa tesis ini selesai tepat waktu karena dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil yang tidak terhingga kepada peneliti. Selain itu, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Suharna, Ph.D., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Tuti Kartika, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan.
3. Dwi Yuliani, Ph.D dan Dede Kuswanda, Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta motivasi kepada peneliti.
4. Drs. Ahmad Saefulloh, M.M., selaku Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi.
5. Agustus Fajar Senjaya, A.KS., MPSSp., selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
6. Pekerja Sosial maupun pejabat strategis lainnya di Pemerintah Kota Cimahi.
7. Semua pihak yang ikut membantu dalam penulisan tesis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dari Bapak/Ibu, Saudara/i sekalian. Besar harapan dengan disusunnya tesis ini dapat memenuhi syarat guna memperoleh gelar magister terapan.

Bandung, 16 Juni 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIK	8
2.1 Tinjauan tentang Kemiskinan.....	8
2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	8
2.1.2 Dimensi Kemiskinan.....	9
2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan.....	9

2.1.4	Bentuk-Bentuk Kemiskinan.....	10
2.1.5	Faktor Penyebab Kemiskinan	11
2.1.6	Indikator Kemiskinan.....	12
2.2	Tinjauan tentang Perlindungan Sosial.....	14
2.2.1	Definisi Perlindungan Sosial.....	14
2.2.2	Tujuan Perlindungan Sosial	15
2.2.3	Perlindungan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	16
2.3	Tinjauan tentang Bantuan Sosial.....	17
2.3.1	Definisi Bantuan Sosial.....	17
2.3.2	Tujuan Bantuan Sosial	17
2.3.3	Bantuan Sosial dalam Perlindungan Sosial.....	18
2.3.4	Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	20
2.3.5	Jenis-Jenis Bantuan Sosial Kemiskinan.....	20
2.4	Tinjauan tentang Evaluasi	22
2.4.1	Definisi Evaluasi	22
2.4.2	Tujuan Evaluasi.....	23
2.4.3	Karakteristik Evaluasi	23
2.4.4	Model-Model Evaluasi.....	25
2.4.5	Jenis Evaluasi.....	26
2.4.6	Evaluasi dalam Kebijakan Publik	27
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Rancangan Penelitian	28
3.2	Definisi Operasional.....	29
3.3	Populasi dan Teknik Penarikan Sampel	30
3.3.1	Populasi.....	30
3.3.2	Teknik Penarikan Sampel	30
3.4	Alat Ukur Penelitian.....	32
3.5	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	34
3.5.1	Uji Validitas	34

3.5.2	Uji Reliabilitas	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1	Wawancara.....	36
3.6.2	Studi Dokumen.....	37
3.7	Analisis Data	37
3.7.1	Peyuntingan Data/ <i>Editing</i>	38
3.7.2	Pengkodean Data/ <i>Coding Data</i>	38
3.7.3	Memasukkan Data/ <i>Entry Data</i>	38
3.7.4	Pembersihan Data/ <i>Cleaning</i>	39
3.7.5	Tabulasi/ Pembeberan	39
3.8	Langkah dan Jadwal Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Deskripsi Kebijakan Rastrada dan Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Deskripsi Kebijakan Rastrada	42
4.1.2	Lokasi Penelitian.....	43
4.2	Hasil Penelitian.....	51
4.2.1	Efektivitas	51
4.2.2	Efisiensi.....	62
4.2.3	Kecukupan.....	70
4.2.4	Kesetaraan	76
4.2.5	Responsivitas.....	82
4.2.6	Ketepatan.....	89
4.3	Pembahasan	95
4.3.1	Efektivitas	96
4.3.2	Efisiensi.....	98
4.3.3	Kecukupan.....	99
4.3.4	Kesetaraan	100
4.3.5	Responsivitas.....	101
4.3.6	Ketepatan.....	103

BAB V IMPLIKASI HASIL PENELITIAN	105
5.1 Implikasi Teoritis.....	105
5.2 Implikasi Praktis.....	107
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
6.1 Kesimpulan.....	112
6.2 Saran.....	115
6.2.1 Saran Guna Laksana.....	115
6.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	33
Tabel 3. 2: Tabel Jadwal Penelitian Tesis.....	41
Tabel 4. 1: Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4. 2: Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 4. 3: Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cimahi	47
Tabel 4. 4: Jumlah Pengangguran Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 4. 5: Kesesuaian Rastrada dengan Pemenuhan Kebutuhan Pangan.....	51
Tabel 4. 6: Kesesuaian Rastrada terhadap Pengurangan Beban Rumah Tangga..	52
Tabel 4. 7: Kesesuaian Pengalihan Uang untuk Kebutuhan Pangan Lain	53
Tabel 4. 8: Kesesuaian Rastrada dengan Pemenuhan Pendidikan Kesehatan	54
Tabel 4. 9: Frekuensi KPM Menabung Sejak Menerima Bantuan Rastrada	55
Tabel 4. 10: Kestabilan Ekonomi KPM Setelah Menerima Bantuan Rastrada.....	56
Tabel 4. 11: Kondisi Fasilitas Pada Lokasi Penyaluran.....	57
Tabel 4. 12: Kepuasan KPM terhadap Kuantitas Rastrada	57
Tabel 4. 13: Kepuasan KPM terhadap Kualitas Rastrada	58
Tabel 4. 14: Kepuasan KPM terhadap Proses Layanan Penyaluran Rastrada	59
Tabel 4. 15: Kategori Jawaban Aspek Efektivitas	60
Tabel 4. 16: Frekuensi Ketepatan Waktu dalam Penyaluran	63
Tabel 4. 17: Frekuensi Kecepatan Proses Penyaluran	64
Tabel 4. 18: Jarak Lokasi dan Kemudahan Akses	64
Tabel 4. 19: Kemudahan Proses Penyaluran.....	65
Tabel 4. 20: Kemudahan Membawa Tiga Karung Beras	66
Tabel 4. 21: Kesesuaian Rastrada terhadap Beban Finansial.....	66
Tabel 4. 22: Kesesuaian Rastrada terhadap Biaya Administrasi.....	67
Tabel 4. 23: Kategori Jawaban Aspek Efisiensi.....	69
Tabel 4. 24: Kesesuaian Rastrada dengan Kebutuhan Rumah Tangga.....	71
Tabel 4. 25: Kesesuaian Alternatif KPM dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan..	71
Tabel 4. 26: Kecukupan Satu Karung Beras untuk Satu Bulan	72
Tabel 4. 27: Kesesuaian Rastrada dengan Beras Tambahan.....	73

Tabel 4. 28: Kategori Jawaban Aspek Kecukupan	74
Tabel 4. 29: Kesesuaian Rastrada dalam Penyediaan Tiga Karung Beras 10 kg..	76
Tabel 4. 30: Kesesuaian Penyaluran Urut Antrean Kedatangan	77
Tabel 4. 31: Kesesuaian Sistem Antrean Dijalankan dengan Tertib.....	77
Tabel 4. 32: Frekuensi Pelayanan Ramah yang Diberikan Petugas.....	78
Tabel 4. 33: Frekuensi Perlakuan Baik kepada KPM oleh Petugas.....	79
Tabel 4. 34: Kategori Jawaban Aspek Kesetaraan.....	80
Tabel 4. 35: Pemahaman KPM Terkait tahapan Program Rastrada.....	82
Tabel 4. 36: Frekuensi Informasi Penyaluran yang Jelas dan Teratur	83
Tabel 4. 37: Interaksi KPM dengan Petugas/RT/RW/Puskesmas/Peksos	83
Tabel 4. 38: Kesesuaian KPM dalam Mengetahui Alur Pengaduan Rastrada	84
Tabel 4. 39: Kesesuaian Penanganan Pengaduan/Keluhan oleh Petugas	85
Tabel 4. 40: Kesesuaian Penanganan Petugas Saat KPM Berhalangan Hadir.....	85
Tabel 4. 41: Kategori Jawaban Aspek Responsivitas	87
Tabel 4. 42: Kesesuaian Status KPM Penerima Tunggal Bantuan Sosial	89
Tabel 4. 43: Kesesuaian Kelayakan KPM di Wilayahnya	90
Tabel 4. 44: Kesesuaian Penyaluran Rastrada Setiap Tiga Bulan	91
Tabel 4. 45: Kesesuaian Harapan KPM terhadap Bantuan Rastrada	91
Tabel 4. 46: Kategori Jawaban Aspek Ketepatan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1: Diagram Aspek Efektivitas	61
Gambar 4. 2: Diagram Aspek Efisiensi.....	69
Gambar 4. 3: Diagram Aspek Kecukupan	74
Gambar 4. 4: Diagram Aspek Kesetaraan.....	80
Gambar 4. 5: Diagram Aspek Responsivitas	87
Gambar 4. 6: Diagram Aspek Ketepatan.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian.....	121
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	122
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	125
Lampiran 4 : Pedoman Studi Dokumen	129
Lampiran 5 : Perhitungan Rekapitulasi.....	131
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan	149
Lampiran 7 : Naskah Kebijakan.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang mencakup berbagai dimensi serta berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Masalah ini sering kali menjadi siklus yang sulit diatasi, di mana individu dan keluarga terjebak dalam kondisi kekurangan secara berkelanjutan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Mardikanto, 2019). Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan (Marjuki et al., 2022).

Pangan menjadi salah satu aspek kebutuhan dasar utama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia, dengan total konsumsi mencapai 35,3 juta metrik ton sepanjang tahun 2023. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan bahwa 98,35 persen rumah tangga di Indonesia masih mengandalkan beras sebagai bahan makanan utama, dengan rata-rata konsumsi 6,6 kilogram per kapita setiap bulan di tahun 2023. Menurut BPS, konsumsi beras di Kota Cimahi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.163 kilogram per minggu berdasarkan kelompok konsumsi padi-padian di tingkat kabupaten/kota.

Angka konsumsi beras yang tinggi menunjukkan bahwa beras merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, termasuk kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial (Luthfi, 2019). Program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

yang dikelola oleh Kementerian Sosial dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, keterbatasan kuota dan cakupan program dari pemerintah pusat sering kali meninggalkan sejumlah masyarakat miskin yang belum terakomodasi dan menyebabkan konflik (Nandini et al., 2022). Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melengkapinya melalui inisiatif kebijakan lokal.

Salah satu upaya ini diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, meluncurkan sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Rastrada. Rastrada dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial (Pasal 3 ayat 1 Perwal). Diluncurkan pada tahun 2019 dan diatur secara resmi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022. Rastrada bertujuan untuk melengkapi program nasional. Rastrada menyediakan bantuan berupa 10 beras berkualitas premium setiap bulan kepada masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial yang belum tersentuh bantuan sosial, baik yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS. Program ini sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan disalurkan setiap tiga bulan.

Berbeda dengan program pendahulunya, seperti Beras Keluarga Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra), yang memberikan beras dengan harga subsidi (Eqy et al., 2022). Rastrada memberikan bantuan beras secara gratis, yang mana pendanaan dialokasikan langsung melalui rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pada akhir tahun 2023, Rastrada berhasil menjangkau sebanyak 5.703 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian pada tahun 2024, ditingkatkan menjadi 150 KPM pada 15 kelurahan, sehingga setiap termin kurang

lebih 2.250 KPM menerima bantuan Rastrada. Apabila diakumulasikan dalam empat termin penyaluran, maka total yang telah disalurkan kurang lebih kepada 9.000 penerima manfaat. Kemudian hasil dari survei kepuasan masyarakat menunjukkan 94,7 persen penerima manfaat merasa puas dan sangat puas mendapatkan bantuan Rastrada (hasil praktikum, 2024). Diperkuat dengan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan, bahwa Rastrada mendapat nilai tertinggi dengan 99,17 kategori unggul (IKK, 2024). Angka-angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal.

Di balik keberhasilan Rastrada dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan di Kota Cimahi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan yang ditemukan oleh peneliti ketika praktikum. Pertama, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota No.25 Tahun 2022 yang mewajibkan pengambilan oleh penerima manfaat sesuai SK dan tidak ada mekanisme perwakilan (Pasal 24 & 25 Perwal). Sehingga dalam pelaksanaan menyulitkan penerima manfaat yang sakit, lanjut usia, disabilitas, atau yang memiliki keterbatasan lainnya. Kedua, kebijakan yang tidak memungkinkan bantuan diwariskan kepada anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) setelah penerima utama meninggal dunia (hasil praktikum, 2024). Sedangkan pemanfaatan bantuan beras untuk satu keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga yang masih membutuhkan harus kehilangan manfaat dan apabila mengajukan kembali membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Permasalahan ketiga yang diidentifikasi adalah mekanisme pengadaan Kartu Penerima Rastrada yang dinilai kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara

dan observasi praktikum, dalam implementasi di lapangan, kartu tidak diberikan kepada penerima manfaat melainkan disimpan oleh petugas. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pekerja Sosial kelurahan bahwa hal ini untuk mencegah adanya kehilangan, karena di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 apabila hilang maka ada mekanisme yang harus dilakukan. Selain itu alasan lain yakni keberadaan kartu penerima seringkali menjadikan ketergantungan pada bantuan (hasil praktikum, 2024). Karena penerimaan Rastrada didasarkan oleh Surat Keputusan Wali Kota dalam periode waktu tertentu. Dalam peraturan tidak dijelaskan penarikan kartu ketika periode bantuan habis, sehingga ketika KPM tidak lagi menerima namun masih memiliki kartu, seringkali menagih dan berharap mendapat bantuan Rastrada di periode selanjutnya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis pada profil analisis kebijakan sosial sebagai kelanjutan dari kegiatan praktikum sebelumnya. Praktikum tersebut memberikan gambaran awal mengenai tantangan dan keberhasilan program Rastrada di lapangan. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Cimahi, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan secara lebih komprehensif, mengidentifikasi permasalahan yang mendalam, serta memberikan rekomendasi strategis guna membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas implementasi. Selain itu, fokus lanjutan penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan teori dan praktik dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Cimahi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi bantuan sosial melalui program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?

Adapun sub-sub problematik penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa efektif program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
2. Seberapa efisien program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
3. Seberapa cukup program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
4. Seberapa setara program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
5. Seberapa responsif program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
6. Seberapa tepat program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang evaluasi bantuan sosial melalui program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) bagi keluarga miskin di Kota Cimahi. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat efisiensi program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
3. Untuk mendeskripsikan tingkat kecukupan program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.

4. Untuk mendeskripsikan tingkat kesetaraan program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
5. Untuk mendeskripsikan tingkat responsivitas program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
6. Untuk mendeskripsikan tingkat ketepatan program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial dengan kemiskinan. Kemudian memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kebijakan sosial memengaruhi kehidupan masyarakat miskin di tingkat lokal, serta menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori terkait peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskusi ilmiah tentang bagaimana sinergi antara kebijakan lokal dan kebijakan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini:

- 1) Memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan implementasi program Rastrada.
- 2) Dapat menggali keterbatasan maupun kendala implementasi kebijakan.
- 3) Memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam evaluasi implementasi program.
- 4) Dapat menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terkait dengan profil Analisis Kebijakan Sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** PENDAHULUAN, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** KAJIAN PUSTAKA, memuat tinjauan konseptual tentang kemiskinan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan evaluasi.
- BAB III** METODE PENELITIAN, memuat rancangan penelitian, definisi operasional, populasi dan teknik penarikan sampel, alat ukur, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data, analisis data, langkah dan jadwal penelitian.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat deskripsi kebijakan dan lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
- BAB V** IMPLIKASI HASIL PENELITIAN, memuat teoritis dan praktis.
- BAB VI** KESIMPULAN DAN SARAN, memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

2.1 Tinjauan tentang Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Definisi kemiskinan telah berkembang karena faktor penyebab, indikator, maupun masalah yang semakin kompleks. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam definisi ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Definisi tersebut didukung oleh Mardikanto (2019) bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mewujudkan hak-hak fundamentalnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi lain dari Suharto (2013), kemiskinan mengacu pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau karena negara kurang untuk menyediakan perlindungan sosial. Sementara itu menurut Nugroho dalam (Yulia, 2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk mencapai standar hidup minimum. Untuk melihat secara lebih komprehensif, pembahasan selanjutnya akan menguraikan dimensi kemiskinan.

2.1.2 Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, oleh karena itu David Cox dalam (Sjafari, 2014) membagi kemiskinan menjadi beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pecundang. Pemenang biasanya adalah negara-negara maju. Sementara itu, di negara berkembang semakin terpinggirkan.
2. Kemiskinan terkait dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (akibat marginalisasi dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kecepatan pertumbuhan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan akibat kejadian atau faktor lain di luar masyarakat miskin, seperti konflik, bencana alam.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat dimensi kemiskinan yang menggambarkan bagaimana kemiskinan dipengaruhi. Untuk memahami dampak dari masing-masing dimensi ini, penting untuk melihat ciri-ciri kemiskinan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut Rustanto (2015), kemiskinan mempunyai ciri-ciri dimensi ekonomi yang berarti tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna, akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Sedangkan ciri-ciri kemiskinan menurut Soeharto dalam (Yulia, 2020) adalah:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Tidak dapat bekerja karena sakit, cacat fisik atau mental.
3. Tidak dapat berfungsi secara sosial.
4. Rendahnya sumber daya manusia.
5. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa.
6. Kurangnya akses terhadap pekerjaan dan penghidupan berkelanjutan.
7. Kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan.
8. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak ada keterlibatan dalam komunitas.

Ciri-ciri ini mempertegas bahwa kemiskinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga melibatkan aspek non-material yang memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Untuk memahami lebih dalam, ciri-ciri ini dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk kemiskinan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Tipologi kemiskinan yang dijelaskan oleh (Suharto, 2020) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan 'kondisi umum' suatu masyarakat.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya, kehidupan, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sesuai etos kemajuan.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakaturan atau ketidakadilan struktur, baik politik, sosial, atau ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mengakses sumber daya.

Tipologi kemiskinan ini menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan dapat berbeda tergantung pada latar belakang penyebabnya. Untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam, perlu ditelaah faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan.

2.1.5 Faktor Penyebab Kemiskinan

Seseorang mengalami kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan demikian menurut Suharto (2009) kemiskinan disebabkan oleh empat faktor, yang saling terkait dengan beberapa aspeknya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor individual. Dalam hal ini, kemiskinan terkait dengan aspek patologis, terutama kondisi fisik dan psikologis. Orang menjadi miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan mereka dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial. Dalam hal ini, kondisi lingkungan sosial yang ditempati seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.
3. Faktor kultural. Faktor ini sering merujuk pada konsep budaya kemiskinan yang mengaitkan kemiskinan dengan kebiasaan gaya hidup atau pola pikir.

4. Faktor struktural. Dalam hal ini, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible*, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menuju kemiskinan.

Pemahaman atas faktor-faktor ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penyebab kemiskinan. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat kemiskinan secara lebih spesifik, diperlukan indikator-indikator yang dapat mengidentifikasi kondisi kemiskinan secara objektif dan terukur.

2.1.6 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi kehidupan seseorang atau keluarga yang berada di bawah kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang seharusnya dapat dibayarkan setiap individu untuk kebutuhan makanan yang setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya, menurut Badan Pusat Statistika dan Departemen Sosial yang dikutip oleh (Sjafari, 2014).

Seiring berjalannya waktu, indikator nasional untuk menghitung jumlah penduduk miskin terdapat 14 kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika, sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan ke puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat Sekolah Dasar/ tamat Sekolah Dasar.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kemiskinan yang multidimensional tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ketahanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan, salah satunya melalui perlindungan sosial. Perlindungan sosial dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai

perlindungan sosial menjadi relevan dalam memahami bagaimana kebijakan ini berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Tinjauan tentang Perlindungan Sosial

2.2.1 Definisi Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Suharto, 2013). Sejalan dengan (Wahyu et al., 2014) perlindungan sosial sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. *United Nations Children's Fund (UNICEF)* yang dikutip oleh (Wahyu et al., 2014) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan. Sedangkan menurut Barrientos dalam (Khaliq & Uspri, 2017), perlindungan sosial secara tradisional memiliki konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial merupakan kumpulan upaya publik dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

Perlindungan sosial dapat dipahami sebagai serangkaian kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan, risiko, dan dampak kemiskinan, baik melalui transfer pendapatan, peningkatan status sosial, maupun intervensi publik untuk kelompok rentan. Selanjutnya, pembahasan

tentang tujuan perlindungan sosial akan menjelaskan bagaimana upaya ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperkuat ketahanan individu dan komunitas, serta mendukung pembangunan sosial yang inklusif.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Sosial

Menurut *World Bank* dalam (Khaliq & Uspri, 2017) perlindungan sosial ditujukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan bukan hanya terbatas pada tindakan yang hanya menyelesaikan gejala kemiskinan. Sedangkan menurut *International Labour Organization (ILO)* perlindungan sosial ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, namun harus dilengkapi dengan strategi lain. Strategi yang dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dan rentan serta membantu individu maupun masyarakat dalam menghadapi goncangan-goncangan dalam hidup (Iping, 2020). Sedangkan menurut (Wahyu et al., 2014) tujuan utama perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Perlindungan sosial memiliki peran yang krusial dalam menangani kemiskinan secara komprehensif. Perlindungan sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.2.3 Perlindungan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Iping (2020), perlindungan sosial merupakan salah satu strategi atau langkah dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya dalam penelitian Khaliq & Uspri (2017), disampaikan bahwa pentingnya perlindungan sosial bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, dan peningkatan kualitas. Konsep perlindungan sosial pada awalnya lebih berfokus kepada tujuan jangka pendek, yang mana hal tersebut kerap mendapat kritik karena cenderung mengeluarkan banyak anggaran dan tidak menciptakan kemandirian. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan (Wahyu et al., 2014).

Perlindungan sosial mencakup berbagai upaya kebijakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi masyarakat miskin dan rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk konkret dari perlindungan sosial adalah bantuan sosial. Bantuan sosial menjadi bagian penting dari perlindungan sosial, karena memberikan dukungan finansial maupun non finansial yang dapat membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bantuan sosial diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat berkontribusi dalam pelaksanaan perlindungan sosial.

2.3 Tinjauan tentang Bantuan Sosial

2.3.1 Definisi Bantuan Sosial

Menurut Retnaningsih (2020) bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan masyarakat terpinggirkan. Menurut Suharto dalam (Retnaningsih, 2020) bantuan sosial adalah pelayanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal. Bantuan sosial bisa berasal dari pemerintah maupun non pemerintah dan didistribusikan langsung kepada masyarakat atau melalui pihak ketiga. Bantuan sosial dapat disalurkan dengan syarat maupun tanpa syarat.

Bantuan sosial berperan penting dalam menyediakan dukungan finansial dan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, penting untuk memahami tujuan dari bantuan sosial ini.

2.3.2 Tujuan Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menganggulangi permasalahan berisiko sosial. Sementara itu, menurut (Salsabila et al., 2024) bantuan sosial mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial, yaitu pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial untuk berfungsi secara sosial.
2. Perlindungan Sosial, untuk mencegah dan menanggulangi risiko guncangan dan kerentanan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

sehingga kelangsungan hidupnya dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan dasar minimum.

3. Pemberdayaan Sosial, untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan Sosial, skema guna menjamin penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
5. Penanggulangan Kemiskinan, memiliki arti bahwa bantuan sosial merupakan suatu kebijakan, program atau kegiatan, yang dilaksanakan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak.
6. Penanggulangan Bencana, serangkaian upaya yang ditujukan untuk kebencanaan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, tampak bahwa bantuan sosial memiliki keterkaitan erat dengan sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks perlindungan sosial.

2.3.3 Bantuan Sosial dalam Perlindungan Sosial

Bantuan sosial berfungsi sebagai bentuk intervensi non-kontributif yang menempati posisi penting dalam sistem perlindungan sosial. Di Indonesia, bantuan sosial dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang tidak tercakup dalam skema jaminan sosial berbasis iuran. Menurut (Suryadarma et al., 2024) bantuan sosial merupakan *non-contributory scheme* yang menjadi bagian mendasar dari perlindungan sosial, karena diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat miskin serta merespons risiko sosial yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bantuan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial nasional.

Pandangan serupa dikemukakan oleh *International Labour Organization* (ILO, 2017), yang menjelaskan bahwa sistem perlindungan sosial terdiri dari berbagai instrumen, termasuk bantuan sosial (*social assistance*) sebagai program non-kontributif. ILO menekankan pentingnya keberadaan bantuan sosial untuk menjangkau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan berbasis iuran. *Governance and Social Development Resource Centre* (GSDRC, 2016), turut menegaskan bahwa bantuan sosial berupa voucher, tunai, atau bantuan barang kepada individu atau kelompok miskin, merupakan salah satu bentuk utama dari perlindungan sosial yang efektif dalam konteks pembangunan negara berkembang.

Dengan demikian, bantuan sosial merupakan bagian integral dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh kepada kelompok miskin dan rentan. Keberadaannya tidak hanya bersifat responsif terhadap risiko sosial, tetapi juga strategis dalam memperkuat kapasitas perlindungan sosial secara nasional. Integrasi bantuan sosial dalam kebijakan perlindungan sosial memungkinkan terwujudnya intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif.

Setelah memahami posisi bantuan sosial dalam sistem perlindungan sosial, penting untuk meninjau lebih lanjut bagaimana bantuan sosial berperan secara praktis dalam menanggulangi kemiskinan.

2.3.4 Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan

Menurut hasil penelitian Salsabila et al., (2024) program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah tentu saja tidak hanya ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Program bantuan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat penerima bantuan sosial di kemudian hari. Pemerintah harus melanjutkan program bantuan sosial untuk memberantas kemiskinan, dengan merombak sistem yang berlaku saat ini. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2019 – 2022, disertai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 – 2023. Hal ini memperkuat rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan pendataan penerima manfaat, sehingga program dapat efektif dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial perlu mendapat perhatian khusus guna memastikan ketepatan sasaran penerima dan meminimalisir adanya penyelewengan oleh oknum.

Guna memahami peran bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan secara lebih konkret, penting untuk meninjau berbagai jenis bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

2.3.5 Jenis-Jenis Bantuan Sosial Kemiskinan

Kementerian Sosial telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penerima layanan dengan tujuan mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 (Huruswati et al., 2014). Berikut jenis bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia, serta penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosialnya.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang dibayarkan pemerintah kepada KPM setiap bulan melalui mekanisme rekening elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang yang bekerjasama dengan perbankan.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

BST merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah pandemi sebesar Rp 600.000/bulan.

4. Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

PENA merupakan program pelengkap yang memberikan bantuan dan pendampingan kepada KPM untuk mengembangkan usaha dengan tujuan akhir dapat mengikuti graduasi PKH.

5. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia. Diberikan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial.

6. Pemberian Bantuan Iuran (PBI)

PBI diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dalam bentuk iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulan.

Bantuan sosial sebagai salah satu instrumen utama perlindungan sosial, dalam efektivitas pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana program bantuan sosial sosial dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya mengukur keberhasilan, melainkan juga untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan peluang perbaikan di masa mendatang.

2.4 Tinjauan tentang Evaluasi

2.4.1 Definisi Evaluasi

Menurut Muryadi (2017) definisi evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Peter & Freeman dalam (Wirawan, 2012) menyebutkan definisi evaluasi dalam suatu penelitian adalah penerapan sistematis prosedur penelitian sosial dalam menilai konseptualisasi dan design, implementasi, dan utilitas program intervensi sosial. Kemudian dilengkapi oleh Ambiyar & Muharika (2019), evaluasi dalam riset yaitu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, membandingkan dengan indikator evaluasi, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan evaluasi dalam analisis kebijakan yaitu produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan (N. Dunn, 2003).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses mengetahui dan mengukur sesuatu dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, perlu diketahui tujuan dari kegiatan evaluasi pada suatu program.

2.4.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai manfaat dari objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Wirawan, 2012). Selain itu tujuan evaluasi yaitu:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Sebagai bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan.
5. Memberikan umpan balik bagi objek yang dievaluasi.

Tujuan evaluasi sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang dapat menentukan nilai dan manfaat dari objek evaluasi. Untuk memastikan bahwa tujuan evaluasi dapat tercapai secara optimal, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai karakteristik evaluasi itu sendiri. Karakteristik evaluasi mencerminkan bagaimana proses evaluasi dirancang dan dilaksanakan agar dapat memberikan hasil yang objektif, akurat, serta relevan dengan kebutuhan penelitian.

2.4.3 Karakteristik Evaluasi

Menurut N. Dunn (2003) terdapat enam karakteristik evaluasi kebijakan:

1. Efektivitas (*effectiveness*) mengacu pada sejauh mana suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari kebijakan. Dilihat dari kebermanfaatan bantuan dan kepuasan terhadap bantuan (Dehani et al., 2018).

2. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Usaha dalam hal ini dapat berupa waktu, tenaga, dan biaya (Dehani et al., 2018).
3. Kecukupan (*adequacy*) menggambarkan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang melatarbelakangi munculnya suatu masalah. Kecukupan dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan KPM dan kecukupan jumlah bantuan (Dehani et al., 2018).
4. Kesetaraan (*equity*) berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Berupa pemerataan jumlah dan pemerataan pelayanan petugas (Dehani et al., 2018).
5. Responsivitas (*responsiveness*) menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Berupa pengetahuan KPM terhadap tahapan program dan proses pengaduan (Dehani et al., 2018).
6. Ketepatan (*appropriateness*) mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan suatu program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Ketepatan diukur berdasarkan tepat sasaran, tepat waktu, dan kesesuaian harapan KPM (Dehani et al., 2018).

Karakteristik evaluasi yang mencakup objektivitas, sistematis, dan relevansi dengan tujuan penelitian menjadi dasar dalam menentukan model evaluasi yang tepat. Beragam model evaluasi dikembangkan untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan evaluasi.

2.4.4 Model-Model Evaluasi

Menurut Ralph. W Tyler dalam (Wirawan, 2012) terdapat beberapa model evaluasi, di antaranya:

1. Model Berbasis Tujuan / *Goal Based Evaluation*

Secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program, atau proyek dapat dicapai atau tidak.

2. Model Bebas Tujuan / *Goal Free Evaluation*

Model ini mengevaluasi pengaruh yang sesungguhnya, objek yang ingin dicapai oleh suatu program.

3. Model Formatif dan Sumatif

Model formatif mengevaluasi untuk memperbaiki suatu objek, terutama jika objek sedang dikembangkan. Sedangkan sumatif untuk mengukur kinerja akhir objek yang dievaluasi.

4. Model *Context, Input, Process, Product (CIPP)*

Model CIPP merupakan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem.

5. Model Adversari

Model ini menyerupai proses pengadilan atau yudisial. Tujuan utama dari model ini yaitu mengurangi potensi bias dengan membentuk dua evaluator yang berbeda. Kedua evaluator tersebut adalah evaluator pro dan kontra.

Telah dijelaskan berbagai model evaluasi, yang mana masing-masing memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam menilai kinerja program. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan objeknya.

2.4.5 Jenis Evaluasi

Menurut Wirawan (2012) berdasarkan objeknya, evaluasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Dalam hal ini evaluasi guna menentukan kebermanfaatan kebijakan, tercapainya tujuan, dan pelaksanaan implementasi yang efisien serta akuntabel.

2. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai pencapaian tujuan program. Evaluasi program dapat memuat evaluasi proses dan evaluasi hasil.

3. Evaluasi Proyek

Proyek adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Evaluasi proyek guna menilai keberhasilan, mengetahui tantangan maupun hambatan, dan dilakukan upaya perbaikan.

4. Evaluasi Material

Evaluasi material untuk menilai kesesuaian dan pemanfaatan material yang efisien dan sesuai dengan proyek atau programnya.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi SDM bertujuan untuk menilai personalia atau kinerja pegawai.

Dari lima jenis evaluasi tersebut, dalam penelitian yang dilakukan yaitu evaluasi kebijakan, yang kemudian diturunkan melalui implementasi program. Untuk itu, pentingnya memahami evaluasi dalam sebuah kebijakan publik.

2.4.6 Evaluasi dalam Kebijakan Publik

Sejumlah ahli mengaitkan antara evaluasi dengan kebijakan publik. Rossi dan Freeman dalam (Wirawan, 2012) menyatakan evaluasi berkaitan dengan implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Masih dikutip oleh (Wirawan, 2012), dilengkapi oleh Vendung bahwa intervensi ini meliputi program-program substansif dan berorientasi pada proses. Evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan alat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, guna menentukan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan ke depannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu evaluatif. Penelitian evaluatif diarahkan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan kelayakan suatu program (Wirawan, 2012). Menurut Sukmadinata dalam (Dharma, 2012) penelitian evaluatif dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong pengembangan lebih lanjut, serta membantu para pimpinan untuk menentukan kebijakan. Jadi yang dimaksud dengan penelitian evaluatif pada penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tentang kebijakan / *policy research*, dalam hal ini berfokus pada proses implementasi dengan mempertanyakan bagaimana suatu kebijakan diterapkan (Nugroho, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berlandaskan positivisme, dengan memenuhi kaidah ilmiah yang objektif, terukur, rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2020). Kemudian menggunakan metode penelitian survei deskriptif. Metode survei deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menanyakan pendapat, karakteristik suatu objek, gejala, keadaan, atau fenomena tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan metode survei deskriptif. Dianggap tepat karena dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari suatu kebijakan yang sedang berjalan.

3.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peneliti memberikan definisi operasional pada beberapa variabel dan aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan peneliti guna memperjelas konsep menjadi dapat diukur dan dioperasionalkan. Beberapa istilah yang ada antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas diukur berdasarkan skor total yang diperoleh dari responden atas pernyataan terkait kebermanfaatan bantuan dan kepuasan terhadap bantuan.

2. Efisiensi

Efisiensi diukur berdasarkan skor total yang diperoleh dari responden atas pernyataan terkait penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.

3. Kecukupan

Kecukupan diukur berdasarkan skor total yang diperoleh dari responden atas pernyataan terkait pemenuhan kebutuhan KPM dan kecukupan jumlah bantuan.

4. Kesetaraan

Kesetaraan diukur berdasarkan skor total yang diperoleh dari responden atas pernyataan terkait pemerataan jumlah dan pemerataan pelayanan petugas.

5. Responsivitas

Responsivitas diukur berdasarkan skor total yang diperoleh dari responden atas pernyataan terkait pengetahuan KPM terhadap tahapan program dan proses pengaduan.

6. Ketepatan

Ketepatan diukur berdasarkan skor total yang diperoleh dari responden atas pernyataan terkait tepat sasaran, tepat waktu, dan kesesuaian harapan KPM.

3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Berikut merupakan populasi dan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan cara menentukannya:

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2020) populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan wilayah generalisasi. Sedangkan elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) Kota Cimahi tahun 2024. Sehingga penghitungan populasi sebagai berikut:

Jumlah kelurahan di Kota Cimahi = 15 kelurahan

Jumlah KPM Rastrada per kelurahan = 150 orang

Populasi = Jumlah Kelurahan x Jumlah KPM

Populasi = 15 kelurahan x 150 orang

Populasi = 2.250 KPM

Jadi, total populasi yaitu sebanyak 2.250 Keluarga Penerima Manfaat Rastrada.

3.3.2 Teknik Penarikan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Nurdin et al.,

2018). Lebih spesifik lagi, penelitian ini menggunakan *area random sampling*. Menurut Sugiyono (2020) teknik ini digunakan apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti penduduk suatu kota dan penerima manfaat bantuan Rastrada di Kota Cimahi.

Penghitungan sampel menurut Slovin dalam (Rohman et al., 2023) yaitu:

$N =$ total populasi 2.250

$e =$ margin of error 10%

$n =$ jumlah sampel

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

$$n = \frac{2.250}{1+2.250(0,1^2)}$$

$$n = \frac{2.250}{1+22,5}$$

$n = 95,74$ / dibulatkan menjadi 96 KPM.

Melalui *area random sampling*, ditentukan 3 kelurahan yang berada di kecamatan berbeda. Peneliti telah melakukan pengacakan untuk menentukan 3 kelurahan sebagai sampel yang diteliti. Kemudian dikarenakan total KPM setiap kecamatan berbeda, maka untuk menentukan proporsional sampelnya peneliti melakukan perhitungan sebagai berikut:

$$96 = \frac{x}{100} \times 2.250$$

$$x = 4,26 \%$$

1. Kecamatan Cimahi Tengah = Kelurahan Cigugur Tengah

$$4,26\% \times 900 \text{ KPM} = 38 \text{ KPM}$$

2. Kecamatan Cimahi Selatan = Kelurahan Melong

$$4,26\% \times 750 \text{ KPM} = 32 \text{ KPM}$$

3. Kecamatan Cimahi Utara = Kelurahan Cibabat

$$4,26\% \times 600 \text{ KPM} = 26 \text{ KPM}$$

Namun demikian, peneliti mengambil 100 responden dengan pertimbangan:

1) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya data yang tidak lengkap atau tidak valid, 2) untuk meningkatkan akurasi hasil analisis data. Penggunaan *area random sampling* dengan memilih masing-masing satu kelurahan di tiga kecamatan dalam penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan karakteristik KPM antar area yang bersifat homogen. Sehingga sampel yang diambil dari tiga kelurahan secara proposional ini sudah representatif.

Penelitian ini dilengkapi dengan data kualitatif sebagai pendukung. Data kualitatif diambil dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang diteliti kepada beberapa informan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Dinas Sosial sebagai pelaksana utama, Pekerja Sosial dan staff Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai petugas lapangan, dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Penentuan sumber data ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan tertentu (Agus & Ratih, 2011).

3.4 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang menjadi topik penelitian. Alat ukur adalah alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner terstruktur, dengan jawaban tertutup

dan terbuka. Responden memberikan jawaban atas pernyataan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan, namun juga diberi ruang untuk memberikan pendapat atau penjelasan lebih lanjut. Kuesioner penelitian ini menggunakan *rating scale*, karena tidak hanya mengukur sikap, tetapi bisa juga mengukur persepsi dan penilaian berdasarkan pengalaman seseorang terhadap suatu objek atau fenomena tertentu (Agus & Ratih, 2011).

Skala yang digunakan:

- 4 = Sangat Sesuai / Selalu
- 3 = Sesuai / Sering
- 2 = Tidak Sesuai / Jarang
- 1 = Sangat Tidak Sesuai / Tidak Pernah

Di bawah ini merupakan kisi-kisi guna penyusunan kuesioner:

Tabel 3. 1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Item
Evaluasi Kebijakan	Efektivitas	Kebermanfaatan	Kesejahteraan keluarga	4,5,6
			Pengurangan beban pengeluaran	2
			Pemenuhan kebutuhan pangan	1,3
		Kepuasan	Jumlah bantuan	32
			Kualitas beras	33
			Mekanisme distribusi	34
			Fasilitas	16
	Efisiensi	Waktu	Cepat dan tepat waktu	13,14
		Tenaga	Lokasi terjangkau	15
			Kemudahan proses	17,24
		Biaya	Beban finansial	18
			Biaya administrasi	19
	Kecukupan	Pemenuhan Kebutuhan	Cukup untuk kebutuhan	21,35
		Kecukupan Jumlah	Kesesuaian jumlah	20,22

	Kesetaraan	Pemerataan Jumlah	Kesamaan jumlah bantuan	23
		Pemerataan Pelayanan	Perlakuan petugas	27,28
			Urutan pengambilan	25,26
	Responsivitas	Pengetahuan Tahapan	Pemahaman mekanisme	7
			Akses informasi	8
			Interaksi Petugas	9
		Proses Pengaduan	Sistem pengaduan	29
			Tindak lanjut keluhan	30
			Masalah dan solusi	31
	Ketepatan	Tepat Sasaran	Keakuratan penerima manfaat	10
			Kelayakan penerima manfaat	11
		Tepat Waktu	Ketepatan jadwal distribusi	12
		Kesesuaian Harapan	Harapan dan testimoni penerima manfaat	36,37,38

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur variabel yang dimaksud secara akurat. Dalam penelitian ini, validitas instrumen diuji melalui tiga cara:

1. Validitas Isi

Validitas isi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Digunakan untuk membuktikan bahwa alat ukur yang digunakan tepat dan dapat mengukur data yang dibutuhkan. Dalam hal ini instrumen dibuat berdasarkan bimbingan dosen serta dilakukan pengecekan oleh enumerator.

2. Validitas Konstruk

Validitas konstruk digunakan untuk mengetahui sejauh mana skor hasil pengukuran dapat merefleksikan konsep atau teori yang relevan. Dalam hal ini sebelum turun ke lapangan, instrumen telah disesuaikan kisi-kisi teori dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.

3. Validitas Statistik

Validitas statistik dilakukan dengan uji *Pearson Product Moment* menggunakan perangkat lunak SPSS. Uji validitas ini dilakukan terhadap kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dari KPM Rastrada. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi (r hitung) untuk setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel pada tingkat signifikansi 1% atau 5%.

df : *Degree of freedom* (derajat kebebasan)

N : total responden

$$df = (N-2) = 100 - 2 = 98$$

$$R \text{ tabel} = 0,256 (\alpha = 0,01)$$

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid, karena hasil r hitung masing-masing item dalam rentang antara 0,311 sampai 0,722 lebih besar dari R tabel (0,256).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah koefisien *Cronbach's Alpha*, yang mengukur konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan.

Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Pengujian ini juga dilakukan dengan perangkat lunak SPSS. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan masuk kategori reliabel dengan perhitungan 0,903.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	36

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen.

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara *interviewer* (peneliti dan enumerator) dengan *interviewee*. Teknik ini memungkinkan pertukaran informasi yang detail untuk mendapatkan pandangan, perspektif, atau data numerik, tergantung pada tujuan wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk dua tujuan. Pertama, wawancara bertujuan memperoleh data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, dengan mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar dan tersebar. Enumerator melakukan wawancara terstruktur dengan memberikan seperangkat pernyataan berdasarkan instrumen kepada responden. Selain itu enumerator bertugas untuk membantu memahami pernyataan, sehingga

mengurangi potensi kesalahan pengisian dan memastikan kelengkapan data yang dikumpulkan langsung dari penerima manfaat yang menjadi sampel penelitian. Kedua, wawancara dilakukan secara tatap muka langsung oleh peneliti dengan pejabat dan pelaksana kebijakan Rastrada. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai implementasi Rastrada, termasuk pandangan, tantangan yang dihadapi, dan perspektif lain yang relevan dengan penelitian.

3.6.2 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai bentuk catatan atau arsip tertulis, visual, maupun elektronik yang berisi informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, rekaman, atau karya monumental yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Rastrada. Dokumen yang dianalisis antara lain meliputi berkas kerja sama dengan pihak ketiga, Surat Keputusan Wali Kota, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022, berita acara, serta dokumentasi visual yang merekam proses penyaluran bantuan. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh informasi pendukung yang bersifat resmi dan objektif terkait implementasi kebijakan.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil survei dan wawancara. Analisis data dilakukan saat dan setelah selesai pengumpulan data, diolah sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian (Agus & Ratih, 2011). Teknik analisis data yang sering digunakan untuk

metode penelitian survei deskriptif yaitu analisis data statistik (*statistical data analysis*), sebagai metode matematis untuk mengumpulkan, mengelola, meringkaskan, dan menganalisis data (Morrison, 2017). Menurut Bungin (2010) tahapan dari analisis data kuantitatif yaitu sebagai berikut:

3.7.1 Peyuntingan Data/*Editing*

Kegiatan yang dilakukan saat dan setelah menghimpun data di lapangan. Tujuan dari tahapan ini yaitu meminimalisir adanya data yang terlewat, tumpang tindih, berlebihan, maupun terlupakan. Proses *editing* dapat berupa kegiatan memeriksa kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, konsistensi, dan relevansi. Peneliti melakukan uji coba instrumen kepada 30 orang memiliki kemiripan karakteristik dengan responden, kemudian menyunting beberapa pernyataan yang sulit dipahami dan tidak valid sebelum kemudian final untuk turun lapangan.

3.7.2 Pengkodean Data/*Coding Data*

Setelah tahapan *editing*, dilakukan pengkodean atau *coding*. Tahap ini bertujuan untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori tertentu yang memudahkan dalam pengolahan data. Dalam hal ini jawaban menggunakan rentang satu sampai empat, yang mana setiap kategori angka memiliki makna tersendiri.

3.7.3 Memasukkan Data/*Entry Data*

Data responden dalam bentuk kode dimasukkan ke dalam program *software* komputer yaitu SPSS dan Excel. Dalam proses ini juga dituntut ketelitian peneliti dalam memasukkan data, apabila ada kesalahan maka akan menjadi bias.

3.7.4 Pembersihan Data/ *Cleaning*

Apabila semua data dari sumber data atau responden selesai dimasukkan, perlu diperiksa kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya, agar dapat dilakukan pembetulan atau koreksi. Pengambilan data dibantu oleh enumerator, setelah data diolah dan dimasukkan ke program komputer, kemudian didapati data yang mencurigakan maka peneliti melakukan konfirmasi kepada enumerator.

3.7.5 Tabulasi/ Pembeberan

Tahap terakhir adalah tabulasi yaitu memasukkan pada tabel-tabel tertentu dan kemudian menghitungnya. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan rumus *rating scale* menurut (Sugiyono, 2020), maka untuk menentukan tingkat masing-masing aspek Evaluasi Program Beras Sejahtera Daerah Bagi Keluarga Miskin Kota Cimahi dirumuskan sebagai berikut:

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
x jumlah responden

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
x jumlah responden

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$

Garis kuantinum =

Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
------------	-------------	--------------	-------------

3.8 Langkah dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama delapan minggu pada bulan Januari – Juni 2025 dengan lokasi penelitian di Kota Cimahi. Jadwal dan langkah penelitian yang telah disusun secara sistematis, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan/Awal
 - a) Bimbingan penulisan proposal pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Januari 2025.
 - b) Pembuatan proposal dan pendaftaran ujian pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Januari 2025.
 - c) Ujian proposal tesis minggu pertama bulan Februari 2025.
 - d) Mengurus perizinan penelitian pada minggu pertama bulan Februari 2025.
 - e) Penyusunan instrumen penelitian dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Februari 2025.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a) Pengumpulan data pada minggu ketiga bulan Februari sampai minggu keempat bulan April 2025.
 - b) Seminar integratif pada minggu ketiga bulan Mei 2025.
3. Tahap Akhir
 - a) Penyusunan jurnal ilmiah minggu pertama sampai minggu keempat bulan Mei 2025.
 - b) Analisis data dan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Februari sampai minggu keempat bulan Mei 2025.
 - c) Ujian sidang tesis pada bulan Juni 2025.

Tabel 3. 2: Tabel Jadwal Penelitian Tesis

No	Kegiatan	Bulan (2025)					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Bimbingan Proposal						
2	Pembuatan Proposal dan Pendaftaran Ujian						
3	Ujian Proposal Tesis						
4	Perizinan						
5	Penyusunan Instrumen						
6	Pengumpulan Data						
7	Seminar Integratif						
8	Penyusunan Jurnal Ilmiah						
9	Analisis Data dan Penyusunan Laporan						
10	Ujian Sidang Tesis						

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Kebijakan Rastrada dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Kebijakan Rastrada

Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) merupakan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Cimahi yang dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2019, dengan regulasi dasar yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022. Rastrada hadir sebagai pelengkap program bantuan sosial nasional dengan sasaran warga miskin yang belum terjangkau bantuan lain. Melalui program ini, masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial, baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS menerima bantuan berupa 10 kilogram beras kualitas premium per bulan. Penyalurannya dilakukan setiap tiga bulan dan sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

Mekanisme pelaksanaan Rastrada diawali dengan proses pengajuan dari RT/RW, lalu dilakukan verifikasi calon penerima manfaat oleh Pekerja Sosial dan staff Puskesmas di kelurahan. Setelah itu Dinas Sosial mengajukan daftar penerima untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota, pengadaan beras dilakukan oleh pihak ketiga. Distribusi beras dilaksanakan di kelurahan sebagai titik serah, dengan melibatkan Pekerja Sosial, Puskesmas, dan relawan setempat untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat. Setiap penerima wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumentasi.

4.1.2 Lokasi Penelitian

4.1.2.1 Sejarah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anter – Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (Rumah Sakit Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan. Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi empat kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif, diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan kota administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi. Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisik, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 01 tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

4.1.2.2 Letak Geografis

Kota Cimahi terletak di antara 107°30'30" hingga 107°34'30" Bujur Timur dan 6°50'00" hingga 6°56'00" Lintang Selatan. Secara administratif, Kota Cimahi terbagi menjadi tiga kecamatan yang mencakup 15 kelurahan, dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 312 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 1.728. Luas wilayah Kota Cimahi sebesar 40,2 km² dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Kulon Kota Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Secara topografis, Kota Cimahi terletak di sebuah lembah cekungan yang melandai ke arah selatan. Bagian utara kota, khususnya di Kelurahan Cipageran (Kecamatan Cimahi Utara), memiliki ketinggian sekitar ±1.040 meter mdpl dan berada di lereng Gunung Burangrang serta Gunung Tangkuban Perahu. Sementara itu, bagian selatan kota, khususnya di Kelurahan Melong (Kecamatan Cimahi Selatan), memiliki ketinggian sekitar ±685 meter mdpl dan mengarah ke kawasan Sungai Citarum.

4.1.2.3 Karakteristik Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk di Kota Cimahi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 581.994 jiwa. Di bawah ini akan dijabarkan mengenai karakteristik demografi di Kota Cimahi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan angka pengangguran. Jumlah penduduk di Kota Cimahi lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1: Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	%
1	Laki-Laki	292.434	50,25
2	Perempuan	289.560	49,75
Jumlah		581.994	100,00

Sumber : Open Data Cimahi Kota Tahun 2024

Selanjutnya diketahui pula jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dijabarkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2: Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)			%
		L	P	Total	
1	Tidak tamat sekolah	59.716	56.384	116.100	19,94
2	Belum tamat SD	26.924	24.935	51.859	8,9
3	Tamat SD	30.442	37.028	67.470	12
4	SLTP/ sederajat	42.906	46.413	89.319	15,2
5	SLTA/ sederajat	95.757	85.701	181.458	31,1
6	Diploma I/II	2.335	3.418	5.753	0,98
7	Sarjana Muda (D3)	8.911	10.499	19.410	3,28
8	Diploma IV/ Strata I	22.283	22.941	45.224	7,68
9	Strata II	2.794	2.055	4.849	0,83
10	Strata III	366	186	552	0,09
Jumlah		292.434	289.560	581.994	100,00

Sumber Data: Open Data Cimahi Kota Tahun 2024

Selanjutnya lebih spesifik terdapat jumlah penduduk miskin beserta persentasenya di Kota Cimahi, dijabarkan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3: Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cimahi

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	%
1	2018	607.811	29.900	4,91
2	2019	614.304	26.900	4,37
3	2020	620.393	31.600	5,09
4	2021	562.160	32.500	5,78
5	2022	562.160	31.200	5,55
6	2023	575.519	28.260	4,91
7	2024	579.906	27.000	4,65

Sumber Data: BPS dan Open Data Cimahi Kota Tahun 2024

Berdasarkan data kemiskinan Tabel 4.3 di atas, pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 28ribu jiwa, terdapat jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dijabarkan dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4: Jumlah Pengangguran Kota Cimahi Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)		%
		Angkatan Kerja	Tidak Bekerja	
1	Tidak tamat sekolah	7.079	6.904	97,52
2	Belum tamat SD	2.330	1.457	62,53
3	Tamat SD	21.223	2.363	11,13
4	SLTP/ sederajat	33.051	3.800	11,49
5	SLTA/ sederajat	93.167	8.749	9,39
6	Diploma I/II	3.402	137	4,02
7	Sarjana Muda (D3)	13.040	421	3,22
8	Diploma IV/ Strata I	32.964	985	2,98
9	Strata II	3.827	30	0,78
10	Strata III	441	4	0,90
Jumlah		210.524	24.850	11,80

Sumber Data: Open Data Cimahi Kota Tahun 2024

4.1.2.4 Bantuan Sosial di Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan prasejahtera. Berikut ini adalah beberapa program bantuan sosial yang tersedia di Kota Cimahi:

1. Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)

Rastrada adalah program bantuan beras yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sejak tahun 2019. Program ini ditujukan untuk keluarga prasejahtera yang belum terakomodasi dalam skema bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti PKH atau BPNT. Rastrada hadir sebagai bentuk kepedulian daerah dalam menjamin ketahanan pangan bagi warganya, baik yang tercantum dalam DTKS maupun non-DTKS. Pada tahun 2024, sebanyak 2.250 keluarga penerima manfaat mendapat bantuan berupa 10 kilogram beras premium setiap bulan, dengan pendanaan sepenuhnya berasal dari APBD.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST) Daerah

BST Daerah merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 18.269 keluarga menerima bantuan ini. Masing-masing keluarga mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000. Bantuan ini menyasar berbagai kalangan, termasuk keluarga miskin, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelaku seni, juru parkir, sopir angkutan kota, penyandang disabilitas, serta korban pemutusan hubungan kerja.

3. Bantuan dari Balai "Budhi Dharma"

Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) "Budhi Dharma" yang berada di bawah Kementerian Sosial RI juga menyalurkan bantuan sosial di Kota Cimahi. Salah satu bentuk bantuannya adalah pemberian paket sembako kepada masyarakat miskin dan lanjut usia terlantar sebagai dukungan terhadap kebutuhan dasar mereka. Bantuan ini penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan tetap mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.

4. Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Sentra Abiyoso Cimahi

Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Sentra Abiyoso Cimahi merupakan program Kementerian Sosial RI yang menysasar penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak-anak rentan, serta kelompok rentan sosial lainnya. Bantuan ini tidak hanya berupa sembako atau uang tunai, tetapi juga layanan kesehatan, terapi, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu disabilitas seperti kursi roda atau alat dengar, serta dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Program ini mengusung prinsip rehabilitasi sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan, untuk memperkuat kapasitas hidup mandiri para penerimanya.

5. Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemerintah Kota Cimahi juga menjalankan program pendampingan UMKM melalui dua jalur utama. Pertama, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian yang memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, fasilitasi legalitas usaha, serta akses terhadap permodalan. Program ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin

mengembangkan usaha mikro. Kedua, melalui Dinas Sosial, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Pendampingan ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi KPM melalui pelatihan usaha, bantuan alat produksi, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan, sebagai bagian dari strategi graduasi PKH agar mereka dapat keluar dari status penerima bantuan dan menjadi pelaku usaha yang mandiri secara ekonomi.

6. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan program nasional yang juga dijalankan di Kota Cimahi. Program ini memberikan bantuan sosial pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk non-tunai melalui mekanisme uang elektronik. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) yang bekerja sama dengan bank penyalur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran bantuan, sekaligus memberdayakan usaha lokal penyedia pangan.

7. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga dijalankan di Kota Cimahi. Program ini menyasar keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. PKH diberikan dalam bentuk bantuan tunai berkala, yang besarnya disesuaikan dengan jumlah dan kondisi anggota keluarga. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan jangka panjang melalui intervensi berbasis keluarga.

4.2 Hasil Penelitian

Evaluasi dalam analisis kebijakan merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan. Variabel dalam evaluasi kebijakan ini terdiri dari enam aspek yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), kesetaraan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Data kuesioner untuk variabel evaluasi kebijakan diukur menggunakan 36 pertanyaan kepada 100 responden, sebagai berikut:

4.2.1 Efektivitas

Efektivitas dalam hal ini mengacu pada sejauh mana suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari kebijakan. Peneliti menganalisis aspek efektivitas yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu kebermanfaatan bantuan dan kepuasan terhadap bantuan. Hasil aspek ini didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh setiap responden berdasarkan sepuluh item pernyataan. Hasil jawaban responden akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 5: Kesesuaian Rastrada dengan Pemenuhan Kebutuhan Pangan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	4	4
3	Sesuai	55	55
4	Sangat Sesuai	41	41
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui 55 persen responden menyatakan sesuai dan 41 persen sangat sesuai bahwa Rastrada membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ini berarti sejalan dengan manfaat utama program Rastrada yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 yaitu agar terpenuhinya kebutuhan dasar pangan pokok bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban sesuai dan sangat sesuai. Pertama, responden mengungkapkan bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kedua, beberapa responden tinggal seorang diri dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketiga, menurut responden, beras merupakan kebutuhan utama karena bisa dimakan dengan lauk apa saja.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, “Sejauh pengamatan kami, bantuan Rastrada ini sangat membantu, terutama bagi KPM yang memang memiliki keterbatasan ekonomi. Ini jelas mengurangi beban mereka untuk membeli kebutuhan pokok beras” (AF, hasil wawancara 14/02/2025). Dilengkapi oleh pernyataan Pekerja Sosial “Membantu sekali, terutama untuk KPM yang tidak punya penghasilan tetap” (FJ, hasil wawancara 18/02/2025).

Tabel 4. 6: Kesesuaian Rastrada terhadap Pengurangan Beban Rumah Tangga

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	7	7
3	Sesuai	53	53
4	Sangat Sesuai	40	40
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui 53 persen responden menyatakan sesuai dan 40 persen sangat sesuai bahwa Rastrada mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Ini juga sejalan dengan manfaat kedua program Rastrada yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah atau masyarakat yang rawan sosial. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban sesuai dan sangat sesuai. Pertama, keterbatasan pendapatan yang kurang mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kedua, membantu mengurangi frekuensi belanja beras di pasar atau warung kelontong. Ketiga, membantu menghemat pengeluaran dan memberikan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, "Sangat berpengaruh positif. Dana yang tadinya untuk beli beras bisa dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak" (LT, hasil wawancara 24/02/2025). Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial juga menambahkan bahwa, "Mayoritas penerima Rastrada itu memang masyarakat yang tidak bekerja, seperti lanjut usia dan PRSE. Kalaupun bekerja itu penghasilan minim, seperti tukang becak, asisten rumah tangga, tukang pijat" (NA, hasil wawancara 24/02/2025).

Tabel 4. 7: Kesesuaian Pengalihan Uang untuk Kebutuhan Pangan Lain

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	2	2
2	Kurang Sesuai	12	12
3	Sesuai	62	62
4	Sangat Sesuai	24	24
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui 62 persen responden menyatakan sesuai dan 24 persen sangat sesuai terkait pernyataan bahwa setelah mendapatkan Rastrada, uang untuk membeli beras dapat dialihkan untuk membeli kebutuhan pangan lainnya seperti sayur dan lauk pauk. Namun sebaliknya, terdapat 12 persen responden merasa kurang sesuai dan dua persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Mereka berpendapat bahwa bagi orang kecil yang terpenting yaitu memiliki beras sebagai makanan utama. Lauk sederhana seperti tahu, tempe, bahkan cilok dan gorengan tetap enak dan mengenyangkan.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Salah satu ketua RT menyampaikan bahwa, “Bagi mereka yang terpenting ada nasi, makan apapun pakai nasi. Beli cilok, gorengan, atau mie pakai nasi, yang penting kenyang aja. Bahkan saya pernah mengetahui, ada warga yang hanya makan nasi dengan garam” (MA, hasil wawancara 16/02/2025). Dilengkapi oleh pernyataan dari Pekerja Sosial, “Bisa makan saja sudah *Alhamdulillah*, KPM tidak memikirkan variasi makanan atau gizi yang seimbang” (SN, hasil wawancara 18/02/2025).

Tabel 4. 8: Kesesuaian Rastrada dengan Pemenuhan Pendidikan dan Kesehatan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	3	3
2	Kurang Sesuai	35	35
3	Sesuai	46	46
4	Sangat Sesuai	16	16
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui 46 persen responden menyatakan sesuai dan 16 persen sangat sesuai terkait pernyataan bahwa dengan adanya Rastrada, membantu menyisihkan uang untuk keperluan lain seperti sekolah anak atau berobat. Namun sebaliknya, terdapat 35 persen responden berpendapat kurang sesuai dan tiga persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Pertama, di dalam KK tersebut tidak ada anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan atau berusia sekolah. Kedua, keluarga tersebut telah mendapatkan bantuan BPJS kesehatan dari pemerintah. Ketiga, ketika sakit memilih untuk membeli obat di warung daripada harus berobat ke Rumah Sakit.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut salah satu petugas Pusat Kesejahteraan Sosial, “Sebagian masyarakat memang kurang memperhatikan tingkat pendidikan bagi anaknya. Karena mohon maaf biasanya orang tua juga berpendidikan rendah, misalnya hanya lulusan Sekolah Dasar atau bahkan tidak lulus” (IS, hasil wawancara 18/02/2025).

Tabel 4. 9: Frekuensi KPM Menabung Sejak Menerima Bantuan Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	45	45
2	Jarang	38	38
3	Sering	11	11
4	Selalu	6	6
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui 38 persen responden menyatakan jarang dan 45 persen tidak pernah menabung sejak mendapatkan bantuan Rastrada. Hanya terdapat 11 persen responden memilih sering dan enam persen yang selalu

menabung. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban jarang dan tidak pernah. Pertama, pemasukan yang kurang mencukupi atau tidak ada sisa untuk ditabung. Kedua, mengutamakan untuk kebutuhan dasar. Ketiga, tidak terbiasa menabung. Sedangkan responden yang memilih sering dan selalu, ketika ada uang sisa hasil bekerja dan sebagian sudah terbiasa menabung.

Tabel 4. 10: Kestabilan Ekonomi KPM Setelah Menerima Bantuan Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	19	19
2	Kurang Sesuai	36	36
3	Sesuai	36	36
4	Sangat Sesuai	9	9
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui 36 persen responden menyatakan kurang sesuai dan 19 persen tidak sesuai terkait pernyataan kondisi ekonomi lebih stabil setelah mendapatkan Rastrada. Kemudian 36 persen responden yang menyatakan sesuai dan sembilan persen sangat sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai yaitu bantuan Rastrada hanya untuk kebutuhan pokok beras saja. Sehingga menurut mereka tidak mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan data dokumentasi dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti beserta para enumerator, mayoritas KPM Rastrada memang berada dalam kondisi ekonomi pra sejahtera, seperti mengalami sakit berat, tidak

bekerja, tidak memiliki penghasilan, bekerja serabutan, tempat tinggal kurang layak, tempat tinggal tidak permanen atau sewa kontrakan.

Tabel 4. 11: Kondisi Fasilitas Pada Lokasi Penyaluran

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Memadai	0	0
2	Kurang Memadai	9	9
3	Memadai	48	48
4	Sangat Memadai	43	43
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui 48 persen responden menyatakan bahwa fasilitas pada lokasi penyaluran Rastrada nyaman dan memadai serta 43 persen menyatakan sangat memadai. Kemudian sembilan persen responden yang menyatakan kurang memadai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang memadai. Pertama, penyaluran sering dilakukan di siang hari, sedangkan terdapat lokasi penyaluran yang beratapkan logam sehingga memantulkan panas. Kedua, jumlah kursi yang disediakan oleh petugas tidak sesuai jumlah KPM, sehingga apabila terdapat antrean panjang di awal pelaksanaan distribusi tidak semuanya mendapatkan tempat duduk.

Tabel 4. 12: Kepuasan KPM terhadap Kuantitas Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Puas	4	4
2	Kurang Puas	15	15
3	Puas	55	55
4	Sangat Puas	26	26
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui 55 persen responden menyatakan puas dan 26 persen sangat puas terhadap kuantitas atau jumlah yang diberikan program Rastrada. Kemudian 15 persen responden yang menyatakan kurang puas

dan empat persen tidak puas. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang memadai. Pertama, satu karung beras Rastrada tidak mencukupi kebutuhan pangan dalam satu bulan. Kedua, jumlah anggota keluarga KPM lebih dari empat orang.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, “Penentuan jumlah beras Rastrada sepuluh kilogram karena dengan asumsi satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak. Sehingga juga mendukung program Keluarga Berencana, dua anak cukup” (AF, hasil wawancara 14/02/2025).

Tabel 4. 13: Kepuasan KPM terhadap Kualitas Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Puas	0	0
2	Kurang Puas	3	3
3	Puas	56	56
4	Sangat Puas	41	41
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui 56 persen responden menyatakan puas dan 41 persen sangat puas terhadap kualitas beras Rastrada dan hanya tiga persen yang merasa kurang puas. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban puas dan sangat puas yaitu beras Rastrada berwarna putih bersih, bulir utuh, tidak berbau, dan tidak berketu.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, “Meskipun ini bantuan sosial namun kami memastikan beras yang diberikan berkualitas premium” (AF, hasil wawancara 14/02/2025). Dibuktikan oleh hasil observasi praktikum yang dilakukan oleh peneliti pada fase persiapan di akhir tahun

2024 yaitu dari pemesanan hingga *quality control* dilakukan langsung oleh pejabat Dinas Sosial ke gudang BULOG wilayah Cimahi. Diawali dengan penandatanganan berkas pemesanan dan perencanaan distribusi, kemudian beras dilakukan uji petik, pengecekan dan penimbangan, lalu dikemas dengan karung berlogo khusus Rastrada, hasilnya beras Rastrada benar-benar berkualitas premium.

Tabel 4. 14: Kepuasan KPM terhadap Proses dan Layanan Penyaluran Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Puas	0	0
2	Kurang Puas	3	3
3	Puas	72	72
4	Sangat Puas	25	25
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui 72 persen responden menyatakan puas dan 25 persen sangat puas terhadap proses dan layanan penyaluran Rastrada. Hanya tiga persen responden yang menyatakan kurang puas. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban puas dan sangat puas yaitu alur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Sedangkan yang memilih kurang puas, KPM merasa aturan terlalu kaku karena pengambilan tidak bisa diwakilkan.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, “Betul *teh*, pengambilannya tidak bisa diwakili. Karena pelaporan dan dokumentasinya langsung melalui aplikasi, *by name by address*” (LT, hasil wawancara 24/02/2025). Sedangkan menurut salah satu Kader, “Kalau saya sih menyampaikan ke warga tidak apa-apa diwakilkan, asal masih dalam satu KK. Kan kasihan *teh* kalau sedang bekerja atau sakit” (RS, hasil wawancara 20/02/2025).

Berdasarkan Tabel 4.5 sampai dengan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden beragam pada aspek efektivitas. Terdapat dua pernyataan yang bernilai negatif karena sebagian besar responden memilih jawaban “kurang sesuai” dan “tidak sesuai”. Item yang bernilai negatif yaitu terletak pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. Perbedaan pilihan jawaban responden menghasilkan perolehan skor yang beragam. Rekapitulasi skor yang diperoleh dari aspek efektivitas terlampir, kemudian dibuatlah perhitungan individu dan populasi untuk mengetahui tingkat efektivitas, sebagai berikut:

1. Perhitungan Individu

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
 = 4 x 10 item
 = 40

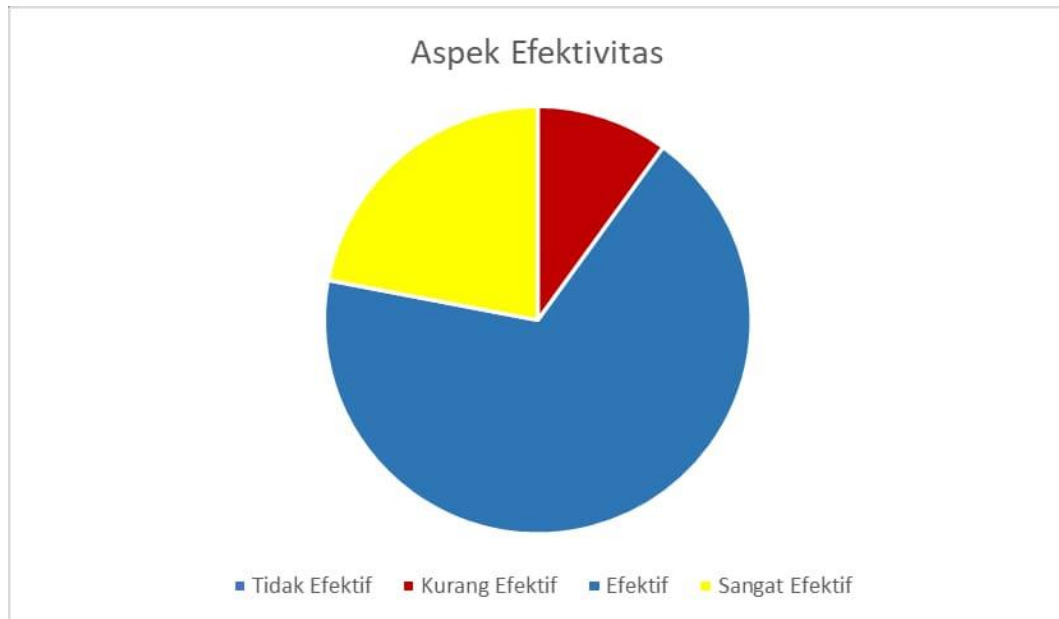
Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
 = 1 x 10 item
 = 10

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$
 = $\frac{40 - 10}{4}$
 = 7,5 dibulatkan menjadi 8

Tabel 4. 15: Kategori Jawaban Aspek Efektivitas

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Efektif	10 – 17	0	0
2	Kurang Efektif	18 – 25	10	10
3	Efektif	26 – 33	74	74
4	Sangat Efektif	>33	16	16
JUMLAH			100	100

Untuk melihat proporsional pada Tabel 4.15 di atas, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut:



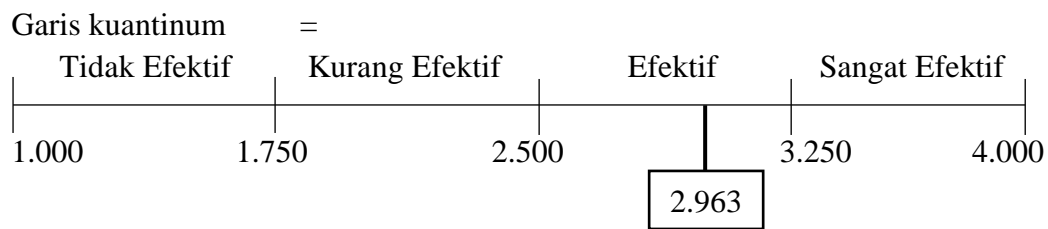
Gambar 4. 1: Diagram Aspek Efektivitas

2. Perhitungan Populasi

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 4 x 10 item x 100 orang
 = 4.000

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 1 x 10 item x 100 orang
 = 1.000

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$
 = $\frac{4.000 - 1.000}{4}$
 = 750



Merujuk pada Tabel 4.15 hasil rekapitulasi skor responden dan perhitungan populasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat efektivitas berada pada kategori **efektif**. Item pernyataan dengan total nilai paling tinggi yaitu Tabel 4.13. Item pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif, dengan total skor 338 mayoritas menjawab puas dan sangat puas. Pernyataan selanjutnya yaitu Tabel 4.5 dengan total skor 337. Item tersebut juga positif dengan jawaban mayoritas sesuai dan sangat sesuai. Sebaliknya, item pernyataan dengan skor terendah pada aspek efektivitas yaitu Tabel 4.9 dengan total skor 178. Pada item tersebut, mayoritas menjawab tidak pernah dan jarang. Hal ini dikarenakan KPM Rastrada lebih banyak yang berpenghasilan rendah dan tidak bekerja, sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari program Rastada telah tercapai.

4.2.2 Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Peneliti menganalisis aspek efisiensi yang di dalamnya memuat tiga indikator yaitu waktu, tenaga, dan biaya. Hasil aspek ini didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh setiap responden berdasarkan tujuh item pernyataan. Hasil jawaban responden akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 16: Frekuensi Ketepatan Waktu dalam Penyaluran

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	8	8
3	Sering	41	41
4	Selalu	51	51
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui 41 persen responden menyatakan penyaluran Rastrada dilaksanakan sering tepat waktu dan 51 persen selalu tepat waktu, dalam hal ini sesuai dengan jam yang diinformasikan kepada KPM. Hanya delapan persen yang merasa jarang tepat waktu. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban jarang karena KPM mengetahui beberapa kali penyaluran bantuan Rastrada mengalami keterlambatan, termasuk termin pertama tahun 2025.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, “Memang ada beberapa masyarakat yang suka terlambat mengambil, biasanya yang bekerja dan tidak bisa izin. Kadang satu kali termin penyaluran kami buka siang sampai sore itupun belum selesai masih lanjut dua hari berikutnya” (LT, hasil wawancara 24/02/2025). Kemudian pada saat peneliti melakukan observasi praktikum di bulan November 2024 silam, adanya keterlambatan truk pengangkut beras hingga satu jam lebih, sedangkan masyarakat sudah hadir dan berkumpul di kelurahan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh petugas Pusat Kesejahteraan Sosial, “Iya, termin terakhir memang terlambat. Biasanya jadwal truk sampai di lokasi itu dari pagi, namun saat itu jadwalnya tidak jelas” (NA, hasil wawancara 24/02/2025).

Tabel 4. 17: Frekuensi Kecepatan Proses Penyaluran

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	9	9
3	Sering	45	45
4	Selalu	46	46
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.17 hampir mirip dengan pernyataan sebelumnya yang juga terkait dengan waktu, dapat diketahui responden menyatakan 45 persen sering dan 46 persen selalu penyaluran Rastrada dilaksanakan cepat atau tidak membutuhkan waktu lama. Hanya sembilan persen yang merasa jarang selesai dengan cepat. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, penjelasan responden yang memilih jawaban sering dan selalu, bahwa penyaluran Rastrada setiap termin dilakukan sekitar 30 – 60 menit.

Hasil penelitian kuantitatif di atas bertentangan dengan data kualitatif yang diperoleh dari pernyataan para petugas. Salah satu Pekerja Sosial menjelaskan bahwa, “Untuk kami yang di lapangan, satu kali termin penyaluran Rastrada membutuhkan waktu yang lama yaitu lebih dari empat jam bahkan bisa berhari-hari” (SN, hasil wawancara 18/02/2025).

Tabel 4. 18: Jarak Lokasi dan Kemudahan Akses

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Sulit	0	0
2	Sulit	12	12
3	Mudah	57	57
4	Sangat Mudah	31	31
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui 57 persen responden menyatakan jarak lokasi dan akses dalam penyaluran Rastrada mudah dan 31 persen sangat mudah. Selebihnya terdapat 12 persen yang mengaku lokasi cukup jauh dan sulit

diakses. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban sulit. Pertama, kelurahan memiliki wilayah geografis yang luas. Kedua, tidak memiliki kendaraan bermotor, sehingga harus berjalan kaki untuk mencapai kelurahan.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Dilengkapi oleh hasil wawancara Pekerja Sosial dan ketua karang taruna bahwa, “Kelurahan Melong merupakan kelurahan yang memiliki total RW terbanyak di Kota Cimahi yaitu 36 RW” (FJ, hasil wawancara 18/02/2025). Hal tersebut membuat banyak KPM di Kelurahan Melong dan Kelurahan Cigugur Tengah yang lokasi rumahnya jauh dari kelurahan, aksesnya perlu menggunakan transportasi umum.

Tabel 4. 19: Kemudahan Proses Penyaluran

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Sulit	0	0
2	Sulit	1	1
3	Mudah	56	56
4	Sangat Mudah	43	43
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui 56 persen responden merasa proses penyaluran Rastrada mudah dan 43 persen sangat mudah. Hanya satu persen yang mengaku prosesnya sulit. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban sulit yaitu terlalu banyak berkas untuk ditanda tangani dan setiap termin penyaluran harus membawa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Tabel 4. 20: Kemudahan Membawa Tiga Karung Beras

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Sulit	7	7
2	Sulit	18	18
3	Agak Sulit	32	32
4	Tidak Sulit	43	43
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui hanya 43 persen responden saat membawa beras Rastrada tiga karung sekaligus tidak sulit. Selebihnya 32 persen responden mengaku membawanya agak sulit, 18 persen sulit, dan tujuh persen sangat sulit. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat empat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban sulit dan sangat sulit. Pertama, lanjut usia yang tinggal seorang diri. Kedua, sakit berat. Ketiga, jarak rumah ke kantor kelurahan yang jauh, sedangkan tidak memiliki kendaraan bermotor. Keempat, merasa terlalu berat untuk dibawa tiga karung sekaligus.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, “Ini menjadi salah satu tantangan. Terutama bagi lansia atau disabilitas. Kami mendorong partisipasi komunitas untuk membantu” (FJ, hasil wawancara 18/02/2025). Dilengkapi oleh Kader, “KPM Rastrada di kelurahan ini banyak yang sakit berat, lanjut usia terlantar, sehingga akan kesulitan membawa beras sendiri” (RS, hasil wawancara 20/02/2025). Diperkuat dengan hasil observasi praktikum, mayoritas KPM Rastrada memang masuk kategori lanjut usia.

Tabel 4. 21: Kesesuaian Rastrada terhadap Beban Finansial

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	7	7
2	Kurang Sesuai	22	22
3	Sesuai	24	24
4	Sangat Sesuai	47	47
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui 24 persen responden menyatakan untuk mendapatkan bantuan Rastrada sesuai dan 47 persen sangat sesuai tidak menimbulkan beban finansial tambahan. Kemudian 22 persen responden menyatakan kurang sesuai dan tujuh persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Pertama, tambahan beban finansial berupa biaya transportasi untuk membawa tiga karung beras seperti ojeg atau angkutan umum. Kedua, biaya fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan setiap termin penyaluran.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat praktikum, beberapa KPM yang rumahnya cukup jauh akan bersama-sama menyewa satu kendaraan angkutan umum untuk membawa pulang beras Rastrada. Selanjutnya dilengkapi dengan wawancara salah satu ketua RT, “Iya karena jarak wilayah RT kami ke kelurahan cukup jauh, jadi saya sering lihat warga yang masuk KPM *carter* angkot dari pasar Cimindi” (MA, hasil wawancara 16/02/2025).

Tabel 4. 22: Kesesuaian Rastrada terhadap Biaya Administrasi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	28	28
4	Sangat Sesuai	72	72
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui 28 persen responden menyatakan sesuai dan 72 persen sangat sesuai bahwa Rastrada tidak memerlukan biaya administrasi. Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Pejabat Dinas Sosial menyatakan bahwa, “Rastrada ini berupa bantuan beras yang diberikan secara gratis untuk masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial yang belum tersentuh bantuan sosial dari pusat” (AF, hasil wawancara 14/02/2025).

Berdasarkan Tabel 4.16 sampai dengan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden beragam pada aspek efisiensi. Namun, seluruh pernyataan yang bernilai positif karena sebagian besar responden memilih jawaban “sesuai” dan “sangat sesuai”. Perbedaan pilihan jawaban responden menghasilkan perolehan skor yang beragam. Rekapitulasi skor yang diperoleh dari aspek efisiensi terlampir, kemudian dibuatlah perhitungan individu dan populasi untuk mengetahui tingkat efisiensi, sebagai berikut:

1. Perhitungan Individu

$$\begin{aligned} \text{Nilai maksimal} &= \text{bobot kategori jawaban tertinggi} \times \text{jumlah item pernyataan} \\ &= 4 \times 7 \text{ item} \\ &= 28 \end{aligned}$$

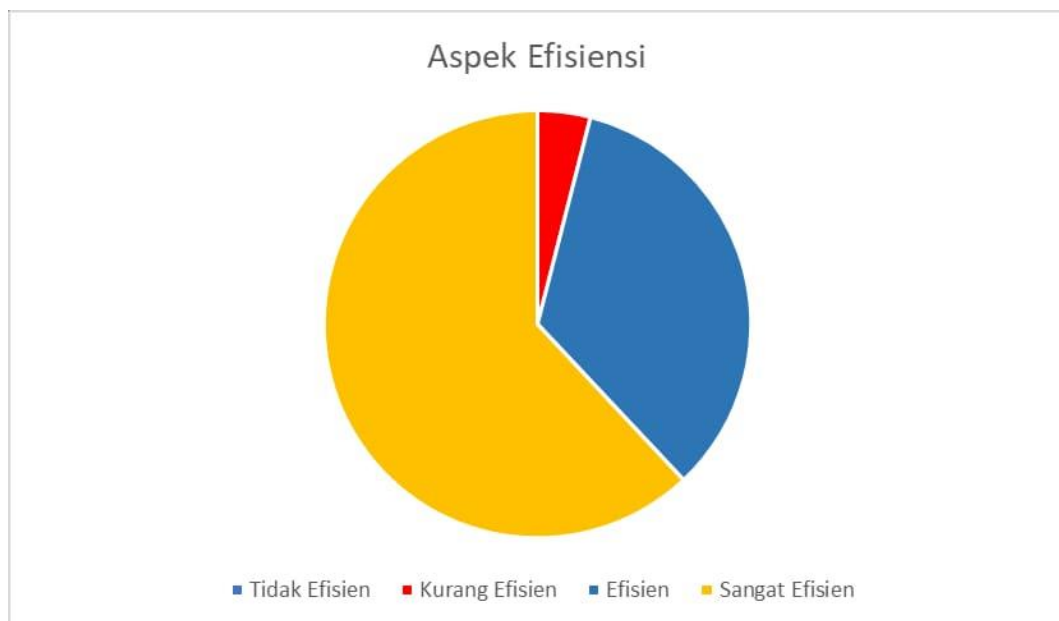
$$\begin{aligned} \text{Nilai minimal} &= \text{bobot kategori jawaban terendah} \times \text{jumlah item pernyataan} \\ &= 1 \times 7 \text{ item} \\ &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}} \\ &= \frac{28 - 7}{4} \\ &= 5,25 \text{ dibulatkan menjadi } 5 \end{aligned}$$

Tabel 4. 23: Kategori Jawaban Aspek Efisiensi

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Efisien	7 – 11	0	0
2	Kurang Efisien	12 – 16	3	3
3	Efisien	17 – 21	25	25
4	Sangat Efisien	>21	72	72
JUMLAH			100	100

Untuk melihat proporsional pada Tabel 4.23 di atas, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut:

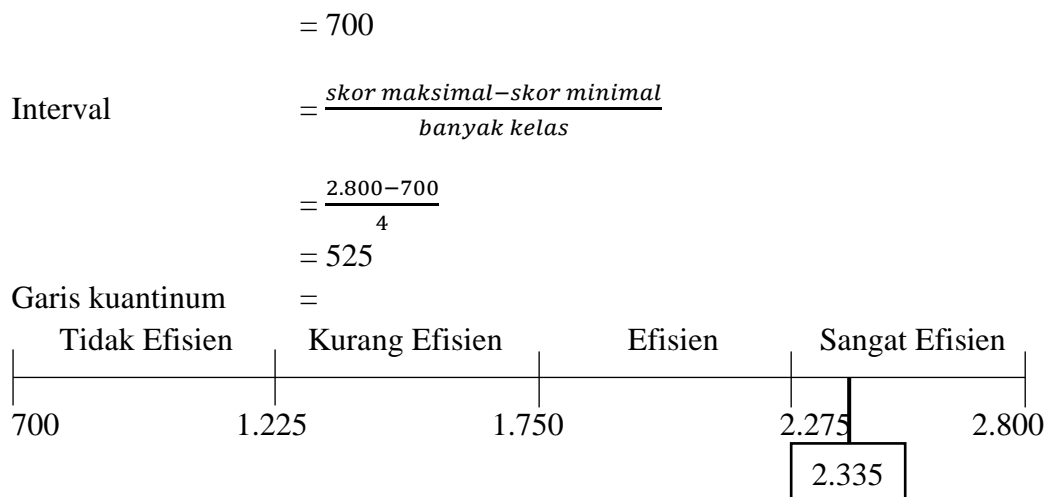


Gambar 4. 2: Diagram Aspek Efisiensi

2. Perhitungan Populasi

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 4 x 7 item x 100 orang
 = 2.800

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 1 x 7 item x 100 orang



Merujuk pada Tabel 4.23 rekapitulasi skor responden dan perhitungan populasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat efisiensi berada pada kategori **sangat efisien**. Item pernyataan dengan total skor paling tinggi yaitu pada Tabel 4.22. Item pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif, dengan total skor 372 mayoritas menjawab sesuai dan sangat sesuai. Sebaliknya, terdapat dua item pernyataan dengan skor sama dan terendah pada aspek efisiensi yaitu Tabel 4.20 dan Tabel 4.21 dengan total skor 311. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator yang belum maksimal yaitu biaya dan tenaga.

4.2.3 Kecukupan

Kecukupan menggambarkan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang melatar belakangi munculnya suatu masalah. Peneliti menganalisis aspek kecukupan yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu pemenuhan kebutuhan KPM dan kecukupan jumlah bantuan. Hasil aspek ini didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh setiap responden berdasarkan empat item pernyataan. Hasil jawaban responden akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 24: Kesesuaian Rastrada dengan Kebutuhan Rumah Tangga

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	2	2
2	Kurang Sesuai	32	32
3	Sesuai	50	50
4	Sangat Sesuai	16	16
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat diketahui 50 persen responden menyatakan Rastrada sesuai dan 16 persen sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Kemudian 32 persen yang merasa Rastrada masih kurang sesuai dan dua persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Pertama, KPM mengharapkan bantuan berupa uang tunai agar dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Kedua, Rastrada dinilai belum dapat mencukupi kebutuhan KPM.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Dijelaskan oleh pejabat Dinas Sosial alasan mengapa bantuan diberikan dalam bentuk beras, “Karena tujuan kami agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok yaitu pangan. Memang masyarakat itu kadang masih merasa kurang, tapi kalau diikuti diberikan uang malah dibelikan rokok, kita tidak bisa mengontrol” (AF, hasil wawancara 14/02/2025).

Tabel 4. 25: Kesesuaian Alternatif Lain bagi KPM dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	8	8
2	Kurang Sesuai	37	37
3	Sesuai	52	52
4	Sangat Sesuai	3	3
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.25 dapat diketahui 52 persen responden menyatakan sesuai dan tiga persen sangat sesuai bahwa memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian 37 persen yang merasa Rastrada masih kurang sesuai dan delapan persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Pertama, penerima manfaat tidak memiliki pekerjaan. Kedua, bekerja serabutan sehingga pendapatan tidak mencukupi untuk makan tiga kali sehari.

Tabel 4. 26: Kecukupan Satu Karung Beras untuk Satu Bulan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Cukup	7	7
2	Kurang Cukup	33	33
3	Cukup	46	46
4	Sangat Cukup	14	14
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat diketahui 46 persen responden menyatakan satu karung Rastrada cukup dan 14 persen sangat cukup untuk kebutuhan keluarga selama satu bulan. Kemudian 33 persen yang menyatakan kurang cukup dan tujuh persen tidak cukup. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, KPM yang memilih jawaban kurang cukup dan tidak cukup, menyatakan bahwa tiga karung beras hanya cukup untuk satu bulan. Selanjutnya peneliti menganalisis berdasarkan jumlah tanggungan keluarga responden bahwa yang menyatakan sangat cukup memiliki jumlah tanggungan satu sampai dua orang, cukup memiliki tanggungan tiga sampai empat orang, kurang cukup memiliki tanggungan empat sampai lima orang, sedangkan yang memilih tidak cukup memiliki tanggungan lebih dari lima orang.

Tabel 4. 27: Kesesuaian Rastrada dengan Beras Tambahan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	6	6
2	Kurang Sesuai	35	35
3	Sesuai	43	43
4	Sangat Sesuai	16	16
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.27 dapat diketahui 43 persen responden menyatakan sesuai dan 16 persen sangat sesuai bahwa tidak perlu membeli beras tambahan semenjak menerima Rastrada. Kemudian 35 persen yang menyatakan kurang sesuai dan enam persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, responden yang memilih jawaban kurang sesuai artinya jarang membeli beras, sedangkan yang tidak sesuai artinya sering memberi beras, dan yang memilih sesuai artinya hanya sesekali atau kadang-kadang beli beras tambahan.

Berdasarkan Tabel 4.24 sampai dengan Tabel 4.27 dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden beragam pada aspek kecukupan. Namun, seluruh pernyataan yang bernilai positif karena sebagian besar responden memilih jawaban “sesuai” dan “sangat sesuai”. Perbedaan pilihan jawaban responden menghasilkan perolehan skor yang beragam. Rekapitulasi skor yang diperoleh dari aspek kecukupan terlampir, kemudian dibuatlah perhitungan individu dan populasi untuk mengetahui tingkat kecukupan, sebagai berikut:

1. Perhitungan Individu

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
 = 4 x 4 item
 = 16

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan

$$= 1 \times 4 \text{ item}$$

$$= 4$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$$

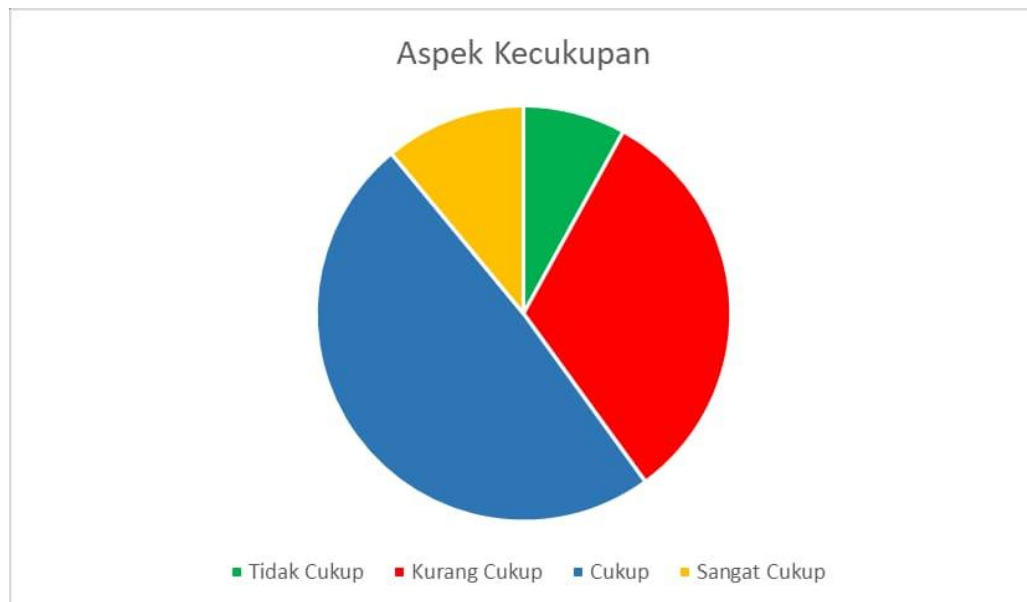
$$= \frac{16-4}{4}$$

$$= 3$$

Tabel 4. 28: Kategori Jawaban Aspek Kecukupan

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Cukup	4 – 6	4	4
2	Kurang Cukup	7 – 9	28	28
3	Cukup	10 - 12	50	50
4	Sangat Cukup	>12	18	18
JUMLAH			100	100

Untuk melihat proporsional pada Tabel 4.28 di atas, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut:



Gambar 4. 3: Diagram Aspek Kecukupan

2. Perhitungan Populasi

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
x jumlah responden

$$= 4 \times 4 \text{ item} \times 100 \text{ orang}$$

$$= 1.600$$

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
x jumlah responden

$$= 1 \times 4 \text{ item} \times 100 \text{ orang}$$

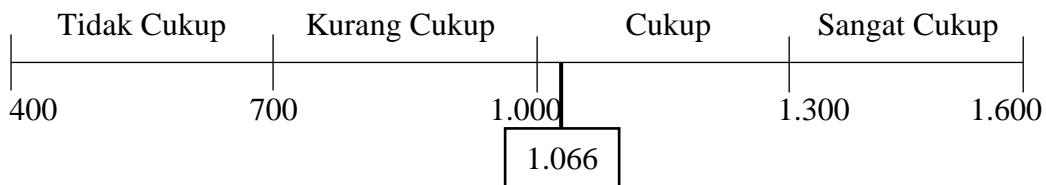
$$= 400$$

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$

$$= \frac{1.600 - 400}{4}$$

$$= 300$$

Garis kuantinum =



Merujuk pada Tabel 4.28 hasil rekapitulasi skor responden dan perhitungan populasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kecukupan berada pada kategori **cukup**. Item pernyataan dengan total skor paling tinggi yaitu pada Tabel 4.24. Item pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif, dengan total skor 372 mayoritas menjawab sesuai dan sangat sesuai. Sebaliknya, item pernyataan dengan skor terendah pada aspek kecukupan yaitu Tabel 4.25, “ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saya” dengan total skor 250, mayoritas menjawab tidak sesuai dan kurang sesuai. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rastrada sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi pada sebagian KPM, malah menjadi ketergantungan terhadap bantuan.

4.2.4 Kesetaraan

Kesetaraan berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Peneliti menganalisis aspek kesetaraan yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu pemerataan jumlah dan pemerataan pelayanan petugas. Hasil aspek ini didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh setiap responden berdasarkan lima item pernyataan. Hasil jawaban responden akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 29: Kesesuaian Rastrada dalam Penyediaan Tiga Karung Beras Berisi 10 Kilogram

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	1	1
3	Sesuai	31	31
4	Sangat Sesuai	68	68
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.29 dapat diketahui 31 persen responden menyatakan sesuai dan 68 persen sangat sesuai terkait Rastrada yang dibagikan berupa tiga karung yang masing-masing berisi 10 kilogram. Hanya terdapat satu persen yang menyatakan kurang sesuai. Kemudian didalami oleh peneliti dan juga enumerator, responden yang menjawab kurang sesuai merupakan seorang disabilitas mental yang tinggal seorang diri, sebenarnya penerima manfaat yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Rastrada atas nama ibunya namun ibunya telah meninggal, kemudian setelah itu pengambilan diwakili oleh ketua RW setempat. Ternyata responden menyatakan bahwa beras yang diberikan hanya sebanyak dua karung saja. Berikut hasil wawancara bersama responden, “Dulu waktu ibu masih ada saya bantu ambil, saya yang panggul. Setelah itu diambilin sama pak RW, saya diberi

dua karung, yaudah saya gapapa daripada gak dapat kan. Nah terus biasanya saya langsung anter ke bibi, bibi saya kan punya warung, saya minta tolong buat dimasakin karna gabisa masak” (JI, hasil wawancara 21/02/2025). Menurut Pekerja Sosial, “Iya betul ibunya meninggal, tapi jika diberhentikan kami tidak tega karna kondisinya masih membutuhkan” (LT, hasil wawancara 24/02/2025).

Tabel 4. 30: Kesesuaian Penyaluran Urut Antrean Kedatangan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	17	17
3	Sesuai	56	56
4	Sangat Sesuai	27	27
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.30 dapat diketahui 56 persen responden menyatakan sesuai dan 27 persen sangat sesuai terkait penyaluran Rastrada dilakukan urut sesuai antrean kedatangan. Kemudian 17 persen yang menyatakan kurang sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai. Pertama, KPM merasa jarang antrean pembagian Rastrada sesuai urutan kedatangan. Kedua, terdapat kelurahan yang pembagiannya didasarkan pada urutan RW. Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial, “Sistem antrean diatur oleh petugas di lapangan, biasanya urut kedatangan. Kami berusaha menjaga ketertiban dan keadilan” (AF, hasil wawancara 14/02/2025).

Tabel 4. 31: Kesesuaian Sistem Antrean Dijalankan dengan Tertib

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	6	6
3	Sesuai	72	72
4	Sangat Sesuai	22	22
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.31 dapat diketahui 72 persen responden menyatakan sesuai dan 22 persen sangat sesuai terkait sistem antrean saat penyaluran sudah tertib. Selebihnya ada enam persen yang menyatakan kurang sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai yaitu sistem antrean yang berubah-ubah, terkadang adil urut antrean kedatangan, terkadang dipanggil per-RW, dan selebihnya tidak menentu. Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, “Umumnya tertib, karena ada pendampingan dari petugas. Tapi kadang di awal ada penumpukan karena antusiasme” (LT, hasil wawancara 24/02/2025).

Tabel 4. 32: Frekuensi Pelayanan Ramah yang Diberikan Petugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	1	1
3	Sering	49	49
4	Selalu	50	50
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.32 dapat diketahui 49 persen responden menyatakan petugas sering dan 50 persen selalu melayani dengan ramah, baik dari proses sebelum maupun saat penyaluran. Hanya satu persen yang menyatakan jarang. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan yang mendasari responden memilih jawaban jarang yaitu pernah berselisih paham dengan salah satu petugas. Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, “Secara umum, ya. Tapi ada kalanya petugas kewalahan karena jumlah KPM yang banyak, jadi terkesan kurang ramah” (FJ, hasil wawancara 18/02/2025).

Tabel 4. 33: Frekuensi Perlakuan Baik kepada KPM oleh Petugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	0	0
2	Jarang	3	3
3	Sering	67	67
4	Selalu	30	30
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.33 dapat diketahui 67 persen responden menyatakan sering dan 30 persen selalu diperlakukan dengan baik oleh petugas. Hanya tiga persen responden yang menyatakan jarang diperlakukan dengan baik oleh petugas. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban sering dan selalu. Pertama, memperlakukan sama kepada semua KPM, tidak diskriminasi. Kedua, layanan distribusi mendahulukan kelompok rentan. Ketiga, jika kondisi KPM tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kelurahan, maka ada petugas yang mengantarkan berasnya.

Berdasarkan Tabel 4.29 sampai dengan Tabel 4.33 dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden beragam pada aspek kesetaraan. Namun, seluruh pernyataan yang bernilai positif karena sebagian besar responden memilih jawaban “sesuai” dan “sangat sesuai”. Perbedaan pilihan jawaban responden menghasilkan perolehan skor yang beragam. Rekapitulasi skor yang diperoleh dari aspek kesetaraan terlampir, kemudian dibuatlah perhitungan individu dan populasi untuk mengetahui tingkat kesetaraan, sebagai berikut:

1. Perhitungan Individu

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai maksimal} &= \text{bobot kategori jawaban tertinggi} \times \text{jumlah item pernyataan} \\
 &= 4 \times 5 \text{ item} \\
 &= 20
 \end{aligned}$$

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
 = 1 x 5 item
 = 5

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$
 = $\frac{20 - 5}{4}$
 = 3,75 dibulatkan menjadi 4

Tabel 4. 34: Kategori Jawaban Aspek Kesetaraan

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Setara	5 – 8	0	0
2	Kurang Setara	9 – 12	0	0
3	Setara	13 – 16	45	45
4	Sangat Setara	>16	55	55
JUMLAH			100	100

Untuk melihat proporsional pada Tabel 4.34 di atas, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut:



Gambar 4. 4: Diagram Aspek Kesetaraan

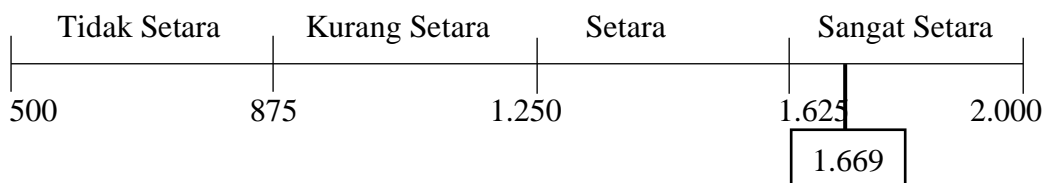
2. Perhitungan Populasi

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
x jumlah responden
= 4 x 5 item x 100 orang
= 2.000

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
x jumlah responden
= 1 x 5 item x 100 orang
= 500

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$
= $\frac{2.000 - 500}{4}$
= 375

Garis kuantinum =



Merujuk pada Tabel 4.34 hasil rekapitulasi skor responden dan perhitungan populasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesetaraan berada pada kategori **sangat setara**. Item pernyataan dengan total skor paling tinggi yaitu pada Tabel 4.29. Item pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif, dengan total skor 367 mayoritas menjawab sesuai dan sangat sesuai. Item pernyataan selanjutnya Tabel 4.32 dengan total skor 349. Sebaliknya, item pernyataan dengan skor terendah pada aspek kecukupan yaitu Tabel 4.30 dengan total skor 310, namun total skor ini masih cukup tinggi. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan

bahwa pada aspek kesetaraan, jumlah dan layanan petugas sudah setara, dibuktikan dengan perbedaan skor tiap item yang tidak terlalu signifikan.

4.2.5 Responsivitas

Responsivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Peneliti menganalisis aspek responsivitas yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu pengetahuan KPM terhadap tahapan program dan proses pengaduan. Hasil aspek ini didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh setiap responden berdasarkan enam item pernyataan. Hasil jawaban responden akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 35: Pemahaman KPM Terkait tahapan Program Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Paham	11	11
2	Kurang Paham	27	27
3	Paham	55	55
4	Sangat Paham	7	7
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.35 dapat diketahui 55 persen responden menyatakan paham dan tujuh persen sangat paham terkait tahapan proses Rastrada. Sebaliknya 27 persen responden menyatakan kurang paham dan 11 persen tidak paham. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang paham dan tidak paham. Pertama, tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait tahapan program Rastrada. Kedua, lanjut usia. Ketiga, tidak pernah mengambil Rastrada secara langsung.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut petugas Pusat Kesejahteraan Sosial, “KPM yang kurang paham dan tidak paham

tersebut mayoritas lanjut usia dan yang mengalami sakit berat sehingga biasanya beras diantarkan langsung oleh petugas” (NA, hasil wawancara 24/02/2025). Sedangkan menurut Kader, “Cukup paham. Kami para kader juga sering membantu menjelaskan kepada warga” (RS, hasil wawancara 24/02/2025).

Tabel 4. 36: Frekuensi Informasi Penyaluran yang Jelas dan Teratur

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	1
2	Jarang	19	19
3	Sering	32	32
4	Selalu	48	48
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.36 dapat diketahui 32 persen responden menyatakan informasi penyaluran Rastrada sering dan 48 persen selalu diberikan secara jelas serta tidak mendadak. Kemudian 19 persen responden menyatakan jarang dan satu persen tidak pernah. Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut Pekerja Sosial, "Informasi disampaikan oleh Dinas Sosial, kemudian oleh Peksos atau Puskesmas diteruskan ke RT/RW. Karena biasanya memiliki Grup WhatsApp” (SN, hasil wawancara 18/02/2025). Salah satu ketua RW menyatakan bahwa, “Info terkait penyaluran memang biasanya diberikan mendadak” (NH, hasil wawancara 06/03/2025).

Tabel 4. 37: Frekuensi Interaksi KPM dengan Petugas/RT/RW/ Puskesmas/Peksos

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah	1	1
2	Jarang	44	44
3	Sering	32	32
4	Selalu	23	23
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.37 dapat diketahui 32 persen responden menyatakan sering dan 23 persen selalu melakukan interaksi dengan petugas/ RT/ RW/ Puskesmas/ Pekerja Sosial kelurahan. Kemudian 44 persen responden menyatakan jarang dan satu persen tidak pernah. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban jarang dan tidak pernah. Pertama, kurang aktif di masyarakat. Kedua, tidak mengambil langsung.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial, “Interaksi kami lebih bersifat koordinasi dan monitoring. Untuk interaksi langsung dengan KPM lebih banyak di level Puskesmas dan Pekerja Sosial” (AF, hasil wawancara 14/02/2025). Lalu diperkuat oleh petugas Pusat Kesejahteraan Sosial “Cukup intens. Kami sering menjadi garda terdepan untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari KPM” (NA, hasil wawancara 24/02/2025).

Tabel 4. 38: Kesesuaian KPM dalam Mengetahui Alur Pengaduan Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	1	1
2	Kurang Sesuai	15	15
3	Sesuai	63	63
4	Sangat Sesuai	21	21
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.38 dapat diketahui 63 persen responden menyatakan sesuai dan 21 persen sangat sesuai bahwa mengetahui alur pengaduan jika mengalami kendala/memiliki keluhan terkait Rastrada. Kemudian 15 persen responden menyatakan kurang sesuai dan satu persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Pertama, tidak pernah mengalami

kendala sehingga tidak mengetahui alur pengaduan. Kedua, jika mengalami kendala lebih memilih lapor kepada ketua RT/RW setempat.

Tabel 4. 39: Kesesuaian Penanganan Pengaduan/Keluhan oleh Petugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	1	1
3	Sesuai	74	74
4	Sangat Sesuai	25	25
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.39 dapat diketahui 74 persen responden menyatakan sesuai dan 25 persen sangat sesuai bahwa pengaduan/keluhan/kendala yang dialami langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Hanya satu persen responden yang menyatakan kurang sesuai. Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial, “Kami mengusahakan jika ada keluhan atau kendala, tindaklanjut maksimal 2x24 jam” (AF, hasil wawancara 14/02/2025).

Tabel 4. 40: Kesesuaian Penanganan oleh Petugas Saat KPM Berhalangan Hadir

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	4	4
2	Kurang Sesuai	19	19
3	Sesuai	54	54
4	Sangat Sesuai	23	23
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 40 dapat diketahui 54 persen responden menyatakan sesuai dan 23 persen sangat sesuai apabila KPM berhalangan hadir (seperti sakit, kemalangan, bekerja, atau lainnya) ada solusi yang diberikan oleh petugas. Kemudian 19 persen menyatakan kurang sesuai dan empat persen tidak sesuai. Adanya perbedaan ini menjadi pertanyaan besar, karena pada dasarnya dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 pengambilan Rastrada harus oleh KPM

yang tercantum oleh Surat Keputusan (SK) Wali Kota dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu Rastrada.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut pejabat Dinas Sosial, “Memang untuk pengambilan Rastrada tidak dapat diwakilkan” (AF, hasil wawancara 14/02/2025). Dilengkapi pernyataan Pekerja Sosial, “Kalau yang lansia dan sakit berat biasanya kami antarkan langsung ke rumah” (LT, hasil wawancara 20/02/2025). Menurut pernyataan salah satu Kader bahwa, “RW 016 ini semuanya tidak ada yang diwakilkan, kami cukup tegas karna aturannya seperti itu” (RS, hasil wawancara 24/02/2025). Hal ini sebagai bukti nyata bahwa teknis distribusi di setiap wilayah berbeda-beda.

Berdasarkan Tabel 4.35 sampai dengan Tabel 4.40 dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden beragam pada aspek responsivitas. Namun mayoritas pernyataan pada aspek responsivitas terdapat jawaban negatif yang cukup tinggi. Tabel Perbedaan pilihan jawaban responden menghasilkan perolehan skor yang beragam. Rekapitulasi skor yang diperoleh dari aspek responsivitas terlampir, kemudian dibuatlah perhitungan individu dan populasi untuk mengetahui tingkat responsivitas, sebagai berikut:

1. Perhitungan Individu

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
= 4 x 6 item
= 24

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
= 1 x 6 item

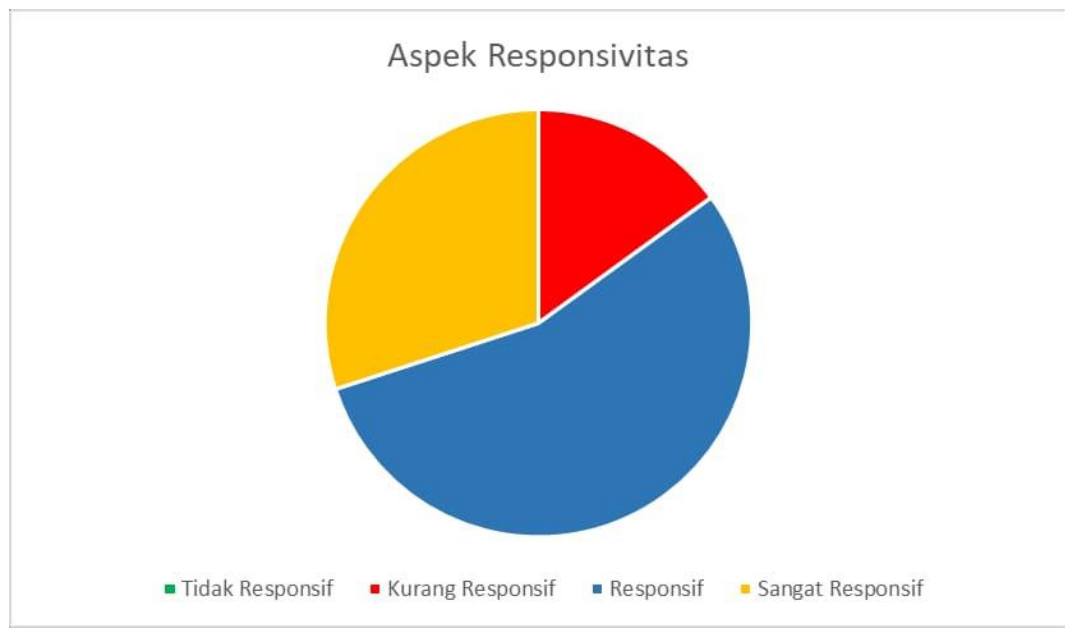
$$= 6$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}} \\ &= \frac{24 - 6}{4} \\ &= 4,5 \text{ dibulatkan menjadi } 5 \end{aligned}$$

Tabel 4. 41: Kategori Jawaban Aspek Responsivitas

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Responsif	6 – 10	0	0
2	Kurang Responsif	11 – 15	15	15
3	Responsif	16 – 20	59	59
4	Sangat Responsif	>20	26	26
JUMLAH			100	100

Untuk melihat proporsional pada Tabel 4.41 di atas, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut:



Gambar 4. 5: Diagram Aspek Responsivitas

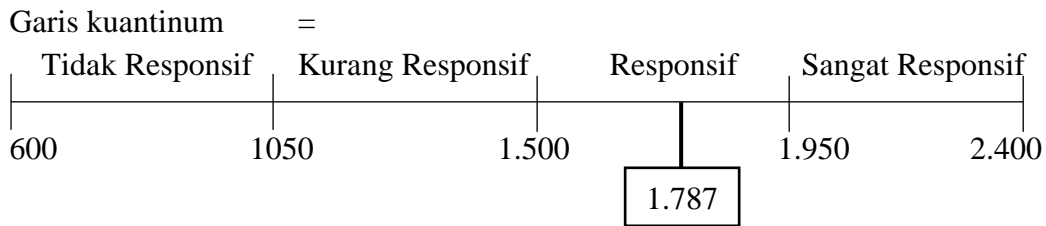
2. Perhitungan Populasi

$$\begin{aligned} \text{Nilai maksimal} &= \text{bobot kategori jawaban tertinggi} \times \text{jumlah item pernyataan} \\ &\quad \times \text{jumlah responden} \\ &= 4 \times 6 \text{ item} \times 100 \text{ orang} \end{aligned}$$

$$= 2.400$$

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 1 x 6 item x 100 orang
 = 600

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$
 = $\frac{2.400 - 600}{4}$
 = 450



Merujuk pada Tabel 4.41 hasil rekapitulasi skor responden dan perhitungan populasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat responsivitas berada pada kategori **responsif**. Item pernyataan dengan total skor paling tinggi yaitu pada Tabel 4.36. Item pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif, dengan total skor 327 mayoritas menjawab sesuai dan sangat sesuai. Item pernyataan selanjutnya Tabel 4.39 dengan total skor 324. Sebaliknya, item pernyataan dengan skor terendah pada aspek kecukupan yaitu Tabel 4.35 dengan total skor 258. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek responsivitas dari sisi pelayanan petugas sudah baik, namun dari sisi KPM masih banyak yang belum memahami terkait tahapan program Rastrada maupun alur pengaduan.

4.2.6 Ketepatan

Ketepatan mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan suatu program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Peneliti menganalisis aspek ketepatan yang di dalamnya memuat tiga indikator yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan kesesuaian harapan KPM. Hasil aspek ini didapatkan dari jawaban yang diberikan oleh setiap responden berdasarkan empat item pernyataan. Hasil jawaban responden akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 42: Kesesuaian Status KPM sebagai Penerima Tunggal Bantuan Sosial

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	3	3
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	53	53
4	Sangat Sesuai	44	44
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.42 dapat diketahui 53 persen responden menyatakan sesuai dan 44 persen sangat sesuai belum pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya. Hanya tiga persen yang menyatakan tidak sesuai, dengan penjabaran yaitu satu orang responden pernah mendapatkan BPNT dan dua orang responden mendapatkan bantuan PKH. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban tidak sesuai yaitu setelah masuk kepesertaan bantuan PKH, tetap diberikan beras Rastrada.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut petugas Pusat Kesejahteraan Sosial, “Apabila di pertengahan periode ada KPM yang mendapatkan bantuan PKH maka langsung dilaporkan sehingga termin berikutnya sudah tidak masuk di SK dan tidak mendapatkan Rastrada” (IS, hasil

wawancara 11/03/2025). Dilengkapi oleh pernyataan pejabat Dinas Sosial, “Setiap periode itu pasti ada dua Surat Keputusan (SK) Wali Kota, di awal tahun sekitar Januari dan SK akhir tahun bulan Desember. Karena pasti ada perubahan, misalnya masuk kepesertaan PKH” (AF, hasil wawancara 14/02/2025).

Tabel 4. 43: Kesesuaian Kelayakan KPM di Wilayahnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	4	4
2	Kurang Sesuai	29	29
3	Sesuai	48	48
4	Sangat Sesuai	19	19
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.43 dapat diketahui 48 persen responden menyatakan sesuai dan 19 persen sangat sesuai bahwa semua penerima manfaat Rastrada di wilayahnya memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Selebihnya 29 persen yang menyatakan kurang sesuai dan empat persen tidak sesuai. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat tiga alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai. Pertama, terdapat ketua RT/RW yang masuk dalam daftar penerima Rastrada. Kedua, terdapat KPM Rastrada masuk kategori usia kerja dan memiliki pekerjaan layak. Ketiga, terdapat KPM Rastrada yang memiliki rumah bertingkat.

Hasil penelitian kuantitatif di atas diperkuat oleh data kualitatif. Menurut petugas Pusat Kesejahteraan Sosial, “Waktu itu memang ada ‘kebobolan’ soalnya ada salah satu RW mendapat Rastrada, mungkin salah satu faktornya dulu memang pengajuan langsung dari nama yang diberikan oleh RW. Kalau untuk yang rumah lantai dua biasanya itu peninggalan dari orang tua” (NA, hasil wawancara 24/02/2025). Dilengkapi, “Iya *neng* itu ketua RT sebelumnya juga dapat, kelewatan

vervalnya”. (ER, hasil wawancara 06/03/2025). Tanggapan Pekerja Sosial, “Fenomena ini selalu ada, meskipun sudah diminimalisir. Itulah pentingnya verval dan tahun 2025 ada sistem perankingan” (FJ, hasil wawancara 18/02/2025).

Tabel 4. 44: Kesesuaian Penyaluran Rastrada Setiap Tiga Bulan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	57	57
4	Sangat Sesuai	43	43
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.44 dapat diketahui 57 persen responden menyatakan sesuai dan 43 persen sangat sesuai bahwa Rastrada disalurkan setiap tiga bulan. Namun berdasarkan observasi praktikum yang dilakukan oleh peneliti, pada periode 2024 termin terakhir, distribusi Rastrada dilaksanakan pada bulan November yang artinya kurang dari tiga bulan. Serta termin pertama di tahun 2025 juga mengalami keterlambatan distribusi.

Tabel 4. 45: Kesesuaian Harapan KPM terhadap Bantuan Rastrada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	8	8
3	Sesuai	73	73
4	Sangat Sesuai	19	19
Jumlah		100	100

Berdasarkan Tabel 4.45 dapat diketahui 73 persen responden menyatakan secara keseluruhan Rastrada sudah sesuai dan 19 persen sangat sesuai dengan harapan KPM. Kemudian delapan persen yang menyatakan kurang sesuai. Didukung oleh hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh peneliti bersama Dinas Sosial pada akhir tahun 2024 dengan hasil 94,7 persen masyarakat menyatakan puas dan sangat puas. Berdasarkan analisis jawaban terbuka, terdapat

dua alasan utama yang mendasari responden memilih jawaban kurang sesuai. Pertama, ingin mendapatkan bantuan sosial lainnya. Kedua, berharap distribusi beras setiap bulan.

Berdasarkan Tabel 4.42 sampai dengan Tabel 4.45 dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden beragam pada aspek ketepatan. Hanya ada satu pernyataan yang bernilai negatif cukup besar yaitu Tabel 4.43. Perbedaan pilihan jawaban responden menghasilkan perolehan skor yang beragam. Rekapitulasi skor yang diperoleh dari aspek ketepatan terlampir, kemudian dibuatlah perhitungan individu dan populasi untuk mengetahui tingkat ketepatan, sebagai berikut:

1. Perhitungan Individu

$$\begin{aligned} \text{Nilai maksimal} &= \text{bobot kategori jawaban tertinggi} \times \text{jumlah item pernyataan} \\ &= 4 \times 4 \text{ item} \\ &= 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai minimal} &= \text{bobot kategori jawaban terendah} \times \text{jumlah item pernyataan} \\ &= 1 \times 4 \text{ item} \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}} \\ &= \frac{16 - 4}{4} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Tabel 4. 46: Kategori Jawaban Aspek Ketepatan

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Tepat	4 – 6	0	0
2	Kurang Tepat	7 – 9	2	2
3	Tepat	10 – 12	39	39
4	Sangat Tepat	>12	59	59
JUMLAH			100	100

Untuk melihat proporsional pada Tabel 4.46 di atas, disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut:



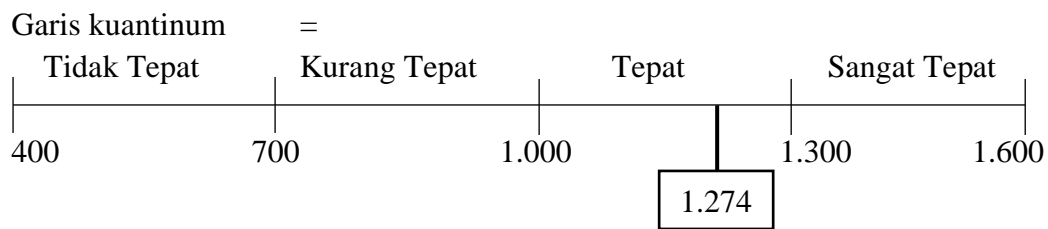
Gambar 4. 6: Diagram Aspek Ketepatan

2. Perhitungan Populasi

Nilai maksimal = bobot kategori jawaban tertinggi x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 4 x 4 item x 100 orang
 = 1.600

Nilai minimal = bobot kategori jawaban terendah x jumlah item pernyataan
 x jumlah responden
 = 1 x 4 item x 100 orang
 = 400

Interval = $\frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{banyak kelas}}$
 = $\frac{1.600 - 400}{4}$
 = 300



Merujuk pada Tabel 4.46 hasil rekapitulasi skor responden dan perhitungan populasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat ketepatan berada pada kategori **tepat**. Item pernyataan dengan jumlah skor paling tinggi yaitu pada Tabel 4.44. Item pernyataan tersebut merupakan pernyataan positif, dengan jumlah skor 343 mayoritas menjawab sesuai dan sangat sesuai. Item pernyataan selanjutnya Tabel 4.42 dengan jumlah skor 338. Sebaliknya, item pernyataan dengan skor terendah pada aspek kecukupan yaitu Tabel 4.43 dengan jumlah skor 282. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek ketepatan, Rastrada sudah tepat waktu, namun belum sepenuhnya tepat sasaran. Untuk kriteria belum pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya memang mayoritas menjawab sesuai dan sangat sesuai, namun masih ada beberapa KPM yang dianggap kurang layak mendapat bantuan, karena merupakan *stakeholder* setempat, mampu secara ekonomi, ataupun usia produktif yang memiliki pekerjaan. Selanjutnya akan dijabarkan mengenai pembahasan yang lebih mendalam.

Berdasarkan analisis kuantitatif terhadap enam aspek evaluasi kebijakan, diperoleh variasi skor garis kuantinum yang mencerminkan persepsi responden terhadap pelaksanaan bantuan sosial melalui program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Cimahi. Meskipun jumlah item pernyataan dalam setiap aspek berbeda, pendekatan klasifikasi empat tingkat kuantitatif memungkinkan

identifikasi posisi persepsi secara proporsional. Aspek dengan garis kuantinum tertinggi adalah efektivitas, yaitu sebesar 2.963 dari skor maksimum 4.000. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai program telah berjalan cukup baik dalam mencapai tujuan utamanya, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan menuju tingkat sangat efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mengarah ke jalur yang tepat dan diterima baik oleh sebagian besar penerima manfaat.

Sebaliknya, garis kuantinum terendah terdapat pada aspek kecukupan, dengan skor 1.066 dari skor maksimum 1.600. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerima manfaat belum sepenuhnya merasa bantuan yang diberikan mencukupi kebutuhan dasar mereka, sehingga diperlukan penyesuaian baik dalam jumlah maupun bentuk bantuan. Perbedaan ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara capaian program dan kebutuhan riil di lapangan. Temuan ini menjadi pintu masuk untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan program Rastrada memenuhi enam aspek evaluasi secara menyeluruh. Pembahasan secara rinci mengenai masing-masing aspek akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

4.3 Pembahasan

Pada sub bab ini bertujuan untuk menganalisis serta mengaitkan temuan penelitian dengan konsep dan teori yang relevan. Hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa program Rastrada telah memberikan berbagai manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan dalam setiap aspek evaluasi kebijakan ini. Untuk memahami lebih lanjut, berikut pembahasannya:

4.3.1 Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana Rastrada mencapai tujuan yang telah ditetapkan (N. Dunn, 2003). Rastrada perlu dipastikan sesuai dengan tujuan, karena kebijakan yang menyimpang dari tujuan awalnya akan mempengaruhi implementasi. Menurut (Chazali, 2016) kegagalan implementasi kebanyakan akibat dari ketidaktaatan pelaksana terhadap tujuan kebijakan itu sendiri. Tujuan utama dari Rastrada yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota yaitu agar terpenuhinya kebutuhan dasar pangan pokok bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah dan mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah atau masyarakat yang rawan sosial, secara garis besar kedua tujuan telah tercapai.

Aspek efektivitas bantuan sosial dilihat dari kebermanfaatan dan kepuasan terhadap bantuan (Dehani et al., 2018). Kebermanfaatan pertama, Rastrada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat, seperti program pendahulunya yaitu Raskin dan Rastra. Pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk beras karena karbohidrat memberikan kontribusi terbesar terhadap total energi individu setiap harinya dan ketergantungan konsumsi pangan masyarakat Indonesia terhadap beras masih sangat tinggi (Syaffa et al., 2020). Kebermanfaatan kedua, adanya bantuan Rastrada diharapkan KPM dapat membeli kebutuhan pangan lain guna mencukupi angka gizi. Angka Kecukupan Gizi (AKG) didapatkan melalui pola makan yang seimbang, diantaranya mencakup karbohidrat, lemak, protein, serat, air, vitamin, dan mineral. Namun berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, mayoritas KPM kurang memperhatikan gizi yang seimbang, bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan nasi dan garam atau nasi dengan

lauk seadanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Syaffa et al., 2020) bahwa pola konsumsi pangan pokok masyarakat kurang beragam dimana hanya bertumpu pada beras, sehingga berpengaruh pada kurangnya tingkat kecukupan energi.

Kebermanfaatan ketiga, Rastrada juga diharapkan dapat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan indeks pembangunan manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran (Isman, 2023). Hasil kuesioner menunjukkan angka yang positif, bahwa dengan adanya Rastrada uang dapat dialihkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, berbanding terbalik dengan data jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2024 yang tidak/belum sekolah masih sangat tinggi yaitu 116.100 jiwa, seperti yang tertera pada Tabel 4.2.

Rastrada belum dapat mengubah taraf ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi stabil, dibuktikan dengan mayoritas KPM Rastrada tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, bekerja serabutan, tempat tinggal kurang layak dan tidak permanen. Dibuktikan dengan angka pengangguran yang cukup tinggi pada Tabel 4.4. KPM yang memiliki pekerjaan pun penghasilannya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak dapat ditabung untuk di masa depan dan kondisi darurat. Selanjutnya, penelitian ini juga menghasilkan angka kepuasan yang dijabarkan menjadi kepuasan terhadap fasilitas, kuantitas, kualitas, dan proses pelayanan Rastrada. Secara keseluruhan KPM sangat puas dan puas, hanya saja pada sub kuantitas sebagian masih merasa kurang puas dan tidak puas yang mana akan dijabarkan lebih lanjut pada aspek kecukupan.

4.3.2 Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumberdaya (waktu, tenaga, dan biaya) untuk mencapai tujuan yang diharapkan (N. Dunn, 2003). Menurut (Monoarfa, 2020) birokrasi yang ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu. Berdasarkan kuesioner dan wawancara dengan KPM terkait ketepatan dan kecepatan waktu penyaluran Rastrada mendapatkan hasil yang positif. Namun berbeda halnya dengan wawancara oleh petugas di lapangan, disampaikan bahwa satu termin penyaluran membutuhkan waktu lebih dari empat jam bahkan bisa beberapa hari. Sesuai dengan hasil survei petugas Rastrada yang dilakukan oleh peneliti bersama Dinas Sosial Kota Cimahi pada akhir tahun 2024 bahwa 71,4 persen menyatakan satu termin penyaluran dilakukan lebih dari empat jam, lalu 23,8 persen menyatakan dua sampai empat jam, dan hanya 4,8 persen yang menyampaikan penyaluran kurang dari dua jam.

Berhubungan dengan indikator selanjutnya yaitu biaya. Hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan hasil yang negatif yakni sebagian besar KPM harus mengeluarkan biaya tambahan ketika pengambilan beras. Biaya tambahan tersebut digunakan untuk ongkos naik ojek maupun kendaraan umum lainnya guna membawa tiga karung beras sekaligus. Namun dari segi biaya administrasi dan pelayanan, menurut petugas maupun KPM tidak adanya biaya tambahan. Karena bantuan Rastrada diberikan gratis / tanpa pungutan biaya, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Mendukung pernyataan

(Monoarfa, 2020) bahwa birokrasi yang efisien seharusnya tanpa disertai biaya ekstra, karena pelayanan terbaik memiliki kepastian menyangkut biaya.

Berdasarkan penelitian (Monoarfa, 2020) efisiensi juga digunakan untuk melihat kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan. Terkait kemudahan proses penyaluran Rastrada, hampir seluruh KPM menyatakan mudah. Sedangkan untuk jarak lokasi dan kemudahan akses, sebagian masih merasa kesulitan karena beberapa kelurahan memiliki wilayah geografis yang luas, sehingga jarak dari rumah ke kelurahan cukup jauh. Lalu sebagian besar KPM juga merasa kesulitan membawa tiga karung beras sekaligus. Hal ini karena mayoritas KPM tidak memiliki kendaraan pribadi, berada pada kondisi sakit, dan lanjut usia.

4.3.3 Kecukupan

Kecukupan digunakan untuk mengetahui bantuan Rastrada dapat memenuhi kebutuhan, nilai, dan kepuasan dari penerima manfaat (N. Dunn, 2003). Berdasarkan kuesioner, masih banyak KPM yang merasa Rastrada belum sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya, dalam hal ini secara kuantitas tidak mencukupi. Mayoritas mengaku beras satu karung berisi 10 kilogram tidak cukup untuk kebutuhan selama satu bulan, dengan rata-rata frekuensi konsumsi dua kali sehari. Peneliti menganalisis berdasarkan jumlah tanggungan keluarga responden bahwa yang menyatakan sangat cukup memiliki jumlah tanggungan satu sampai dua orang, cukup memiliki tanggungan tiga sampai empat orang, kurang cukup memiliki tanggungan empat sampai lima orang, sedangkan yang memilih tidak cukup memiliki tanggungan lebih dari lima orang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hanum, 2018) bahwa semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin

besar jumlah konsumsi yang diperlukan. Ketidacukupan bantuan Rastrada pada sebagian KPM tersebut mengharuskan mereka tetap membeli beras tambahan, namun di samping itu mereka juga tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika Rastrada dihentikan.

4.3.4 Kesetaraan

Kesetaraan berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat (N. Dunn, 2003). Sejalan dengan pernyataan (Wowiling et al., 2019) bahwa kesetaraan berkaitan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran. Menurut (Dehani et al., 2018) aspek kesetaraan dilihat dari pemerataan jumlah dan pemerataan pelayanan petugas. Secara jumlah, Rastrada memberikan bantuan berupa tiga karung beras dengan masing-masing berisi 10 kilogram. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat salah satu KPM yang tidak mendapatkan sesuai haknya, yakni hanya mendapat dua karung beras. Ketidaksesuaian tersebut karena ada alur pengambilan Rastrada yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022. Peraturan Wali Kota dengan jelas mengatur bahwa pengambilan bantuan Rastrada tidak dapat diwakilkan dan apabila penerima utama meninggal dunia maka bantuan terputus, dalam artian bantuan tidak dapat diwariskan. Sedangkan dalam temuan tersebut, penerima utama yaitu ibunya telah meninggal dunia, kemudian Rastrada tetap diberikan kepada anaknya yang mengalami disabilitas mental. Selanjutnya saat pengambilan beras Rastrada diwakili oleh ketua RW setempat, namun jumlahnya menjadi berkurang.

Secara pemerataan pelayanan petugas, yang pertama ketika proses penyaluran Rastrada dilakukan dengan tertib danurut sesuai antrean kedatangan.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, masih ada sebagian yang merasa antrean belum adil dan sesuai. Diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa setiap kelurahan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menentukan urutan pengambilan beras. Kedua, petugas memberikan pelayanan yang ramah serta memperlakukan seluruh KPM dengan baik tanpa membedakan. Sejalan dengan penelitian (Desrinelti et al., 2021) bahwa keadilan dalam pelaksanaan kebijakan berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (non diskriminatif).

4.3.5 Responsivitas

Responsivitas menunjukkan sejauh mana Rastrada mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh penerima manfaat (N. Dunn, 2003). Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari respon masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan (Wowiling et al., 2019). Rastrada mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak, terutama para penerima manfaat. Hasil testimoni yang disampaikan melalui enumerator berupa dukungan agar program Rastrada dapat ditingkatkan dan berkelanjutan.

Menurut (Dehani et al., 2018) aspek responsivitas dilihat dari pengetahuan KPM terhadap tahapan program dan proses pengaduan. KPM dapat menyebutkan secara garis besar dari pengusulan oleh RT/RW setempat, disampaikan kepada kelurahan, dilakukan verifikasi validasi oleh petugas Puskesmas, penyaringan dengan sistem ranking, dikeluarkan daftar penerima melalui Surat Keputusan, sosialisasi dan pembagian kartu penerima, penyaluran bantuan beras di Kelurahan. Proses penyaluran juga terdapat alur yang perlu dilalui yaitu pengumpulan berkas fotokopi

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta menunjukkan kartu penerima Rastrada, tanda tangan berkas penerima dan Berita Acara Serah Terima, dokumentasi, lalu pengambilan beras.

Selain itu, sebagian besar KPM juga memahami alur pengaduan, yaitu jika kendala masih ringan melapor kepada RT/RW setempat, jika belum dapat diatasi melapor kepada Puskesmas atau Pekerja Sosial di kelurahan masing-masing, kemudian apabila berat maka akan dikoordinasikan ke Dinas Sosial Kota Cimahi. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 31 Perwal Nomor 25 Tahun 2022, pengaduan yang dapat ditampung oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yaitu terkait sasaran penerima, jumlah bantuan yang diterima, kualitas beras Rastrada, dan/atau kartu penerima Rastrada hilang.

Interaksi KPM dengan petugas/RT/RW/Puskesmas/Peksos terkait bantuan Rastrada juga menunjukkan hasil yang cukup positif. Karena dari berbagai alur atau tahapan yang telah disebutkan di atas, tentu melibatkan KPM dan petugas secara langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian (Risalbi et al., 2021) bahwa hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemberi layanan dapat menciptakan kepuasan dan reputasi instansi yang semakin baik. Dari sisi pelayanan petugas, ketika terdapat pengaduan/keluhan/masalah di lapangan tindaklanjut dilakukan secara cepat dan tepat. Hanya saja terkadang informasi jadwal penyaluran disampaikan kepada KPM secara mendadak sehingga berpotensi menyebabkan miskomunikasi di lapangan. Kemudian solusi dari petugas apabila KPM berhalangan hadir (seperti sakit, kemalangan, bekerja, atau lainnya) masih berbeda-beda antar kelurahan bahkan antar RW. Ada petugas yang bersikap tegas

menegakkan peraturan sesuai dengan Peraturan Wali Kota untuk pengambilan harus dengan penerima utama yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota, namun sebagian besar memperbolehkan untuk diwakili.

4.3.6 Ketepatan

Ketepatan mengacu pada signifikansi dari tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari (N. Dunn, 2003). Menurut (Dehani et al., 2018) aspek ketepatan bantuan sosial dilihat dari ketepatan sasaran, tepat waktu, dan kesesuaian harapan KPM. Rastrada merupakan bantuan yang berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat dengan kategori risiko sosial, baik telah terdaftar di DTKS maupun non DTKS. Dipersempit dalam Pasal 4 Perwal Nomor 25 Tahun 2022 bahwa penerima Rastrada bukan termasuk penerima bantuan PKH dan/atau BPNT. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, indikator tepat sasaran Rastrada masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Dari 100 orang responden, ditemukan satu orang responden pernah mendapatkan BPNT dan dua orang responden mendapatkan bantuan PKH di pertengahan periode Rastrada, namun beras tetap diberikan. Selanjutnya untuk kategori berisiko sosial, sebagian menyatakan masih ada ketidaksesuaian yaitu terdapat KPM yang memiliki pekerjaan dan dianggap mampu secara ekonomi oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini terjadi karena pengusulan dari RT/RW setempat, yang mana terkadang ada penyalahgunaan wewenang atau bercampur dengan kepentingan pribadi. Menurut (Taufiq, 2024) angka kemiskinan semakin tinggi jika tingkat ketepatan pemberian bantuan banyak mengalami kesalahan yang dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mekanisme Rastrada sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Wali

Kota Nomor 25 Tahun 2022, namun pelaksanaan di lapangan masih ada celah untuk para oknum. Verifikasi dan validasi data pun juga sudah dilaksanakan. Upaya verifikasi data bertujuan untuk mempertajam basis data dan mencapai ketepatan sasaran (Taufiq, 2024). Periode 2025 mekanisme penentuan sasaran penerima Rastrada mengalami perubahan yakni adanya sistem ranking untuk menentukan kondisi yang lebih berisiko sosial dan layak mendapatkan bantuan. Selanjutnya untuk jadwal penyaluran yaitu empat termin atau tiga bulan sekali tepat dan terlaksana dengan baik. Kemudian secara keseluruhan, Rastrada telah mencapai kesesuaian harapan dari para penerima manfaat.

Berdasarkan pembahasan di atas, secara garis besar implementasi program Rastrada sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil evaluasi yang positif baik dari sisi pelaksana kebijakan, petugas di lapangan, maupun para penerima manfaat. Namun Rastrada masih menghadapi beberapa tantangan dalam setiap aspeknya, yaitu aspek efektivitas pada indikator kebermanfaatan Tabel 4.7 sampai dengan Tabel 4.10; aspek efisiensi pada indikator biaya dan tenaga Tabel 4.20 dan Tabel 4.21; aspek kecukupan pada indikator kecukupan jumlah Tabel 4.26 dan Tabel 4.27; aspek kesetaraan pada indikator pemerataan pelayanan petugas Tabel 4.29 dan Tabel 4.30; aspek responsivitas pada indikator pengetahuan dan proses tahapan Tabel 4.35, Tabel 4.37, dan Tabel 4.40; aspek ketepatan pada indikator tepat sasaran Tabel 4.42 dan Tabel 4.43. Selanjutnya, implikasi teoritis maupun praktis dari temuan ini akan dibahas lebih lanjut dalam BAB V.

BAB V

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

5.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori kemiskinan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan evaluasi kebijakan. Pertama, penelitian ini mendukung konsep bahwa kemiskinan adalah fenomena yang kompleks karena mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusia (Marjuki et al., 2022). Selain itu mendukung pengertian kemiskinan bukan hanya situasi kesengsaraan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga karena negara kurang menyediakan Perlindungan Sosial (Suharto, 2013). Peluncuran kebijakan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Cimahi menjadi contoh nyata upaya dari pemerintah daerah guna menjangkau masyarakat miskin yang belum terakomodasi dalam bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Kedua, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Iping, 2020). Mendukung definisi dari perlindungan sosial yaitu segala bentuk kebijakan dan intervensi publik untuk merespon beragam risiko dan kerentanan (Wahyu et al., 2014). Program Rastrada dirancang sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah Kota Cimahi dalam mengatasi kerentanan pangan. Pemberian bantuan pangan yang tepat sasaran, dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kekurangan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program Rastrada diperlukan peran aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Sehingga kebijakan

lokal sebagai wujud perlindungan sosial dapat benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya dalam konteks *urban poverty* seperti fenomena di Kota Cimahi.

Ketiga, temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa bantuan sosial merupakan bagian integral dari sistem perlindungan sosial. Bantuan Sosial diposisikan sebagai intervensi non-kontributif yang ditujukan bagi kelompok rentan yang tidak terjangkau oleh skema jaminan sosial berbasis iuran (ILO, 2017). Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan seperti Rastrada tidak hanya dimaknai sebagai pemberian semata, tetapi sebagai strategi perlindungan sosial yang dirancang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi risiko sosial-ekonomi bagi masyarakat miskin.

Terakhir, penelitian ini mendukung dan memperkuat evaluasi dalam implementasi kebijakan, khususnya dengan enam karakteristik evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan dapat menilai implementasi kebijakan secara menyeluruh (N. Dunn, 2003). Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat memberikan data dan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan dan optimalisasi kebijakan sosial di masa mendatang. Evaluasi terhadap kebijakan Rastrada mengungkapkan bahwa keberhasilan kebijakan juga ditentukan bagaimana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata penerima manfaat. Temuan ini juga mendorong pengembangan teori kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), terutama dalam intervensi sosial yang bersifat lokal disusun tidak hanya secara ideal, tetapi juga fleksibel terhadap realitas dan dinamika masyarakat.

5.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui implikasi praktis. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam dimensi karakteristik kebijakan menurut William N. Dunn, peneliti menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan. Berikut kelemahan utama Program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi:

1. Ketidaksesuaian alur pengambilan beras menjadi temuan utama, ketika peneliti menemukan satu orang KPM hanya menerima dua karung beras. Situasi ini terjadi karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dan aturan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota. Berawal dari penerima utama yang tercatat dalam Surat Keputusan Wali Kota meninggal dunia, dan Pekerja Sosial akhirnya memperbolehkan anaknya yang disabilitas mengambil bantuan tersebut karena masih sangat membutuhkan. Namun, pada termin terakhir, beras justru diambil oleh ketua RW setempat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan administratif, tetapi juga menjadi dilema etis bagi Pekerja Sosial, karena pemanfaatan bantuan beras digunakan oleh satu keluarga bukan hanya satu orang penerima manfaat.
2. Perbedaan teknis penyaluran antar kelurahan, terutama dalam menentukan urutan pengambilan beras dan mekanisme perwakilan. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik yang tidak konsisten dan membuka peluang ketidakadilan distribusi.

3. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat menjadi tantangan serius bagi Program Rastrada. Masih terdapat penerima manfaat yang pernah mendapat bantuan PKH BPNT tetapi tetap mendapatkan Rastrada. Selain itu, teridentifikasi pula beberapa penerima yang ternyata merupakan pejabat RT/RW atau memiliki pekerjaan dan dianggap mampu secara ekonomi.
4. Ketiadaan petunjuk teknis untuk menangani KPM yang meninggal atau pindah alamat. Hal ini sering menimbulkan perubahan data pemesanan dan penyaluran beras, sedangkan beras merupakan sumber pangan yang memiliki risiko kerusakan yang cukup cepat. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga miskin yang sering mengalami perubahan mendadak dalam kondisi sosial-ekonomi.

Berdasarkan empat poin kelemahan di atas, terlihat jelas bahwa implementasi Program Rastrada masih menghadapi tantangan serius yang berakar pada regulasi yang kaku dan tidak adanya petunjuk teknis yang terperinci. Untuk menjawab hal tersebut, peneliti melakukan rangkaian proses penguatan kebijakan berbasis partisipasi. Dimulai dengan menyelenggarakan *Forum Group Discussion (FGD)* yang melibatkan pejabat pelaksana Dinas Sosial, pekerja sosial, petugas kelurahan, dan *stakeholder* lokal untuk mengonfirmasi temuan lapangan dan menggali pengalaman praktis di berbagai wilayah. Dalam FGD ini, peneliti mengidentifikasi titik-titik kritis implementasi dan menampung masukan konkret yang menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Hasil dari FGD, observasi, dan analisis kebijakan yang ada kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun naskah kebijakan yang dilampiri *draft* revisi Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 dan *draft* Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap regulasi yang berlaku, pengujian logis terhadap setiap pasal, serta pengembangan alternatif perbaikan berbasis permasalahan nyata di lapangan.

Sebagai bagian dari proses penguatan rekomendasi, peneliti juga melakukan validasi awal terhadap substansi naskah kebijakan melalui review terbatas dengan narasumber kunci yang sebelumnya terlibat dalam FGD. Proses ini dilakukan secara informal namun terstruktur, dengan mendiskusikan *draft* naskah kebijakan. Peneliti menerima sejumlah masukan terkait redaksional, isi, serta kemungkinan hambatan implementasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diajukan dapat diimplementasikan secara realistis. Validasi ini turut memperkuat posisi peneliti saat membawa dokumen ke tingkat advokasi formal.

Kemudian, naskah kebijakan final memuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)

Revisi Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 menjadi langkah yang penting untuk dilakukan, sebab Peraturan Wali Kota merupakan regulasi dasar program Rastrada. Proses revisi ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kelebihan dan keterbatasan regulasi yang ada, mengkaji pasal maupun ayat yang kurang relevan dengan kondisi di lapangan, hingga hal-hal yang mempengaruhi implementasi program Rastrada. Dengan memperbarui

Peraturan Wali Kota, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan di lapangan.

2. Dinas Sosial sebagai pelaksana utama merancang sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan detail teknis operasional terkait implementasi program Rastrada

Perancangan Standar Operasional Prosedur oleh Dinas Sosial bertujuan untuk menyediakan panduan rinci terkait operasional pelaksanaan program Rastrada. SOP ini akan mencakup tata cara pra hingga pasca, serta dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Dengan adanya SOP, petugas lapangan memiliki acuan yang jelas, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu SOP juga mencakup alur pelaksanaan yang lebih fleksibel, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas program. SOP yang diajukan mencakup prosedur permohonan dan penetapan KPM, prosedur penyaluran Rastrada, pengawasan, pengaduan, prosedur KPM yang meninggal dunia, prosedur sanksi bagi KPM dan petugas, prosedur penanganan situasi darurat dalam penyaluran Rastrada

Sebagai bentuk tindak lanjut, peneliti melaksanakan advokasi kebijakan melalui forum dengar pendapat/ *public hearing* yang bertempat di Dinas Sosial Kota Cimahi. Forum ini dihadiri oleh:

1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Cimahi.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Sosial Kota Cimahi.
3. Penyuluh Hukum Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

4. Perancang Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
5. Jabatan Fungsional Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.
6. Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.

Melalui kegiatan dengar pendapat/ *public hearing*, peneliti mempresentasikan secara utuh hasil temuan di lapangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta menyerahkan naskah kebijakan dan dokumen pendukung secara resmi. Peneliti juga membuka sesi tanya jawab dan diskusi terbuka untuk menampung masukan terakhir sebelum dokumen difinalisasi. Forum tersebut berjalan interaktif dan menghasilkan dukungan kolektif dari seluruh pihak yang hadir, khususnya dari penyuluh hukum dan perancang kebijakan, yang menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti revisi kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 sekaligus perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Dinas Sosial selaku pelaksana utama program Rastrada.

Dokumen-dokumen tersebut telah disampaikan secara resmi kepada para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan terlampir dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang kuat, karena tidak hanya berhenti pada analisis teoritik dan deskriptif, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan secara langsung melalui pendekatan advokasi berbasis data dan partisipatif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) merupakan bentuk kebijakan lokal yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai upaya melengkapi skema perlindungan sosial nasional. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terakomodasi dalam program bantuan dari pemerintah pusat. Melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022, Rastrada dijalankan dengan memberikan bantuan beras secara gratis sebagai pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus penguatan jaminan sosial berbasis lokal. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Rastrada menggunakan enam karakteristik evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

Aspek efektivitas Rastrada dinilai efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan utama program. Bantuan beras yang diberikan secara rutin telah mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat. Program ini juga memberikan rasa aman terhadap pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin yang tidak terjangkau bantuan lainnya. Dari sisi kuantitas, kualitas, serta mekanisme distribusi juga mendapatkan angka kepuasan baik dari penerima manfaat. Aspek efisiensi dinilai sangat efisien, di mana pengelolaan sumber daya manusia, sistem distribusi, indikator waktu, tenaga, dan biaya juga sangat baik. Hanya ditemukan permasalahan teknis saat pengangkutan beras oleh sebagian penerima manfaat.

Aspek kecukupan dinilai cukup, dalam artian telah membantu pemenuhan kebutuhan pangan KPM namun dari segi kuantitas beras yang diterima masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Sebagian besar keluarga tetap harus membeli tambahan beras tambahan, utamanya bagi keluarga yang memiliki jumlah anggota lebih dari empat orang. Aspek kesetaraan dinilai sangat setara. Secara umum, tidak ditemukan kecenderungan diskriminasi dalam jumlah beras yang diterima, proses distribusi, serta layanan yang diberikan oleh petugas. Hanya saja di lapangan masih ditemukan satu orang penerima manfaat yang mendapatkan jumlah beras berbeda.

Aspek responsivitas dinilai responsif, terutama dari sisi layanan petugas di lapangan mampu memberikan layanan secara professional, seperti pemberian informasi, penerimaan hingga tindak lanjut pengaduan atau keluhan dari KPM. Hanya saja secara teknis, masih ditemukan perbedaan prosedur layanan antar kelurahan. Dari sisi penerima manfaat, masih ada sebagian yang belum memahami alur tahapan program, informasi terkait program, maupun prosedur pengaduan. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor lemahnya pemahaman KPM terhadap detail program. Aspek ketepatan dinilai sudah tepat, dilihat dari persyaratan yang sesuai, ketepatan jadwal penyaluran, dan kesesuaian harapan terhadap Rastrada. Namun masih belum sepenuhnya tepat sasaran, karena ditemukan beberapa KPM telah menerima bantuan dari pemerintah pusat, lalu ketua RT/RW setempat dan orang yang memiliki pekerjaan, dalam artian secara ekonomi mampu, tetapi mendapatkan bantuan Rastrada.

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat konsep kemiskinan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan evaluasi kebijakan. Enam karakteristik Dunn terbukti mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan dan tantangan dari implementasi kebijakan. Rastrada sebagai kebijakan lokal juga menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menjadi solusi dalam melengkapi kebijakan nasional. Temuan ini turut memperkaya literatur evaluasi kebijakan publik dalam konteks perlindungan sosial di tingkat daerah serta mendorong pengembangan teori kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya revisi Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah dan perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengatur lebih detail implementasi teknis di lapangan. Temuan penelitian ini telah diadvokasikan kepada para pemangku kebijakan dan menghasilkan naskah kebijakan yang dilampiri dengan *draft* revisi dan juga *draft* SOP. Hasil advokasi kebijakan mendapatkan umpan balik yang positif dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus dipandang sebagai proses terus berjalan. Perbaikan regulasi dan penyusunan SOP hanyalah langkah awal menuju tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan baru setelah diimplementasikan, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa kebijakan tetap relevan, adaptif, dan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Program Beras Sejahtera Daerah bagi keluarga miskin di Kota Cimahi. Maka selanjutnya peneliti mengajukan saran, sebagai berikut:

6.2.1 Saran Guna Laksana

Saran guna laksana merupakan saran dari peneliti yang ditujukan kepada beberapa pihak untuk dapat dijadikan rekomendasi:

1. Pemerintah Daerah Kota Cimahi
 - a. Bidang Hukum dan Perancang Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Cimahi melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah.
 - b. Mendorong penguatan regulasi perlindungan sosial lokal yang adaptif terhadap kondisi masyarakat rentan.
 - c. Mengalokasikan anggaran tambahan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pelaksana program.
 - d. Dinas Sosial Kota Cimahi menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Rastrada sebagai turunan teknis dari Peraturan Wali Kota Cimahi yang sudah direvisi.
2. Seluruh Kelurahan di Kota Cimahi
 - a. Melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria dan sistem baru perankingan.
 - b. Melaksanakan teknis lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

6.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian tidak pernah berhenti pada satu titik akhir, melainkan merupakan proses berkesinambungan yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial. Setiap hasil penelitian tidak hanya dimaknai sebagai kesimpulan, tetapi juga sebagai pijakan awal untuk penelitian-penelitian berikutnya. Dalam konteks penelitian evaluatif terhadap implementasi kebijakan Program Rastrada ini, peneliti menyadari adanya sejumlah keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup wilayah dan responden tertentu, maupun dari keterbatasan waktu dan sumber daya yang memengaruhi kedalaman analisis data.

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap perbaikan kebijakan, penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi. Namun demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum dapat dikatakan tuntas apabila tidak diikuti dengan implementasi dan evaluasi lanjutan. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya dilakukan penelitian lanjutan apabila revisi Peraturan Wali Kota dan perancangan Standar Operasional Prosedur telah diimplementasikan. Penelitian lanjutan tersebut dapat menggunakan model evaluasi *Context, Input, Process, Product (CIPP)* agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai konteks kebijakan, kecukupan sumber daya, kualitas proses implementasi, hasil program, termasuk personalia dan sistem kelembagaan. Dengan demikian, penelitian lanjutan memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas kebijakan daerah serta menjaga relevansi program bantuan sosial. Selain itu, penelitian lanjutan juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan akademik untuk terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E., & Ratih, D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metode Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (III)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazali, S. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute.
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor*. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1.1140>.
- Desrinelti, Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 83–88.
- Dharma, S. (2012). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Ditjen PMPTK, September, 1–54.
- Egy, D., Lamata, S., & Halimatuz, D. (2022). *Program Raskin sebagai Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Proletar di Indonesia*. *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 106–117. <https://doi.org/10.58194/jdmd.v1i2.121>
- GSDRC. (2016). *Social Protection: Topic Guide*. University of Birmingham.
- Hanum, N. (2018). *Pengaruh Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur*. 2(1), 75–84.
- Huruswati, I., Subarisman, M., & Harjanto, H. (2014). *Pengembangan Kebijakan, Strategi, Model* (H. Hikmat (ed.)). Jakarta: Puslitbangkesos.
- ILO. (2017). *World Social Protection Report: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals*. Geneva: ILO.
- Iping. (2020). *Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*. <https://Dinastirev.Org/JMPIS>, 1(2), 516–526.

<https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

- Isman, A. F. (2023). *Kesejahteraan berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat : Analisis pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan Welfare (based on Islamic Philanthropy Empowerment : Analysis Aspect of Economic, Social, Educational, and Health)*. 3(1), 27–36.
- Khaliq, A., & Uspri, B. (2017). *Kemiskinan Multidimensi dan Perlindungan Sosial*. [Http://Journal.Ubm.Ac.Id/](http://Journal.Ubm.Ac.Id/), 13, 107–132.
- Luthfi, M. (2019). *Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB)*. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>.
- Mardikanto. (2019). *Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera*. *Jurnal Ekonomi*, 6–10. <https://silap-online.kesra.jatengprov.go.id/data/download/5>.
- Marjuki, Kardeti, D., & Rusmana, A. (2022). *Pelayanan Sosial Terintegrasi secara Vertikal dan Horizontal dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial.
- Monoarfa, H. (2020). *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*. *Journal of Governance Innovation*.
- Morrisan. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Muryadi, D. (2017). *Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi*. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–16.
- N. Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan) (II)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurdin, Hamdhana, D., & Iqbal, M. (2018). *Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Random Sampling Berbasis Android*. E-Journal Techsi Teknik Informasi, 10(1), 141–154. <https://doi.org/10.29103/techsi.v10i1.622>.
- Retnaningsih, H. (2020). *Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(2), 215–227. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>.
- Risalbi, H. H., Cikusin, Y., & Hayat. (2021). *Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat*. 20(01), 93–105. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135>.
- Rohman, S., Nurlenawati, N., Triadinda, D., , U. (2023). *The Influence Of Viral Marketing And Influencers On The Purchase Decision Of Scarlett Whitening Products In The TikTok Shop Application (Pengaruh Pemasaran Viral Dan Influencer Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Whitening Dalam Aplikasi Tiktok Shop)*. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(5), 7322–7337. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>. Studi Manajemen, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Buana Perjuangan Karawang
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). *Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia*. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>.
- Sjafari, A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (II)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Suryadarma, D., Purnamasari, R., & Febriany, V. (2024). *Rethinking Social Assistance in Indonesia: Integration and Sustainability*. SMERU Research Institute.
- Syaffa, A., Adha, A., & Suseno, S. H. (2020). *Pola Konsumsi Pangan Pokok dan Kontribusinya Terhadap Tingkat Kecukupan Energi Masyarakat Desa Sukadamai (Food Consumption Pattern And Its Contribution to Nutrient Adequacy Ratio of Sukadamai Villagers)*. 2(November), 988–995.
- Taufiq, N. (2024). *Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem*. 895–904.
- Wahyu, R., Ryan, E., & Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan* (U. Kiswanti (ed.)). Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wowiling, V. G., Posumah, H. J., & Londa, V. Y. (2019). *Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera di Kabupaten Minahasa*.
- Yulia, S. (2020). *Kepuasan Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Neglasari Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id



Nomor : 0520/6.1.8/KS.01.03/02/2025 Bandung, 14 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi

**Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No. 1,
Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi 40513**

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Magister di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, mahasiswa:

Nama : Alfira Nur Kusumaningrum
NRP : 23.01.013
Prodi : Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan

Akan menyusun tesis tentang:

“EVALUASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH BAGI KELUARGA MISKIN KOTA CIMAHU (Studi Implementasi Kebijakan Sosial Peraturan Walikota No.25 Tahun 2022”

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan penelitian di wilayah/instansi yang Bapak/Ibu pimpin mulai tanggal **17 Februari s.d 31 Mei 2025**.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Bagian
Administrasi Akademik dan Umum

Dra. Evi Nurhayati, M.Si
NIP. 197011251994032003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Poltekesos Bandung (sebagai laporan)
2. Peninggal



Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

“Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)”

Dengan hormat,

Saya merupakan mahasiswi Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan yang sedang melakukan penelitian tentang evaluasi Program Rastrada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan manfaat program Rastrada.

Partisipasi Anda dalam menjawab kuesioner ini sangat berarti untuk kesuksesan penelitian ini. Identitas beserta jawaban yang Anda berikan, digunakan untuk keperluan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

Saya menyediakan kuesioner yang mudah dipahami dan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk mengisinya. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, Anda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas enumerator.

Petunjuk Pengisian:

1. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan pendapat atau pengalaman Anda, dengan menggunakan skala berikut:
4 = Sangat Sesuai / Selalu
3 = Sesuai / Sering
2 = Kurang Sesuai / Jarang
1 = Tidak Sesuai / Tidak Pernah
 2. Berikan tanda (✓) pada kolom jawaban sesuai dengan pilihan Anda.
 3. Untuk pertanyaan terbuka, tuliskan jawaban pada kolom yang disediakan.
- Atas partisipasi dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Alfira Nur)

Tanggal Survei :
 Nama Responden :
 Kelurahan :
 Jumlah Tanggungan :

No	Pernyataan	4	3	2	1
1	Rastrada membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga saya.				
2	Rastrada mengurangi beban pengeluaran rumah tangga saya.				
3	Dengan adanya Rastrada, uang untuk membeli beras dapat dialihkan untuk kebutuhan pangan lainnya (lauk pauk, sayur).				
4	Rastrada membantu saya menyisihkan uang untuk keperluan lain, seperti sekolah anak atau berobat.				
5	Saya bisa menabung semenjak mendapat bantuan Rastrada.				
6	Saya merasa kondisi ekonomi keluarga saya lebih stabil setelah mendapatkan Rastrada.				
7	Saya memahami tahapan program Rastrada.				
8	Informasi penyaluran diberikan secara jelas dan tidak mendadak.				
9	Saya melakukan interaksi dengan petugas/RT/RW/Puskesmas/Peksos.				
10	Saya belum pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya.				
11	Saya merasa semua penerima manfaat Rastrada di lingkungan saya memang layak mendapat bantuan.				
12	Saya menerima Rastrada setiap tiga bulan.				
13	Proses penyaluran beras dilakukan sesuai jam yang diinformasikan.				
14	Proses pengambilan beras cepat.				
15	Lokasi pengambilan beras dekat dan mudah dijangkau.				
16	Fasilitas pada lokasi nyaman dan memadai.				
17	Proses pengambilan beras mudah.				
18	Bantuan Rastrada tidak menimbulkan beban finansial tambahan bagi saya.				
19	Saya tidak mengeluarkan biaya untuk administrasi.				

20	Satu karung beras cukup untuk kebutuhan keluarga saya dalam satu bulan.				
21	Beras yang diberikan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga saya.				
22	Saya tidak perlu membeli beras tambahan sejak menerima Rastrada.				
23	Setiap penyaluran dibagikan tiga karung beras, per karung berisi 10 kilogram.				
24	Saya tidak kesulitan membawa tiga karung beras sekaligus.				
25	Saat pembagian beras,urut sesuai dengan antrean kedatangan.				
26	Saya merasa sistem antrean dalam pembagian beras sudah adil dan tertib.				
27	Petugas melayani dengan ramah.				
28	Saya diperlakukan dengan baik selama proses penerimaan bantuan.				
29	Jika saya mengalami kendala dalam menerima bantuan, saya tahu kepada siapa harus melapor.				
30	Kendala/keluhan saya ditindaklanjuti dengan baik oleh petugas.				
31	Jika saya berhalangan hadir (seperti sakit, kemalangan, bekerja, atau lainnya) ada solusi yang diberikan oleh petugas.				
32	Saya puas dengan jumlah beras yang diterima dari program Rastrada.				
33	Saya puas dengan kualitas beras yang diberikan dalam program Rastrada.				
34	Saya puas dengan proses dan layanan penyaluran Rastrada.				
35	Ketika Rastrada dihentikan, ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.				
36	Secara keseluruhan program Rastrada sudah sesuai dengan harapan saya.				
37	Apakah Anda berkenan menyampaikan testimoni/pengalaman terkait bantuan Rastrada?				
38	Apakah ada saran/harapan untuk program Rastrada ke depannya?				

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara



SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN

Hal: Permohonan Persetujuan Wawancara

Yth. Saudara Informan

Di tempat

Dengan Hormat,

Perkenalkan nama saya Alfira Nur Kusumaningrum (23.01.013) mahasiswa Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, saat ini melakukan penelitian sebagai syarat untuk mendapatkan gelar M.Tr.Sos. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Beras Sejahtera Daerah di Kota Cimahi. Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan Saudara untuk diwawancarai dengan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan karena tidak ada jawaban benar ataupun salah. Instrumen wawancara ini didesain untuk mengetahui aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

Seluruh informasi yang diperoleh hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian saja dan saya akan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Atas kesediaan Saudara yang telah meluangkan waktu untuk menjadi informan wawancara, saya mengucapkan terima kasih.

Cimahi, 2025

“Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)”

Tanggal Wawancara :

Nama Interviewee :

Jabatan Interviewee :

No	Pertanyaan
I	Efektivitas
1	Apa tujuan utama dari Program Rastrada?
2	Mengapa Program Rastrada sebagai bentuk perlindungan sosial?
3	Siapa saja pihak yang berperan dalam memastikan efektivitas program ini?
4	Kapan terakhir kali dilakukan evaluasi / menilai kepuasan masyarakat?
5	Di mana lokasi atau wilayah yang menunjukkan keberhasilan paling tinggi dalam implementasi Program Rastrada? Apa faktor yang mendukung?
6	Bagaimana cara mengukur keberhasilan Program Rastrada dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat?
II	Efisiensi
7	Apa saja sumber daya (anggaran, SDM, waktu) yang digunakan dalam implementasi Program Rastrada?
8	Mengapa penting untuk memastikan program ini berjalan secara efisien?
9	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran bantuan?
10	Kapan terakhir dilakukan evaluasi efisiensi terkait penggunaan sumber daya dalam program ini?
11	Di mana titik distribusi atau proses dalam program ini yang pernah mengalami kendala efisiensi? Bagaimana cara mengatasinya?
12	Bagaimana strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan Program Rastrada tanpa mengurangi kualitas bantuan?
III	Kecukupan
13	Apakah jumlah bantuan Rastrada sudah mencukupi kebutuhan dasar penerima manfaat?
14	Mengapa jumlah bantuan ini ditetapkan seperti ini? Berdasarkan apa?

15	Siapa yang menentukan jumlah dan cakupan bantuan dalam kebijakan ini?
16	Kapan pernah dilakukan evaluasi terkait kecukupan bantuan?
17	Di mana lokasi pernah ada keluhan terkait jumlah bantuan Rastrada kurang mencukupi kebutuhan mereka?
18	Bagaimana mekanisme penyesuaian jumlah bantuan agar tetap relevan dengan kebutuhan penerima manfaat?
IV	Kesetaraan
19	Apa yang menjadi standar pemerataan dalam distribusi Program Rastrada?
20	Mengapa penting memastikan distribusi bantuan dilakukan secara setara?
21	Siapa yang bertanggung jawab memastikan pemerataan distribusi bantuan?
22	Kapan ada laporan tentang ketimpangan dalam proses distribusi bantuan?
23	Di mana wilayah yang paling banyak masyarakat miskin belum tersentuh bantuan Rastrada? Apa faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut?
24	Bagaimana mekanisme pemerintah dalam memastikan bantuan tersebar secara adil?
V	Responsivitas
25	Apa saja keluhan atau aduan yang pernah diterima terkait Rastrada?
26	Mengapa respons cepat terhadap keluhan penerima manfaat penting dalam program ini?
27	Siapa yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan atau keluhan masyarakat terkait Program Rastrada?
28	Kapan terakhir kali ada pengaduan dari masyarakat terkait Program Rastrada? Bagaimana tindak lanjutnya?
29	Di mana penerima manfaat menyampaikan kendala atau aduan?
30	Bagaimana sistem pengaduan yang tersedia? Apakah mudah diakses oleh masyarakat miskin?
VI	Ketepatan
31	Apa kriteria penerima manfaat yang ditetapkan dalam kebijakan Program Rastrada?

32	Mengapa penting memastikan bahwa bantuan ini diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan?
33	Siapa yang menentukan daftar penerima manfaat dalam program ini?
34	Kapan dilakukan verifikasi validasi data untuk memastikan penerima manfaat layak mendapatkan bantuan?
35	Di mana saja ditemukan kasus penerima manfaat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi mendapatkan bantuan? Bagaimana solusinya?
36	Bagaimana cara memastikan bahwa program ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan?
VII	Rekomendasi
37	Apakah ada saran atau rekomendasi agar Program Rastrada lebih optimal?
38	Mengapa rekomendasi ini penting untuk diterapkan dalam kebijakan mendatang?
39	Siapa pihak yang paling tepat untuk menyampaikan advokasi kebijakan?
40	Kapan waktu yang tepat untuk melakukan advokasi kebijakan?
41	Di mana advokasi kebijakan bisa dilaksanakan?
42	Bagaimana strategi advokasi yang efektif untuk menyampaikan hasil evaluasi Program Rastrada ini?

Catatan Interviewer :

Lampiran 4: Pedoman Studi Dokumen

PEDOMAN STUDI DOKUMEN PENELITIAN EVALUASI BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA CIMAHI

A. Tujuan Studi Dokumen

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai jenis dokumentasi yang relevan. Adapun tujuan dalam pelaksanaan studi dokumen ini sebagai berikut:

1. Mempermudah pencarian informasi untuk mengetahui karakteristik Kota Cimahi dan penduduknya
2. Sebagai informasi tambahan yang telah didapatkan dari teknik lain
3. Menjadi alat pendukung untuk memahami dasar hukum hingga implementasi kebijakan Rastrada

B. Jenis Dokumen yang diperlukan

No	Komponen	Jenis Dokumen
1	Deskripsi Kebijakan Rastrada <ul style="list-style-type: none">- Definisi Beras Sejahtera Daerah- Tim penyelenggara Rastrada- Anggaran Rastrada- Syarat penerima Rastrada- Alur dan aturan pelaksanaan- Daftar penerima manfaat	Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Wali Kota
2	Karakteristik Kota Cimahi <ul style="list-style-type: none">- Sejarah Kota Cimahi- Letak Geografis- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin- Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Profil Kota Cimahi dan Website Open Data Cimahi Kota Tahun 2024

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Miskin - Jumlah Pengangguran - Jenis Bantuan Sosial 	
3	<p>Implementasi Kebijakan Rastrada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alur pelaksanaan di lapangan - Daftar penerima manfaat - MoU pihak ketiga - Berkas penandatanganan KPM - Berita acara serah terima - Berita acara pelaksanaan - Lampiran berkas fotokopi KK dan KTP penerima manfaat 	Arsip dokumen Dinas Sosial dan arsip setiap kelurahan
4	Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu 2. Jurnal penelitian yang relevan 3. Buku referensi 4. Foto 5. Rekaman

Lampiran 5 : Perhitungan Rekapitulasi

1. Aspek Efektivitas

Responden	Item Pernyataan Aspek : EFEKTIVITAS										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	3	3	2	3	2	3	1	3	3	27
2	3	4	3	3	1	1	4	2	4	3	28
3	3	3	3	4	2	1	3	3	3	3	28
4	3	3	2	3	1	1	3	4	4	4	28
5	4	4	3	4	2	1	4	4	3	4	33
6	4	4	1	1	1	1	3	3	3	2	23
7	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	27
8	3	3	3	2	1	2	3	3	3	3	26
9	3	3	3	2	1	2	4	4	4	3	29
10	3	3	3	2	1	2	3	1	3	3	24
11	3	3	3	3	2	2	4	2	3	3	28
12	3	3	3	4	1	3	3	2	4	3	29
13	3	3	2	3	1	3	3	2	4	3	27
14	3	3	3	3	1	1	3	3	4	3	27
15	4	3	4	4	1	1	3	4	4	4	32
16	3	4	2	3	1	1	3	4	4	4	29
17	4	4	3	3	1	2	4	3	3	3	30
18	3	3	3	1	1	2	4	3	3	3	26
19	4	4	3	2	1	2	4	3	4	3	30
20	4	3	3	2	1	2	4	3	3	4	29
21	4	4	3	3	3	2	2	3	4	3	31
22	3	3	3	2	2	2	4	3	3	3	28
23	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	27
24	3	3	2	2	1	3	4	3	3	3	27
25	3	3	3	2	2	1	2	3	4	2	25
26	4	4	4	2	3	3	2	4	4	4	34
27	3	2	2	2	1	1	2	1	3	2	19
28	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	29
29	3	3	3	2	1	3	4	3	3	3	28
30	3	3	3	2	1	2	4	3	3	3	27
31	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	27
32	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	29
33	3	2	3	2	2	3	4	3	3	3	28
34	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	29

35	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	28
36	3	3	3	2	1	2	4	3	3	3	27
37	2	3	2	2	1	3	3	3	3	3	25
38	3	3	3	2	1	2	4	3	3	3	27
39	3	3	3	2	1	2	4	3	3	3	27
40	3	3	3	2	1	2	4	3	3	3	27
41	4	4	3	1	2	2	3	4	4	3	30
42	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	31
43	4	4	4	3	2	2	3	3	3	3	31
44	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	30
45	4	4	4	3	1	1	3	2	4	3	29
46	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	33
47	4	4	1	3	1	3	3	3	3	3	28
48	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	36
49	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
50	4	4	3	3	4	3	3	2	3	3	32
51	4	4	3	3	2	3	4	4	3	4	34
52	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	37
53	4	4	4	3	2	3	4	3	3	3	33
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	36
56	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	36
57	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4	36
58	4	4	4	3	2	3	4	4	2	3	33
59	3	2	3	2	2	3	4	3	3	3	28
60	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	36
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
62	4	4	4	3	2	3	4	3	4	3	34
63	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	37
64	4	4	3	3	1	2	3	3	3	3	29
65	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	27
66	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	30
67	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
69	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	33
70	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	36
71	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	35
72	4	4	3	3	2	2	3	3	4	3	31
73	4	4	4	4	2	2	3	4	4	3	34

74	4	3	2	3	1	2	3	2	4	3	27
75	4	4	3	4	1	2	3	2	4	3	30
76	2	2	3	2	1	1	3	2	4	3	23
77	3	3	2	4	2	2	2	2	3	3	26
78	3	3	4	4	1	1	2	3	3	3	27
79	4	4	3	3	1	1	3	3	3	3	28
80	3	3	2	3	2	1	2	2	3	4	25
81	2	2	2	3	1	1	2	1	3	3	20
82	4	4	4	2	2	2	3	4	4	4	33
83	3	3	3	2	1	1	2	2	4	4	25
84	4	4	3	3	2	2	3	4	4	4	33
85	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	30
86	3	4	3	3	1	2	3	3	3	3	28
87	4	4	4	4	1	1	3	4	4	4	33
88	4	4	4	3	2	2	3	3	4	3	32
89	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	31
90	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	30
91	3	3	3	2	1	3	4	4	4	4	31
92	3	3	3	2	1	2	3	3	2	3	25
93	3	3	2	3	1	2	4	3	3	3	27
94	3	2	3	2	1	2	4	3	3	3	26
95	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
96	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	28
97	3	4	3	3	2	2	3	4	3	3	30
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
99	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	27
100	4	4	3	3	1	1	3	2	4	3	28
TOTAL	337	333	308	275	178	235	334	303	338	322	2963

2. Aspek Efisiensi

Responden	Item Pernyataan Aspek : EFISIENSI							Jumlah
	11	12	13	14	15	16	17	
1	3	3	3	3	3	4	4	23
2	3	4	4	4	3	4	4	26
3	3	4	4	3	3	3	4	24
4	4	4	4	3	1	4	4	24
5	4	4	3	4	1	4	4	24
6	3	3	3	3	2	3	4	21
7	4	4	3	3	4	3	4	25
8	3	4	3	3	3	4	3	23
9	4	4	3	3	4	3	4	25
10	4	3	3	3	3	3	4	23
11	2	3	3	3	2	2	3	18
12	3	3	3	3	3	2	4	21
13	3	2	3	3	2	2	4	19
14	3	3	3	3	3	2	4	21
15	4	4	2	3	4	4	4	25
16	3	3	3	3	2	2	4	20
17	3	4	3	4	3	4	4	25
18	3	3	4	4	3	4	4	25
19	4	4	3	3	4	3	4	25
20	3	3	3	3	2	3	3	20
21	3	3	2	3	2	1	4	18
22	4	4	3	3	4	4	4	26
23	4	4	3	3	2	3	3	22
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	2	2	4	3	4	4	3	22
26	4	4	4	4	1	1	3	21
27	3	2	4	3	2	2	3	19
28	4	4	3	3	4	3	4	25
29	4	3	3	2	2	4	4	22
30	4	4	3	3	4	3	4	25
31	3	4	3	3	3	4	4	24
32	4	3	3	3	4	3	3	23
33	4	4	3	3	3	3	4	24
34	4	4	3	3	4	3	3	24
35	4	3	3	3	3	3	4	23
36	3	3	3	3	4	3	3	22

37	3	4	3	3	4	3	4	24
38	4	3	3	3	2	2	4	21
39	3	4	3	3	3	4	4	24
40	4	4	3	3	2	3	3	22
41	2	2	2	3	2	2	3	16
42	3	3	3	4	4	4	3	24
43	3	3	3	3	2	2	4	20
44	3	3	3	4	3	2	4	22
45	3	3	2	3	2	2	3	18
46	2	3	3	4	4	4	4	24
47	4	4	3	3	3	1	4	22
48	4	4	3	4	4	4	3	26
49	4	3	4	4	4	4	4	27
50	3	3	3	3	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	4	4	4	4	4	28
59	4	3	4	4	4	4	4	27
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	4	4	4	4	3	4	27
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	3	3	2	4	4	4	3	23
65	4	3	4	4	4	4	4	27
66	4	3	3	4	4	4	4	26
67	4	3	4	4	3	4	4	26
68	3	3	4	4	4	4	4	26
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	4	4	3	4	3	4	4	26
72	3	4	3	3	3	4	4	24
73	3	4	3	4	2	2	4	22
74	3	2	3	3	3	2	4	20
75	4	3	3	3	4	4	4	25

76	3	2	3	3	3	4	4	22
77	2	3	2	4	2	1	4	18
78	3	3	2	3	3	2	4	20
79	4	4	3	4	3	2	3	23
80	3	4	2	3	2	1	4	19
81	3	2	2	3	1	1	3	15
82	2	3	2	4	1	2	3	17
83	3	3	2	3	3	2	3	19
84	3	3	2	3	1	1	3	16
85	4	4	3	4	3	3	4	25
86	3	3	3	3	1	2	3	18
87	3	3	3	3	2	2	3	19
88	2	3	3	4	3	2	3	20
89	2	3	3	3	3	3	3	20
90	3	3	4	4	4	4	4	26
91	4	4	4	4	4	3	4	27
92	3	3	3	3	3	3	3	21
93	4	3	3	3	4	2	4	23
94	4	4	3	3	3	2	3	22
95	4	3	4	4	4	4	4	27
96	4	3	3	4	3	4	4	25
97	4	3	3	4	3	4	4	25
98	4	2	4	3	3	3	4	23
99	3	4	3	4	4	4	4	26
100	3	2	4	3	4	4	4	24
TOTAL	343	337	319	342	311	311	372	2335

3. Aspek Kecukupan

Responden	Item Pernyataan Aspek : KECUKUPAN				Jumlah
	18	19	20	21	
1	1	2	1	4	8
2	2	3	2	3	10
3	4	3	3	4	14
4	4	2	4	4	14
5	4	3	4	4	15
6	4	3	4	4	15
7	2	2	2	2	8
8	2	2	2	1	7
9	2	2	2	2	8
10	2	1	1	4	8
11	2	3	2	3	10
12	2	4	2	3	11
13	2	1	2	3	8
14	3	3	3	3	12
15	3	3	4	3	13
16	4	2	4	3	13
17	3	3	3	2	11
18	3	3	3	3	12
19	2	3	2	2	9
20	3	2	3	3	11
21	3	3	3	3	12
22	2	2	2	2	8
23	3	2	3	3	11
24	2	2	2	2	8
25	3	3	3	2	11
26	4	2	4	4	14
27	1	1	1	1	4
28	2	3	2	2	9
29	3	3	3	3	12
30	2	3	2	2	9
31	2	3	2	2	9
32	2	2	2	2	8
33	2	3	2	2	9
34	3	3	3	3	12

35	3	3	3	2	11
36	3	2	3	3	11
37	2	3	2	2	9
38	2	3	2	2	9
39	2	3	2	2	9
40	2	2	2	2	8
41	4	2	4	4	14
42	3	4	3	3	13
43	3	2	3	3	11
44	3	3	3	3	12
45	2	2	2	2	8
46	4	3	4	4	15
47	3	2	3	4	12
48	3	3	3	3	12
49	3	2	3	3	11
50	2	2	2	2	8
51	3	2	3	3	11
52	4	3	3	3	13
53	4	3	3	3	13
54	3	3	3	3	12
55	3	3	3	4	13
56	3	3	2	3	11
57	4	3	3	4	14
58	3	3	3	4	13
59	3	2	2	2	9
60	3	3	3	3	12
61	3	3	3	4	13
62	3	3	3	3	12
63	3	3	3	3	12
64	3	3	2	2	10
65	3	2	3	3	11
66	3	2	3	2	10
67	3	3	3	3	12
68	3	4	3	3	13
69	3	3	3	3	12
70	3	3	3	3	12
71	4	2	4	4	14
72	3	2	3	2	10
73	4	1	4	3	12

74	2	2	1	1	6
75	2	3	2	2	9
76	2	1	2	2	7
77	2	3	2	2	9
78	3	3	3	2	11
79	3	3	2	2	10
80	3	2	2	3	10
81	2	1	1	1	5
82	4	2	4	3	13
83	2	2	1	1	6
84	3	2	4	3	12
85	3	3	2	2	10
86	3	1	3	3	10
87	4	2	4	4	14
88	3	3	3	3	12
89	4	3	4	3	14
90	3	3	3	2	11
91	3	3	3	2	11
92	3	3	2	2	10
93	2	3	1	1	7
94	2	2	2	2	8
95	3	2	3	3	11
96	3	2	3	3	11
97	3	2	3	3	11
98	2	1	2	2	7
99	3	3	3	3	12
100	2	2	3	2	9
TOTAL	280	250	267	269	1066

4. Aspek Kesetaraan

Responden	Item Pernyataan Aspek : KESETARAAN					Jumlah
	22	23	24	25	26	
1	4	3	3	3	3	16
2	4	3	3	4	4	18
3	4	3	3	4	4	18
4	4	3	3	3	3	16
5	4	3	3	3	3	16
6	2	3	3	4	3	15
7	3	3	3	4	3	16
8	4	3	3	4	3	17
9	4	3	3	3	3	16
10	4	3	3	3	3	16
11	4	3	3	4	3	17
12	4	3	3	4	4	18
13	4	3	3	4	4	18
14	4	3	3	3	3	16
15	4	3	3	3	3	16
16	4	4	3	3	3	17
17	3	3	4	4	4	18
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	3	3	4	18
20	3	3	3	4	3	16
21	4	3	3	3	3	16
22	4	3	3	3	4	17
23	3	3	3	4	3	16
24	3	3	3	3	3	15
25	3	2	2	3	3	13
26	4	2	3	4	4	17
27	3	2	3	2	3	13
28	4	4	3	4	3	18
29	3	3	4	4	3	17
30	3	3	4	4	3	17
31	3	3	3	4	3	16
32	3	3	3	3	4	16
33	3	4	3	3	4	17
34	3	3	3	4	4	17

35	3	4	3	3	3	16
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	4	4	3	3	3	17
39	3	3	3	3	4	16
40	3	3	3	3	3	15
41	4	2	3	3	3	15
42	4	3	3	3	3	16
43	4	3	3	3	3	16
44	4	3	4	3	3	17
45	4	2	3	3	3	15
46	4	2	3	3	3	15
47	4	4	3	3	3	17
48	3	3	4	4	4	18
49	4	4	4	4	3	19
50	4	3	3	3	3	16
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	4	3	4	4	3	18
54	4	4	4	4	3	19
55	4	4	3	3	3	17
56	4	3	4	4	3	18
57	4	3	3	4	3	17
58	4	4	3	4	3	18
59	4	4	3	4	4	19
60	4	3	3	4	3	17
61	4	3	3	4	3	17
62	4	3	3	4	3	17
63	4	4	4	4	3	19
64	4	3	3	4	3	17
65	3	4	4	3	3	17
66	4	4	4	4	3	19
67	4	4	4	4	3	19
68	4	3	4	4	4	19
69	4	4	3	4	3	18
70	4	4	3	4	3	18
71	4	3	3	4	4	18
72	4	4	4	4	4	20
73	4	2	3	3	3	15

74	4	2	2	3	3	14
75	4	3	3	4	4	18
76	4	2	2	3	3	14
77	4	2	3	3	3	15
78	4	3	3	3	4	17
79	3	2	3	4	4	16
80	3	2	2	3	3	13
81	4	2	2	4	4	16
82	4	2	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	15
84	4	2	3	4	4	17
85	3	3	3	4	4	17
86	4	2	2	4	4	16
87	4	2	3	4	4	17
88	4	3	3	3	3	16
89	3	3	3	3	3	15
90	3	3	3	4	4	17
91	3	4	4	3	3	17
92	4	4	4	3	2	17
93	3	4	3	3	3	16
94	3	3	3	3	3	15
95	4	4	4	4	3	19
96	3	3	3	3	4	16
97	4	4	4	3	3	18
98	3	3	3	4	3	16
99	4	3	3	3	2	15
100	4	3	3	3	2	15
TOTAL	367	310	316	349	327	1669

5. Aspek Responsivitas

Responden	Item Pernyataan Aspek : RESPONSIVITAS						Jumlah
	27	28	29	30	31	32	
1	3	3	3	3	3	2	17
2	3	4	2	3	3	3	18
3	3	3	3	2	3	4	18
4	1	4	3	3	3	4	18
5	2	3	3	2	3	4	17
6	1	2	3	1	2	2	11
7	2	4	2	3	3	3	17
8	2	4	2	3	3	3	17
9	2	4	3	3	3	3	18
10	2	2	3	3	3	3	16
11	2	2	4	3	3	4	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	4	4	2	3	2	18
14	2	2	3	2	3	4	16
15	4	2	2	3	3	3	17
16	2	3	3	4	4	3	19
17	2	3	2	3	3	3	16
18	2	3	2	3	3	3	16
19	3	4	2	3	3	3	18
20	2	3	1	2	3	3	14
21	3	3	2	3	3	2	16
22	3	4	2	3	3	3	18
23	2	3	2	3	3	4	17
24	2	3	2	3	3	3	16
25	1	2	2	2	4	1	12
26	4	4	4	4	4	2	22
27	1	2	2	2	3	2	12
28	3	4	3	3	3	3	19
29	2	4	2	3	3	3	17
30	2	4	2	3	3	3	17
31	3	4	2	3	3	3	18
32	3	4	2	3	3	3	18
33	2	4	2	3	3	3	17
34	3	4	3	3	3	3	19

35	2	4	2	3	3	3	17
36	2	3	2	3	3	3	16
37	3	3	2	3	3	3	17
38	3	4	2	4	3	3	19
39	3	4	2	3	3	3	18
40	3	4	2	3	3	3	18
41	2	3	2	2	3	2	14
42	4	4	3	4	4	2	21
43	3	3	2	3	3	3	17
44	3	3	3	3	3	3	18
45	1	3	2	2	3	2	13
46	4	3	2	4	4	3	20
47	3	4	4	3	3	2	19
48	3	4	4	3	3	4	21
49	3	4	4	3	4	3	21
50	3	2	3	3	3	3	17
51	3	4	2	4	4	4	21
52	3	4	4	4	4	3	22
53	3	4	4	3	4	3	21
54	3	4	4	3	3	4	21
55	3	4	4	3	3	3	20
56	3	4	4	3	4	4	22
57	3	4	4	3	4	3	21
58	3	4	4	4	3	4	22
59	3	4	3	4	4	3	21
60	3	4	4	4	3	3	21
61	3	4	4	3	3	3	20
62	3	4	4	3	3	4	21
63	3	4	4	3	3	4	21
64	3	3	2	3	3	3	17
65	3	4	4	4	3	4	22
66	3	4	3	3	4	4	21
67	3	4	3	3	3	4	20
68	3	4	3	4	4	3	21
69	3	4	4	3	3	4	21
70	3	4	4	4	3	4	22
71	1	2	3	4	4	1	15
72	2	2	3	3	4	2	16
73	1	3	3	3	3	2	15

74	1	3	3	2	4	1	14
75	2	3	2	3	3	2	15
76	2	3	2	2	3	2	14
77	3	2	3	4	3	3	18
78	3	2	2	3	3	3	16
79	2	3	3	4	4	2	18
80	1	2	2	2	3	2	12
81	2	2	2	2	3	2	13
82	2	2	2	3	4	3	16
83	3	2	2	3	3	3	16
84	2	3	3	3	3	2	16
85	3	3	3	4	4	4	21
86	3	3	2	4	4	2	18
87	1	2	2	2	3	3	13
88	3	3	3	3	3	2	17
89	3	2	2	3	3	3	16
90	4	3	4	4	4	4	23
91	2	4	3	3	3	3	18
92	3	3	2	3	3	3	17
93	3	3	2	3	3	3	17
94	3	3	2	2	3	3	16
95	4	4	3	3	4	4	22
96	3	4	3	4	4	3	21
97	3	4	3	3	4	4	21
98	3	1	4	3	3	3	17
99	4	4	4	4	3	3	22
100	1	2	2	3	3	4	15
TOTAL	258	327	277	304	324	297	1787

6. Aspek Ketepatan

Responden	Item Pernyataan Aspek : KETEPATAN				Jumlah
	33	34	35	36	
1	4	3	3	2	12
2	4	3	3	3	13
3	4	4	4	3	15
4	4	4	3	3	14
5	3	4	4	3	14
6	4	4	3	3	14
7	3	3	3	3	12
8	3	2	3	3	11
9	4	2	3	3	12
10	4	3	4	2	13
11	4	3	3	3	13
12	4	3	3	3	13
13	4	2	3	3	12
14	3	3	3	3	12
15	4	3	3	3	13
16	1	3	4	2	10
17	3	2	3	4	12
18	3	2	3	3	11
19	3	2	3	3	11
20	4	2	3	3	12
21	4	3	4	3	14
22	3	2	4	3	12
23	3	2	3	3	11
24	3	2	3	3	11
25	4	1	4	3	12
26	4	2	3	4	13
27	3	2	3	2	10
28	3	2	3	3	11
29	3	2	3	3	11
30	3	2	3	3	11
31	4	2	3	3	12
32	3	2	3	3	11
33	3	2	3	3	11
34	3	2	3	3	11

35	3	2	3	3	11
36	3	2	3	3	11
37	3	2	3	3	11
38	3	2	3	2	10
39	3	2	3	3	11
40	4	2	3	3	12
41	3	1	4	4	12
42	4	4	4	4	16
43	4	1	3	3	11
44	4	2	3	3	12
45	3	1	3	2	9
46	4	3	4	3	14
47	4	3	4	3	14
48	3	3	3	4	13
49	4	3	4	4	15
50	3	3	4	4	14
51	3	4	4	4	15
52	3	3	3	3	12
53	3	3	3	4	13
54	3	3	4	3	13
55	3	3	4	4	14
56	3	3	4	3	13
57	3	3	4	3	13
58	3	3	4	3	13
59	3	3	4	3	13
60	3	3	4	3	13
61	3	3	4	4	14
62	3	3	4	4	14
63	3	3	4	4	14
64	3	4	4	3	14
65	3	3	4	3	13
66	3	4	4	3	14
67	3	3	4	3	13
68	1	3	4	3	11
69	3	3	4	3	13
70	3	3	4	3	13
71	4	4	3	4	15
72	4	3	4	3	14
73	4	4	3	3	14

74	4	3	3	2	12
75	4	4	3	3	14
76	1	3	3	2	9
77	4	3	3	3	13
78	4	4	4	4	16
79	3	4	4	3	14
80	3	3	3	3	12
81	4	4	4	3	15
82	3	3	4	4	14
83	4	4	4	3	15
84	3	4	3	3	13
85	4	3	3	3	13
86	3	3	4	3	13
87	3	3	4	4	14
88	4	4	3	3	14
89	4	3	3	4	14
90	4	3	3	3	13
91	4	2	3	3	12
92	4	3	3	3	13
93	4	2	3	3	12
94	4	2	3	3	12
95	4	4	4	3	15
96	3	3	4	3	13
97	4	3	3	4	14
98	4	3	3	3	13
99	4	3	4	3	14
100	3	4	4	3	14
TOTAL	338	282	343	311	1274

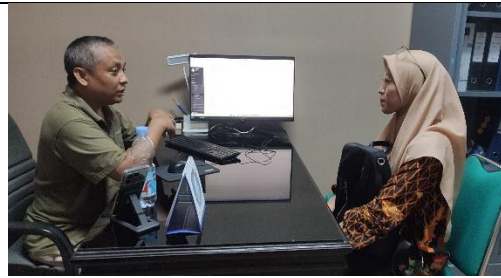
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan



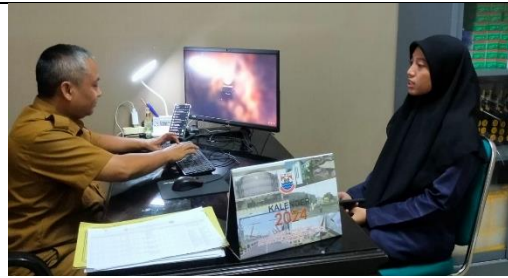
Gambar 1. Perizinan dan Penerimaan



Gambar 2. FGD Dinas Sosial



Gambar 3. Wawancara Kabid



Gambar 4. Wawancara Kabid



Gambar 5. Wawancara Bid.Linjamsos



Gambar 6. Wawancara Pekerja Sosial



Gambar 7. Wawancara Pekerja Sosial



Gambar 8. Wawancara Pekerja Sosial



Gambar 9. Wawancara Puskesmas



Gambar 10. Wawancara Puskesmas



Gambar 11. FGD Puskesmas & Enum



Gambar 12. FGD Penerima Manfaat



Gambar 13. Uji Coba Kuesioner



Gambar 14. Uji Coba Kuesioner



Gambar 15. Uji Coba Kuesioner



Gambar 16. Pengumpulan Data



Gambar 17. Pengambilan Data



Gambar 18. Pengambilan Data



Gambar 19. Pengambilan Data



Gambar 20. Pengambilan Data



Gambar 21. Pengambilan Data



Gambar 22. Pengambilan Data



Gambar 23. Pendampingan Enum



Gambar 24. Penerimaan Souvenir



Gambar 25. Koordinasi Persiapan



Gambar 26. Uji Petik ke Bulog



Gambar 27. Cek Kuantitas & Kualitas



Gambar 28. Proses Pengiriman



Gambar 29. Penyerahan ke Kelurahan



Gambar 30. Distribusi Melong



Gambar 31. Distribusi Melong



Gambar 32. Distribusi Cigugur

	
<p>Gambar 33. Distribusi Cigugur</p>	<p>Gambar 34. <i>Home Visit</i> (Sakit)</p>
	
<p>Gambar 35. <i>Home Visit</i> (Lansia)</p>	<p>Gambar 36. Evaluasi Penyaluran</p>
	
<p>Gambar 37. Proses Bimbingan</p>	<p>Gambar 38. Proses Bimbingan</p>
	
<p>Gambar 39. <i>Public Hearing</i></p>	<p>Gambar 40. <i>Public Hearing</i></p>

Lampiran 7 : Naskah Kebijakan



POLICY PAPER

Membedah Dinamika Implementasi Rastrada: Enam Dimensi Evaluasi Kebijakan di Tingkat Lokal



Disusun Oleh :
Alfira Nur Kusumaningrum
(NRP. 23.01.013)

Dosen Pembimbing :
Dwi Yuliani, M.Si., Ph.D
Drs. Dede Kuswanda, Ph.D

Program Studi Pekerjaan Sosial
Program Magister Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung 2024

Pesan Kunci :

- Pemerintah Kota Cimahi telah meluncurkan Program Rastrada sebagai upaya perlindungan sosial untuk keluarga miskin.
- Evaluasi berbasis enam karakteristik kebijakan William N. Dunn menunjukkan adanya kekuatan sekaligus kelemahan dalam implementasinya.
- Rekomendasi yang telah diadvokasikan kepada pemerintah daerah Kota Cimahi : (1) Melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota No.25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah (2) Dinas Sosial sebagai pelaksana utama merancang sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan detail teknis operasional terkait implementasi program Rastrada.

Apa itu Rastrada?

Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) merupakan inovasi pemerintah daerah kota Cimahi yang dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Program ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2019, namun kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 sebagai regulasi dasar program Rastrada disahkan pada tahun 2022.

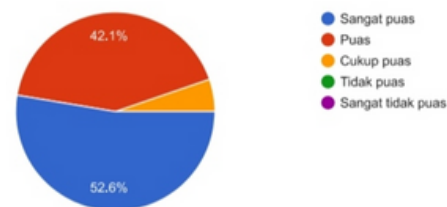
Program Rastrada bertujuan untuk melengkapi program nasional. Rastrada menyediakan bantuan berupa 10 kilogram beras kualitas premium setiap bulan kepada masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial yang belum terakomodasi bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS. Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan atau empat termin dalam setahun. Rastrada diberikan secara gratis, sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Mengapa bantuan Rastrada berupa Beras?

Pangan menjadi salah satu aspek kebutuhan dasar utama manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia, dengan total konsumsi mencapai 35,3 juta metrik ton sepanjang tahun 2023. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan bahwa 98,35% rumah tangga di Indonesia masih mengandalkan beras sebagai bahan makanan utama, dengan rata-rata konsumsi 6,6 kilogram per kapita setiap bulan di tahun 2023. Lebih detail, menurut BPS, konsumsi beras di Kota Cimahi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.163 kilogram per minggu berdasarkan kelompok konsumsi padi-padian di tingkat kabupaten/kota.

Keberhasilan Rastrada

Pada akhir tahun 2023, Rastrada berhasil menjangkau sebanyak 5.703 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian pada tahun 2024, ditingkatkan menjadi 150 KPM dengan total 15 kelurahan, sehingga setiap termin kurang lebih 2.250 KPM menerima bantuan Rastrada. Apabila diakumulasikan dalam empat termin penyaluran, maka total yang telah disalurkan kurang lebih kepada 9.000 penerima. Angka ini menunjukkan peningkatan cakupan yang signifikan, sekaligus menegaskan simbol komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di tingkat lokal. Diperkuat dengan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada akhir tahun 2024 bahwa Rastrada mendapat nilai tertinggi dengan 99,17 kategori unggul. Serta hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni 94,7% masyarakat merasa puas dan sangat puas terhadap Rastrada.

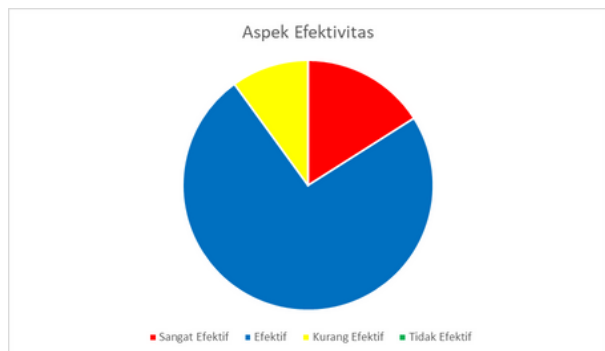


Pentingnya Evaluasi Rastrada

Evaluasi kebijakan berperan penting untuk mengidentifikasi apakah tujuan program tercapai, mengetahui hambatan yang ada dalam implementasi, serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Program Rastrada dinilai memiliki banyak dampak positif dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa isu permasalahan yang terjadi. Melalui evaluasi kebijakan dengan menggunakan enam karakteristik dari William N. Dunn sebagai kerangka untuk menilai kebijakan ini memberikan landasan yang lebih jelas dan sistematis.

Aspek Efektivitas

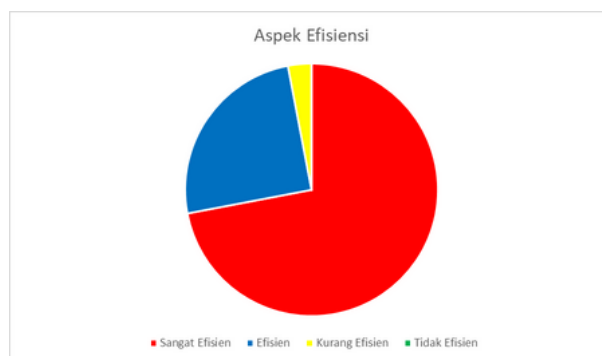
Efektivitas dalam hal ini mengacu pada sejauh mana suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari kebijakan. Aspek efektivitas yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu kebermanfaatan bantuan dan kepuasan terhadap bantuan. Berdasarkan rekapitulasi skor individu, sebanyak 74 persen responden berada dalam kategori efektif, 16 persen dalam kategori sangat efektif, dan 10 persen kurang efektif.



Skor yang paling tinggi muncul dari pernyataan kepuasan KPM terhadap kualitas Rastrada, dan Rastrada membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga KPM. Keduanya menunjukkan bahwa bantuan pangan yang diberikan berhasil menjangkau kebutuhan pokok KPM. Namun, pernyataan dengan skor terendah adalah KPM bisa menabung sejak mendapatkan Rastrada Mayoritas responden menjawab tidak pernah atau jarang, menandakan bahwa bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi KPM yang mayoritas berpenghasilan rendah atau tidak bekerja, sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Aspek Efisiensi

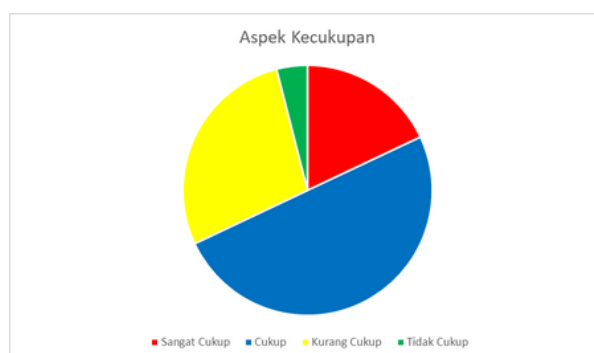
Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Aspek efisiensi yang di dalamnya memuat tiga indikator yaitu waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan rekapitulasi skor individu, sebanyak 72 persen responden berada dalam kategori sangat efisien, 25 persen dalam kategori efisien, dan 3 persen kurang efisien.



Skor yang paling tinggi muncul dari pernyataan bantuan Rastrada tidak ada biaya administrasi. Menunjukkan bahwa memang benar Rastrada diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun, terdapat dua pernyataan dengan skor terendah yaitu dalam pengambilan Rastrada ada beban finansial tambahan dan kesulitan KPM membawa tiga karung beras sekaligus. Beban finansial tambahan yang dimaksud adalah ongkos untuk membawa beras dari kelurahan sampai ke rumah, mengingat beberapa kelurahan di Cimahi memiliki wilayah geografis yang cukup luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat indikator efisiensi yang belum maksimal.

Aspek Kecukupan

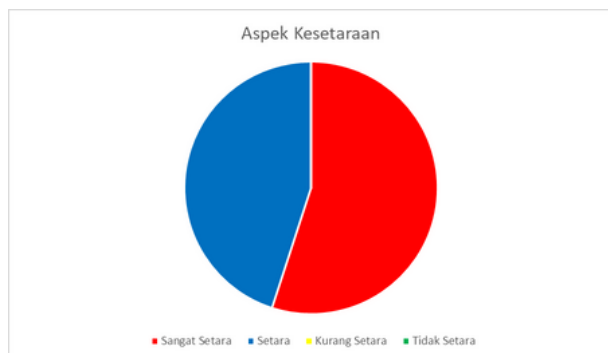
Kecukupan menggambarkan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang melatar belakangi munculnya suatu masalah. Aspek kecukupan yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu pemenuhan kebutuhan KPM dan kecukupan jumlah bantuan. Berdasarkan rekapitulasi skor individu, sebanyak 50 persen responden berada dalam kategori cukup, 28 persen dalam kategori kurang cukup, 18 persen kategori sangat cukup, dan 4 persen tidak cukup.



Skor yang paling tinggi muncul dari pernyataan Rastrada sesuai kebutuhan KPM. Namun, pernyataan dengan skor terendah adalah Ketika Rastrada dihentikan, KPM memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rastrada sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi pada sebagian KPM, malah menjadi ketergantungan terhadap bantuan, sehingga mereka tetap merasa nyaman meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap. Mengenai tingginya angka KPM belum cukup akan kuantitas bantuan Rastrada, penulis menganalisis berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat cukup memiliki jumlah tanggungan 1 – 2 orang, cukup memiliki tanggungan 3 – 4 orang, kurang cukup memiliki tanggungan 4 – 5 orang, sedangkan yang memilih tidak cukup memiliki tanggungan lebih dari 5 orang.

Aspek Kesetaraan

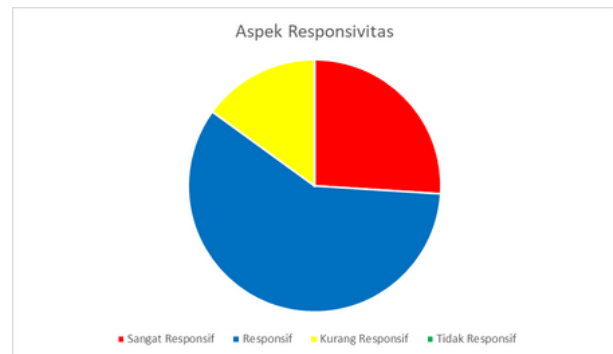
Kesetaraan berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Aspek kesetaraan yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu pemerataan jumlah dan pemerataan pelayanan petugas. Berdasarkan rekapitulasi skor individu, sebanyak 55 persen responden berada dalam kategori sangat setara dan 45 persen kategori setara.



Skor yang paling tinggi muncul dari pernyataan bahwa penyaluran dibagikan tiga karung beras, per karung berisi 10 kilogram dan petugas melayani dengan ramah. KPM. Namun, pernyataan dengan skor terendah adalah penyaluran Rastrada sesuai antrean kedatangan. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek kesetaraan, jumlah dan layanan petugas sudah setara, dibuktikan dengan perbedaan skor tiap item yang tidak terlalu signifikan.

Aspek Responsivitas

Responsivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Aspek responsivitas yang di dalamnya memuat dua indikator yaitu pengetahuan KPM terhadap tahapan program dan proses pengaduan. Berdasarkan rekapitulasi skor individu, sebanyak 59 persen responden berada dalam kategori responsif, 26 persen responden dalam kategori sangat responsif, dan 15 persen kategori kurang responsif.



Skor yang paling tinggi muncul dari pernyataan bahwa informasi penyaluran diberikan secara jelas dan tidak mendadak, selain itu kendala/kelehan KPM ditindaklanjuti dengan baik oleh petugas. Namun, pernyataan dengan skor terendah yaitu KPM memahami tahapan program Rastrada. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek responsivitas dari sisi pelayanan petugas sudah baik, namun dari sisi KPM masih banyak yang belum memahami terkait tahapan program Rastrada maupun alur pengaduan.

Aspek Ketepatan

Ketepatan mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan suatu program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Aspek ketepatan yang di dalamnya memuat tiga indikator yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan kesesuaian harapan KPM. Berdasarkan rekapitulasi skor individu, sebanyak 59 persen responden berada dalam kategori tepat, 39 persen kategori sangat tepat, dan 2 persen kategori kurang tepat.



Skor yang paling tinggi muncul dari pernyataan bahwa Rastrada disalurkan setiap tiga bulan atau empat termin dalam setahun dan pernyataan KPM belum pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT). Dari kedua pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022. Namun, pernyataan dengan skor terendah yaitu semua penerima manfaat Rastrada memang layak mendapat bantuan. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek ketepatan, Rastrada sudah tepat waktu, namun belum sepenuhnya tepat sasaran.

Selanjutnya dijabarkan simpulan temuan setiap aspeknya beserta kategori hasil yang didapatkan dari rekapitulasi skor populasi :

Aspek	Temuan Kunci	Kategori Hasil
Efektivitas	Tujuan utama Rastrada yaitu memenuhi kebutuhan pangan KPM dan mengurangi beban pengeluaran KPM telah tercapai. Namun belum dapat meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang dan kestabilan ekonomi.	Efektif (2.963)
Efisiensi	Indikator waktu sangat baik. Tidak menambah beban biaya dan tenaga, kecuali kendala teknis saat membawa beras.	Sangat Efisien (2.335)
Kecukupan	Bagi sebagian KPM, Rastrada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi juga tidak memiliki alternatif lain jika bantuan dihentikan.	Cukup (1.066)
Kesetaraan	Bantuan dinilai adil dan merata oleh mayoritas responden. Namun setiap kelurahan memiliki teknis penyaluran yang berbeda-beda.	Sangat Setara (1.669)
Responsivitas	Layanan petugas dan interaksi dengan KPM baik, namun masih banyak yang belum memahami tahapan program.	Responsif (1.787)
Ketepatan	Rastrada belum sepenuhnya tepat sasaran, tapi sudah sesuai harapan KPM.	Tepat (1.274)

Dokumentasi Rastrada 2024



Lalu, isu apa saja yang ditemukan di lapangan?

Pada pembahasan sebelumnya menunjukkan hasil yang positif pada setiap aspek, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi di lapangan. **Pertama**, mayoritas KPM kurang memperhatikan gizi yang seimbang, bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan nasi dan garam atau lauk seadanya. **Kedua**, Rastrada belum dapat mengubah taraf ekonomi KPM menjadi stabil. **Ketiga**, menurut petugas di lapangan, bahwa satu termin penyaluran membutuhkan waktu lebih dari empat jam bahkan bisa beberapa hari. **Keempat**, sebagian besar KPM harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi membawa beras setelah penyaluran. **Kelima**, sebagian merasa jarak lokasi jauh dan kesulitan membawa tiga karung beras sekaligus. **Keenam**, secara kuantitas, masih banyak KPM yang merasa bantuan belum mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya. **Ketujuh**, ditemukan bahwa salah satu KPM hanya mendapat dua karung beras. Hal tersebut karena ada alur pengambilan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Perwal. **Kedelapan**, setiap kelurahan terdapat teknis yang berbeda-beda dalam menentukan urutan pengambilan beras dan mekanisme perwakilan. **Kesembilan**, masih ditemukan KPM yang pernah mendapatkan PKH BPNT, namun tetap diberikan Rastrada. **Kesepuluh**, ditemukan beberapa KPM merupakan pejabat RT/RW, memiliki pekerjaan, dan dianggap mampu secara ekonomi. **Kesebelas**, tidak ada petunjuk teknis apabila KPM meninggal atau pindah alamat, sehingga sering terjadi perubahan jumlah pemesanan atau penyaluran beras.

Rekomendasi

Pada akhir tahun 2024 penulis telah menyampaikan advokasi kebijakan terkait isu Rastrada, dengan memberikan tiga alternatif kebijakan kemudian dianalisis menggunakan kriteria kebijakan dan *cost benefit analysis*. Berdasarkan analisis tersebut, penulis memberikan rekomendasi final yaitu :

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah (Rastrada). Menjadi langkah yang penting untuk dilakukan, sebab merupakan regulasi dasar program Rastrada.
2. Dinas Sosial sebagai pelaksana utama merancang sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan detail teknis operasional terkait implementasi program Rastrada. Bertujuan untuk menyediakan panduan terkait operasional program Rastrada, mengatur secara rinci dari pra hingga pasca. Sehingga tidak akan ada perbedaan teknis pelaksanaan di setiap kelurahan.

Dengan disusunnya rekomendasi kebijakan di atas, penulis berharap dapat memberikan kontribusi konkret dalam upaya perbaikan implementasi Program Rastrada di Kota Cimahi. Kedua rekomendasi tersebut tidak disusun secara asertif, tetapi berdasarkan hasil evaluasi kebijakan, temuan lapangan, kajian teoritis, serta masukan dari para pelaksana teknis dan pemangku kepentingan. Harapannya, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat menjadikan masukan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ke depan, sehingga program bantuan sosial daerah dapat berjalan lebih adil, merata, dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Abdul, S. (2016). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Jakarta: Bumi Aksara.
- Astuti, M., & Setyo, S. (2014). Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: P3KS Press.
- Huruswati, dkk (2014). Pengembangan Kebijakan, Strategi, Model. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Mardikanto. (2019). Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera. Jurnal Ekonomi, 6–10. <https://silap-online.kesra.jatengprov.go.id/data>
- Nor, Y., & Suryani, L. (2024). Efektivitas Program Beras Sejahtera Daerah (Rasda) di Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
- Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rustanto, B. (2015). Menangani Kemiskinan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sjafari, A. (2014). Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2013). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia (II). Bandung: Alfabeta.
- _____. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Yulia, S. (2020). Kepuasan Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Di Desa Neglasari Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Politeknik Kesejahteraan Sosial.

DRAFT REVISI

PERWAL NO.25 TAHUN 2022

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR
25 TAHUN 2022 TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH (RASTRADA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang :

- 1.bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat ini;
- 2.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah;

Mengingat : (disesuaikan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah diubah sebagai berikut:

1. **Pasal 22 terkait penyaluran kartu Rastrada dihapuskan.**
2. **Pasal 25 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menyalurkan Rastrada dari Kelurahan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Keputusan Wali Kota mengenai Penerima Rastrada.

3. **Disisipkan satu pasal baru di antara Pasal 25 dan Pasal 26, yang berbunyi :**

Pasal XX

(1) Dalam hal Penerima Manfaat meninggal dunia, keluarga wajib melaporkan ke Kelurahan dengan membawa akte/surat kematian resmi dari instansi berwenang.

(2) Pekerja Sosial Kelurahan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial menghentikan bantuan Rastrada terhitung sejak termin berikutnya setelah tanggal kematian.

(4)Ahli waris yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dapat mengajukan permohonan untuk pengalihan bantuan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

- a. Surat pernyataan dari ahli waris.
- b. Fotokopi KK dan KTP ahli waris.
- c. Surat kematian KPM sebelumnya.

(5)Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi, kemudian meneruskan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

(6)Jika disetujui, ahli waris ditetapkan sebagai penerima baru dalam SK Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Masyarakat yang akan menerima Rastrada harus membawa dan menunjukkan kartu identitas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Keputusan Wali Kota mengenai Penerima Rastrada kepada petugas yang membagikan Rastrada.

(2)Dalam hal Penerima Manfaat yang berhalangan hadir karena sakit, lanjut usia, disabilitas, atau alasan lain yang sah, pengambilan Rastrada dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga dengan menunjukkan fotokopi KTP penerima Rastrada, KTP pihak yang mewakili, dan Kartu Keluarga.

5. Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(2)Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tiga bulan atau sebanyak empat termin dalam setahun.

6. Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan mengenai :

- a.sasaran penerima;
- b.jumlah bantuan yang diterima;
- c.kualitas beras Rastrada;
- d.layanan petugas; dan/
- e.lainnya yang berkaitan dengan Rastrada.

7. Pasal 32 terkait prosedur kehilangan kartu Rastrada dihapuskan.

ANALISIS KEBIJAKAN

8. Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Menambahkan satu pasal baru di bagian BAB XIII KETENTUAN PENUTUP, yang berbunyi:

Pasal XX

Pelaksanaan teknis lebih lanjut dari Peraturan Wali Kota ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

(.....)

ANALISIS KEBIJAKAN

DRAFT SOP

PROGRAM RASTRADA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) merupakan inovasi pemerintah daerah kota Cimahi yang dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Program Rastrada bertujuan untuk melengkapi program nasional. Rastrada menyediakan bantuan berupa 10 kilogram beras kualitas premium setiap bulan kepada masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial yang belum terakomodasi bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS.

2. Tujuan

Menyediakan prosedur standar dalam operasional bantuan Rastrada agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran penerima Rastrada, termasuk masyarakat, Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Sosial Kota Cimahi.

4. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rastrada.

BAB II KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam Standar Operasional Prosedur ini mengacu pada ketentuan umum Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rastrada.

BAB III PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENETAPAN KPM

1. Persyaratan Penerima Manfaat

- Penduduk daerah Kota Cimahi dengan bukti KTP elektronik.
- Masuk dalam risiko sosial yang terdaftar pada DTKS dan non DTKS.
- Bukan penerima bantuan PKH dan/atau bantuan sembilan bahan pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

2. Prosedur Permohonan dan Penetapan KPM

- Dinas Sosial mempersiapkan daftar masyarakat calon penerima dan formulir permohonan.
- KPM mengambil dan mengisi formulir permohonan di Kelurahan.
- Lurah melakukan verifikasi daftar masyarakat calon penerima.

- Camat mengirimkan hasil verifikasi kepada Dinas Sosial.
 - Pekerja Sosial melakukan verifikasi permohonan.
 - Pekerja Sosial membuat rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada berdasarkan hasil verifikasi.
 - Pekerja Sosial menyampaikan rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada kepada Kepala Bidang Linjamsos dan Penanganan Fakir Miskin, lalu diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial.
 - Wali Kota menetapkan masyarakat penerima Rastrada dengan Surat Keputusan Wali Kota.
3. Dokumentasi dan Pelaporan
- Rekomendasi usulan masyarakat calon penerima Rastrada dibuat tertulis.
 - Berkas pendaftaran yang sudah diverifikasi diarsipkan oleh Dinas Sosial.
 - Data penerima yang disetujui disusun dalam SK Wali Kota dan diumumkan secara resmi.
4. Waktu Pendaftaran
- Pendaftaran dibuka setiap tahun sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
 - Durasi verifikasi maksimal 30 hari kerja sejak berkas diterima di Dinas Sosial.

BAB IV PROSEDUR PENYALURAN RASTRADA

1. Jadwal dan Lokasi Penyaluran

Penyaluran dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) termin dalam setahun. Penyaluran dilakukan di titik distribusi yaitu masing-masing kelurahan.

2. Tata Cara Pengambilan

- KPM hadir membawa identitas diri berupa fotokopi KK dan KTP.
- Dalam kondisi tertentu (sakit, lansia, disabilitas), dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang tercantum dalam KK. Apabila tidak ada yang dapat mewakili maka akan dibantu oleh petugas.
- KPM mengambil nomor antrean atau duduk sesuai urutan kedatangan.
- Petugas akan memanggil sesuai antrean kedatangan.
- KPM menunjukkan identitas diri untuk dikonfirmasi oleh petugas.
- KPM mengisi daftar hadir penerimaan dan menandatangani berkas Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KPM melakukan sesi dokumentasi yang dibantu oleh petugas.
- Petugas menyerahkan beras sebanyak 3 (tiga) karung kepada KPM.

3. Dokumentasi dan Pelaporan

- KPM atau yang mewakili membawa identitas diri.
- Daftar hadir dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh KPM dan diketahui oleh pejabat kelurahan, kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial melalui Pekerja Sosial kelurahan.
- Dokumentasi berupa foto melalui aplikasi yang terpusat.

4. Pembentukan Tim

- Penyaluran Rastrada dapat dibantu oleh tim.
- Tim yang dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- Tim terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- Tim dibantu oleh Camat dan Lurah beserta perangkat kelurahan.
- Tim dapat melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

BAB V PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Monitoring dan Evaluasi

- Dinas Sosial wajib melakukan pemantuan dari proses persiapan hingga realisasi penyaluran Rastrada.
- Pekerja Sosial kelurahan memiliki tanggungjawab melakukan pemantauan proses penyaluran Rastrada.
- Evaluasi dilakukan setiap termin, maksimal 7 hari setelah dilaksanakannya penyaluran.

2. Mekanisme Pengaduan

- Pengaduan dari masyarakat dapat melalui Pekerja Sosial atau petugas Pusat Kesejahteraan Sosial yang ada di setiap kelurahan.
- Masyarakat juga dapat mengadukan langsung kepada Dinas Sosial, apabila pengaduan berkaitan dengan:

-Sasaran penerima

-Jumlah bantuan yang diterima

-Kualitas beras Rastrada

- Pengaduan dapat dibuat secara tertulis, lisan, maupun melalui website.

3. Dokumentasi dan Pelaporan

- Dokumentasi dan hasil evaluasi dilampirkan dalam laporan penyaluran.
- Pengaduan yang masuk harus dicatat dan dilaporkan kepada Dinas Sosial.

BAB VI PROSEDUR PADA KPM YANG MENINGGAL DUNIA

1. Penghentian Bantuan

- Jika KPM meninggal dunia, keluarga wajib melaporkan ke Kelurahan dengan membawa akte/surat kematian resmi dari instansi berwenang.
- Kelurahan mencatat laporan dan meneruskan ke Dinas Sosial.
- Dinas Sosial mencoret nama KPM dari daftar penerima untuk termin selanjutnya dan merevisi Surat Keputusan Wali Kota di kemudian hari.

2. Pengalihan Bantuan kepada Ahli Waris

- Jika dalam keluarga masih terdapat anggota yang memenuhi syarat sebagai KPM, mereka dapat mengajukan permohonan pengalihan.
- Syarat pengajuan:

-Surat pernyataan dari ahli waris.

-Fotokopi KK dan KTP ahli waris.

-Surat kematian KPM sebelumnya.

- Kelurahan melakukan verifikasi dan meneruskan ke Dinas Sosial.
- Jika disetujui, ahli waris ditetapkan sebagai penerima baru dalam SK Wali Kota

BAB VII PROSEDUR SANKSI KPM DAN PETUGAS

1. Jenis Penyalahgunaan

- KPM : Menjual bantuan Rastrada/ memalsukan data penerimaan/ menggunakan bantuan tidak sesuai peruntukan.
- Petugas : Melakukan pungutan liar/ menyelewengkan bantuan/ memanipulasi data penerima.

2. Prosedur Pemberian Sanksi

- Pengaduan atau temuan penyalahgunaan dilaporkan ke Kelurahan.
- Kelurahan melakukan verifikasi awal dalam waktu 3 hari kerja.
- Jika terbukti:

-Untuk KPM: Pencoretan dari daftar penerima Rastrada. Pengembalian bantuan yang sudah diterima (jika dimungkinkan).

-Untuk Petugas: Pemberian teguran tertulis / penurunan jabatan / sanksi administratif lainnya sesuai regulasi kepegawaian.

- Setiap keputusan sanksi harus dibuat dalam berita acara dan dilaporkan ke Dinas Sosial.

3. Dokumentasi dan Pelaporan

Semua proses pemberian sanksi harus dicatat dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Sosial Kota Cimahi.

BAB VIII PROSEDUR PENANGANAN SITUASI DARURAT DALAM PENYALURAN RASTRADA

1. Jenis Situasi Darurat

- Bencana alam (banjir, gempa bumi, longsor).
- Gangguan distribusi logistik.
- Kondisi *force majeure* lain seperti pandemi atau kerusakan.

2. Prosedur Penanganan

- Tim Kelurahan/Kecamatan melaporkan situasi darurat ke Dinas Sosial maksimal 1x24 jam.
- Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan BPBD dan pihak terkait untuk penilaian dampak.
- Dinas Sosial bersama Tim Penyaluran mengkaji alternatif penyaluran:

-Penjadwalan ulang.

-Penyaluran di lokasi alternatif.

-Bantuan logistik tambahan bila diperlukan.

ANALISIS KEBIJAKAN

- Informasi perubahan jadwal atau lokasi diumumkan melalui media resmi Kelurahan dan Kecamatan.
 - Penyaluran darurat harus tetap menggunakan Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi lengkap.
3. Dokumentasi dan Pelaporan
- Semua kejadian darurat dan langkah mitigasi harus dicatat dalam laporan khusus.
 - Laporan harus dikirimkan ke Wali Kota Cimahi melalui Dinas Sosial dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah kejadian.

BAB IX PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam proses implementasi Rastrada agar berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi penyimpangan. SOP dapat diperbarui sesuai dengan kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

ANALISIS KEBIJAKAN